



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai akses universal (*universal access*) pada akhir tahun 2019 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
 8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
 9. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
 10. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1127);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 16);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 16);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor

- 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Gianyar 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2019-2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Akses Universal (*Universal Access*) 2019.
5. Sumber air minum yang layak adalah air minum perpipaan dan air minum nonperpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.
6. Sumber air minum tak layak adalah sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
7. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
8. Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang meliputi kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik/SPAL.
9. Fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah fasilitas sanitasi yang meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.
10. Pendekatan Berbasis Masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
11. Pendekatan Berbasis Lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak

diperoleh setiap warga secara minimal.

13. Indikator SPM Bidang Air Minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 (enam puluh) liter/orang/hari.
14. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60% (enam puluh per seratus), dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5% (lima per seratus).
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
17. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
18. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
19. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
22. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
23. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
24. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
25. Air Minum dan Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMKL adalah salah satu sektor pembangunan infrastruktur permukiman.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
27. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pamsimas adalah program pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat.
28. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
29. Akses Universal (*Universal Access*) adalah pemerataan akses terhadap air minum dan sanitasi.

30. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang selanjutnya disingkat *SDG's* adalah 17 (tujuh belas) tujuan dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL TAHUN 2019-2023

Pasal 2

RAD AMPL Tahun 2019-2023 berperan sebagai instrument sinkronisasi program-program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama 2019 sampai dengan 2023 dalam rangka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai target nasional Akses Universal (*Universal Access*) Tahun 2019 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDG's*) 2030.

Pasal 3

RAD AMPL Tahun 2019-2023 berfungsi sebagai:

- a. instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum Dan Sanitasi Jangka Menengah Daerah (5 tahun);
- c. acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja); dan
- d. instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD Semesta Berencana pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD Semesta Berencana.

Pasal 4

RAD AMPL Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Gianyar menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja OPD, dan APBD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar sampai dengan tahun 2023.

BAB III

PELAKSANAAN RAD AMPL TAHUN 2019-2023

Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2019-2023 adalah melalui RKPD, Renja OPD, APBD Kabupaten Gianyar, dapat melalui integrasi RAD AMPL ke dalam Program/Kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2019-2023 dengan dana di luar APBD Semesta Berencana Kabupaten Gianyar maka pelaksanaan Program/Kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan Litbang dan OPD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2019-2023 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD Semesta Berencana dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2019-2023 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya;
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja OPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
- (4) Kepala OPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing;
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (6) Kepala OPD menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda dan Litbang;
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim RAD AMPL atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah;
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;
- (9) Kepala Bappeda dan Litbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL;
- (10) Dalam hal evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD;
- (11) Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda dan Litbang;
- (12) Kepala Bappeda dan Litbang melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dokumen RAD AMPL Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 17 Februari 2020

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEĐE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020 NOMOR 22

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 22 TAHUN 2020

TANGGAL 18 FEBRUARI 2020

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
TAHUN 2019-2023

DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN TAHUN 2019-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah kebijakan yang sangat mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi, antara lain Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan (mencakup program Pro Rakyat, Keadilan untuk Semua, Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0445/M.PPN/11/2010 tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals (RAD MDGs). Dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal juga disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut, peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas nasional. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pelaksanaan prioritas nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Gianyar menyusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) sebagai instrumen percepatan daerah dalam mencapai target Sustainable Development Goals, yaitu menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar serta merupakan instrumen pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Air Minum dan Air Limbah sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010.

Selanjutnya Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/4343/Bangda Tanggal 23 September 2015 telah menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Pamsimas

di Daerah, maka Daerah diharapkan dengan segera untuk menetapkan RAD-AMPL dalam rangka pelaksanaan PAMSIMAS di daerah dan mewujudkan pencapaian universal access Tahun 2019 sesuai Target RPJMN 2015-2019.

RAD-AMPL Kabupaten Gianyar merupakan dokumen daerah yang berfungsi sebagai :

1. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
2. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
3. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja); dan
4. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD.

Penerapan RAD-AMPL diharapkan memberikan hasil nyata bagi Kabupaten Gianyar yaitu dalam hal meningkatnya cakupan akses dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi daerah sesuai target capaian universal access yang telah tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

Sistematika RAD AMPL Kabupaten Gianyar mengacu pada sistematika Petunjuk Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pemantauan RAD AMPL Program Pamsimas, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, kebijakan dan strategi nasional bidang air minum dan penyehatan lingkungan, ruang lingkup dari penyusunan Rencana Aksi Daerah bidang AMPL.

BAB II Kondisi Umum Pencapaian, Permasalahan dan Tantangan

Menjelaskan tentang kondisi air minum yang dapat diakses dan sanitasi bagi penduduk saat ini, mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat yang disebabkan karena rendahnya kualitas dan kuantitas dari air minum dan sanitasi, serta tantangan yang dihadapi bagi perkembangan air minum dan sanitasi selanjutnya.

BAB III Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi

Menjelaskan mengenai isu strategis yang dihadapi terkait pengelolaan air minum dan sanitasi di kabupaten, arah kebijakan 2019-2023, serta strategi pencapaian tahun 2019-2023.

BAB IV Program dan Kegiatan

Menjelaskan mengenai program dan kegiatan bidang air minum dan sanitasi tahun 2019-2023.

BAB V Kebutuhan Investasi

Menjelaskan tentang perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah dan rencana pembiayaan program dan kegiatan tahun 2019-2023.

BAB VI Pemantauan dan Evaluasi

Menjelaskan mengenai mekanisme dan formulir dari kegiatan pemantauan dan evaluasi RAD AMPL.

BAB VII Penutup

Memuat lampiran Matriks RAD AMPL yang berisi program, indikator, target pencapaian, alokasi anggaran, sumber dana dan instansi pelaksana.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

RAD-AMPL ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan Air Minum dan Sanitasi yang berkualitas.

1.2.2 Tujuan

RAD-AMPL ini bertujuan untuk:

1. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Air Minum dan Sanitasi;
2. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
3. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.3 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan

Kebijakan dan strategi nasional bidang air minum dan kesehatan lingkungan yang menjadi dasar dalam penyusunan RAD AMPL diantaranya:

A. Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019

Arah Kebijakan Nasional yang tercantum dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 antara lain menyebutkan bahwa:

1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai;
2. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi;
3. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset;
4. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; dan
5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi.

Sedangkan target Pembangunan Air Minum dan Sanitasi dapat dilihat pada tabel berikut. Dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, target pembangunan air minum dan sanitasi dapat dilihat pada **Tabel 1.1** berikut.

Tabel 1.1
Target Pembangunan Air Minum dan Sanitasi

Indikator	2014 (Baseline)	2019
Akses Air Minum Layak	70%	100 %
Akses Sanitasi Layak	60,9%	100%

Sumber: Perpres No. 2 Tahun 2015

Beberapa upaya pencapaian sasaran RPJMN 2015 – 2019, kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi :

- a. Peningkatan akses pelayanan sanitasi, baik melalui system on-site maupun off-site di perkotaan dan pedesaan.
- b. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi .
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan system sanitasi.
- d. Penguatan kelembagaan.
- e. Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan.

B. Renstra Ditjen Cipta Karya 2015-2019

- **Rencana Strategis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Adapun indikator kinerja programnya adalah meningkatnya kontribusi pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat yang terdiri dari peningkatan sambungan rumah SPAM jaringan perpipaan dan peningkatan cakupan SPAM bukan jaringan perpipaan. Sedangkan sasaran kinerja diukur melalui indikator:

- a. Pembangunan Infrastruktur SPAM Regional dengan indikator terbangunnya SPAM Regional dengan kapasitas 3.500 L/d;
- b. Pembangunan Infrastruktur SPAM Perkotaan dengan indikator terbangunnya SPAM IKK dengan kapasitas 10.200 L/d dan terbangunnya SPAM ibukota pemekaran/perluasan dengan kapasitas 2.070 L/d;
- c. Pembangunan Infrastruktur SPAM Perdesaan dengan indikator terbangunnya SPAM Perdesaan Berbasis Masyarakat dengan kapasitas 7.274 L/d;
- d. Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Khusus dengan indikator terbangunnya 770 L/d SPAM di Kawasan Kumuh Perkotaan, 238 L/d SPAM di Kawasan Nelayan, dan 492 L/d SPAM di Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar;
- e. Fasilitasi SPAM PDAM dengan indikator terbantunya Program di 174 PDAM dan berkembangnya jaringan SPAM MBR di 522 kawasan;
- f. Fasilitasi SPAM Non-PDAM dengan indikator terbantunya Program di 50 UPTD dan berkembangnya jaringan SPAM MBR di 1.400 kawasan;
- g. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Pengembangan Air Minum dengan indikator terselenggaranya pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan air minum di 507 Kabupaten/Kota.

Tabel 1.2
Strategi pendekatan pembangunan bidang Cipta Karya Kegiatan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Strategi Pendekatan	Sasaran Kegiatan Air Minum
Membangun Sistem Permukiman	Pembangunan Infrastruktur SPAM Regional
	Pembangunan Infrastruktur SPAM IKK
	Pembangunan SPAM Ibu Kota Pemekaran/ Perluasan
	Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Kumuh Perkotaan
	Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Nelayan
	Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar
	Pengembangan jaringan perpipaan air minum
Fasilitasi Pemda Provinsi/Kabupaten Kota	Fasilitasi PDAM
	Fasilitasi UPTD/Non-PDAM
	Penyelenggaraan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan air minum di Kab/Kota
Memberdayakan Masyarakat	Pembangunan Infrastruktur SPAM Berbasis Masyarakat

Sumber: Renstra Ditjen Cipta Karya 2015-2019

▪ **Rencana Strategis Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman**

Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan (Air Limbah dan Drainase) serta Pengembangan Persampahan sasaran kinerjanya diukur melalui indikator:

- a. Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dengan indikator terselenggaranya 15 NSPK peraturan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman;
- b. Pembinaan, Fasilitasi, Pengawasan dan Kampanye serta Advokasi dengan indikator terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman di 507 kabupaten/kota;
- c. Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan dan Komunal dengan indikator jumlah kabupaten/ kota yang dibangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota sebanyak 12 kabupaten/kota, jumlah kabupaten/kota yang dibangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala komunal sebanyak 4.694 kawasan di 438 kabupaten/kota, dan jumlah kabupaten/kota yang dibangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kawasan sebanyak 200 kawasan di 150 kabupaten/kota;
- d. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dengan indikator terbangunnya IPLT di 222 kabupaten/kota;
- e. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan indikator terbangunnya TPA di 163 kabupaten/kota;
- f. Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R dengan indikator terbangunnya TPST/3R di 850 kawasan di 334 kabupaten/kota;
- g. Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Akhir Sampah dengan indikator terbangunnya FPAS di 41 kabupaten/kota;
- h. Infrastruktur Drainase dengan indikator luas genangan yang tertangani seluas 4.500 Ha di 192 kabupaten/kota.

Adapun pengelompokan kegiatan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman berdasarkan strategi pendekatan pembangunan bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Strategi pendekatan pembangunan bidang Cipta Karya
Kegiatan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Strategi Pendekatan	Sasaran Kegiatan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Membangun Sistem	Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Kota
	Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Kawasan
	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
	Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir
	Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Akhir Sampah
	Infrastruktur Drainase
Fasilitasi Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota	Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Memberdayakan Masyarakat	Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Komunal
	Infrastruktur TPST/3R

Sumber: Renstra Ditjen Cipta Karya 2015-2019

C. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Air Minum dan Sanitasi

▪ Strategi, Kebijakan dan Perencanaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Untuk mempercepat penyediaan air minum dan sanitasi pemerintah menyusun kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem air minum dan sanitasi. Kebijakan dan strategi tersebut sekurang-kurangnya memuat isu strategis, tujuan, sasaran, serta kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi dijabarkan dalam bentuk Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Nasional dan Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Nasional. Peta jalan (Roadmap) Air Minum Nasional dan Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Nasional ditetapkan oleh Menteri yang menyanggarkan urusan pemerintahan di bidang penyediaan air minum dan/atau sanitasi. Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Nasional dan Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Nasional memuat sekurang-kurangnya gambaran umum, isu strategis, tujuan dan sasaran pengembangan, dasar kebijakan, pendekatan penanganan, prioritas pengembangan, skenario pendanaan, konsepsi kebijakan operasional, serta rencana strategis program pengembangan. Kebijakan dan strategi serta peta jalan (roadmap) menjadi acuan bagi kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah daerah dalam percepatan penyediaan air minum dan sanitasi.

Pemerintah provinsi menyusun Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Provinsi yang mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Nasional dan Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Provinsi yang mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Nasional dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota, yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyediaan air minum dan/atau sanitasi.

Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun :

- a. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Provinsi
- b. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Provinsi

D. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, antara lain menyebutkan bahwa :

- a. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat;
- b. Penyelenggaraan SPAM meliputi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM. Penyelenggaraan SPAM wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Pengembangan SPAM meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan;
- d. Pembangunan baru dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi belum tersedianya kapasitas, kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal dan/atau kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan;
- e. Peningkatan dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas;
- f. Perluasan dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat;
- g. Pengelolaan SPAM meliputi operasi dan pemeliharaan,

E. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas pelayanan dasar, sasaran, indikator dan batas waktu pencapaian.

▪ Sumber Daya Air

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dengan indikator :

1. Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

2. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.
- Cipta Karya
 1. Penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.
 2. Penyediaan sanitasi dengan indikator :
 - a. Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai
 - b. Persentase pengurangan sampah perkotaan
 - c. Persentase pengangkutan sampah
 - d. Persentase pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
 - e. Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari dua kali setahun.

F. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusaha air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

G. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 / PRT / M / 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Perencanaan pengembangan SPAM disusun mengacu pada Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM. Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah mengacu pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM dan peraturan pemerintah yang berlaku. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah antara lain memuat rencana strategis dan program pengembangan SPAM.

Rencana strategis dan program pengembangan SPAM memuat :

1. Identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai perkembangannya
2. Garis besar sistem penyediaan air baku di wilayah administratif
3. Garis besar rencana pembagian wilayah administratif menjadi satu atau lebih wilayah pelayanan sesuai potensi air baku dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik wilayah pelayanan dengan jaringan perpipaan maupun wilayah pelayanan dengan bukan jaringan perpipaan.
4. Indikasi program pengembangan untuk setiap rencana wilayah pelayanan berdasarkan urusan prioritas.
5. Kriteria dan standard pelayanan di wilayah administratif kabupaten.
6. Indikasi keterpaduan program dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi yang merupakan dampak penggunaan air minum untuk wilayah pelayanan yang dianggap strategis dan merupakan wilayah pusat pertumbuhan.
7. Indikasi alternatif pembiayaan dan pola investasi untuk wilayah pelayanan yang dianggap strategis dan merupakan wilayah pusat pertumbuhan.
8. Indikasi pengembangan kelembagaan untuk wilayah pelayanan yang dianggap strategis dan merupakan wilayah pusat pertumbuhan.

Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Daerah selain memuat rencana strategis juga memuat rencana induk pengembangan SPAM yang merupakan bagian atau tahapan awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode. Rencana induk pengembangan SPAM dapat berupa :

1. Rencana induk pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi kabupaten/kota.
2. Rencana induk pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota.
3. Rencana induk pengembangan SPAM lintas provinsi.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Pengertian Air Minum Aman dan Sanitasi Layak

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos; Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;

Tabel 1.4. Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/Improved

Sarana	Improved/Layak	Unimproved*)/Tidak layak
Air Minum	<ul style="list-style-type: none">- House connection (Sambungan rumah (SR))- Standpost/pipe (hidran)- Borehole (sumur bor)- Protected spring or well (sumur terlindungi)- Collected rain water (air hujan)- Water disinfected at the point of use	<ul style="list-style-type: none">- Unprotected well (sumur tak terlindungi)- Unprotected spring (mata air tak terlindungi)- Vendor-provided water (Air dari penjual/pedagang)- Bottled water (Air kemasan)- Water provided by tanker truck (air dari tanker truck)
Sanitasi	<ul style="list-style-type: none">- Sewer connection (sewer)- Septic tank- Pour flush (closet duduk)- Simple pit latrine (cubluk)- Ventilated Improved Pit-latrine (cubluk dengan ventilasi udara)	<ul style="list-style-type: none">- Service or bucket latrines- Public latrines- Latrines with an open pit

*) Karena tidak aman atau harga per satuannya lebih mahal

Sumber: Global Water Supply and Sanitation 2000 Report

1.4.2 DID, Stunting dan RPAM

A. Disability Inclusive Development (DID)/Inklusi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan jangka panjang baik fisik, mental, intelektual atau sensorik lain. Keterbatasan

penyandang disabilitas menghambat interaksinya untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat.

Pembangunan sarana air minum dan sanitasi yang inklusif adalah kegiatan pembangunan yang melibatkan dan bermanfaat bagi semua anggota masyarakat. Pembangunan inklusif terjadi ketika seluruh lapisan masyarakat termasuk orang dengan disabilitas menikmati proses-proses dan hasil pembangunan secara sama. Pembangunan inklusif mendorong kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat termasuk kelompok yang terpinggirkan. Pembangunan inklusif disabilitas adalah pembangunan yang melibatkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari kegiatan pembangunan dengan basis setara orang lain. Pembangunan inklusif disabilitas dilakukan untuk mencapai kesetaraan hak azasi manusia bagi orang dengan disabilitas dan memastikan partisipasi penuh serta akses terhadap seluruh aspek kemasyarakatan.

Hak penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi penuh, efektif dan inklusif di kehidupan sosial berdasarkan persamaan telah dinyatakan dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dimana Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut. Pembangunan inklusif disabilitas ini menjadi perhatian dalam kerangka kerja pengamanan lingkungan dan sosial dalam program yang dilakukan Bank Dunia. Penyandang disabilitas harus berpartisipasi dan mendapat manfaat dari proses pembangunan.

B. Stunting Risk Reduction (Penurunan Prevalensi Balita Pendek)

Indonesia telah mengalami kemajuan dalam menurunkan angka kemiskinan dari 16,6% menjadi 12,5% pada tahun 2011, namun demikian kekurangan gizi pada anak masih tetap menjadi masalah. Riskesdas 2010 memperlihatkan bahwa prevalensi gizi kurang (Berat Badan menurut Umur di bawah standar) pada anak usia di bawah lima tahun telah menurun hingga di bawah 18%, tetapi prevalensi anak pendek (yang untuk selanjutnya disebut stunting) masih tinggi dan termasuk menjadi masalah kesehatan masyarakat. Prevalensi stunting pada tahun 2010 35,6% atau diperkirakan 7.688.000 anak Indonesia dikategorikan stunting.

Stunting merupakan kekurangan gizi kronis akibat kekurangan asupan zat gizi dalam waktu yang lama, biasanya diikuti dengan frekuensi sering sakit, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengasuhan, penggunaan air yang tidak bersih, lingkungan yang tidak sehat, terbatasnya akses terhadap pangan dan kemiskinan. Stunting terkait erat dengan gangguan perkembangan kognitif dan produktivitas. Pada saat dewasa seringkali mengalami keterbatasan fisik, mudah terserang penyakit menular dan tidak menular serta rendahnya

kemampuan kognitif yang menyebabkan hilangnya kesempatan kerja. Semua hal tersebut bersama-sama meminimalkan potensi penghasilan seumur hidupnya.

Untuk pencegahan anak stunting, terdapat bukti-bukti ilmiah yang kuat tentang intervensi gizi yang efektif untuk pencegahan anak stunting. Intervensi tersebut adalah intervensi spesifik atau intervensi langsung dan intervensi sensitif atau intervensi tidak langsung. Salah satu bentuk Intervensi sensitif adalah upaya peningkatan kualitas lingkungan misalnya air bersih, fasilitas sanitasi dan kebiasaan-kebiasaan bersih dan sehat seperti cuci tangan dengan sabun dan buang air besar di jamban.

C. Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)

Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) adalah upaya pencegahan, perlindungan, serta pengendalian pasokan air minum bagi masyarakat melalui pendekatan manajemen risiko. RPAM diawali dengan mengidentifikasi risiko dari hulu sampai ke tangan konsumen untuk kemudian ditentukan tindakan pengendaliannya dengan harapan bahwa melalui RPAM pelayanan air akan yang lebih baik. RPAM dilakukan melalui 3 komponen:

- **RPAM Sumber** , yaitu program pengamanan air minum di wilayah sumber air termasuk mata air, sungai, danau, laut dan air tanah dangkal, maupun air tanah dalam. RPAM Sumber bertujuan untuk mengendalikan pencemaran dan meningkatkan kualitas sumber air baku bagi pengelola air minum, konsumen termasuk pengguna yang langsung menggunakan air dari sumber air baku seperti mata air, dan lain sebagainya;;
- **RPAM Operator**, yaitu program pengamanan air minum yang dilakukan pada sistem pengolahan air minum yang meliputi unit intake, pengolahan, dan distribusi air minum. RPAM-Operator meliputi operator berbasis institusi seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Dinas, maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang mengelola air minum di daerah maupun operator berbasis masyarakat seperti Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (BP-SPAM), Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPAM), dan badan pengelola di tingkat desa dan/atau masyarakat yang mengelola air minum. RPAM-Operator bertujuan untuk mengefisiensikan biaya pengolahan dan memperbaiki pelayanan penyelenggara air minum baik oleh pemerintah, PDAM, maupun masyarakat atau swasta;
- **RPAM Konsumen**, yaitu program pengamanan air minum pada tingkat pengguna atau konsumen dan lebih ditujukan kepada cara-cara penyimpanan

air yang aman di tingkat rumah tangga dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). RPAM-Konsumen ditujukan untuk mencegah terjadinya rekontaminasi air minum setelah mencapai tangan konsumen/pengguna. Pada RPAM-Konsumen, masyarakat dipastikan untuk selalu mendapatkan air minum yang berkualitas dan memenuhi standar kesehatan.

RPAM dilakukan dalam rangka memenuhi prinsip pemenuhan 4K dalam penyediaan air minum yaitu: Kuantitas kebutuhan air minimum 60 liter/hari/orang, Kualitas sesuai dengan standard kesehatan, Kontinuitas 24 jam layanan, dan Keterjangkauan dimana tarif tidak lebih dari 4% pendapatan pelanggan.

1.4.3 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun.

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai jalan internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL, maka program kunci RAD AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan:

1. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum (untuk perkotaan dan perdesaan)
 - a. Pembangunan SPAM baru
 - b. Perluasan layanan SPAM
 - c. Peningkatan kinerja SPAM
2. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak
3. Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS) menuju Stop Buang Air Besar Sembarangan
4. Program pengelolaan lingkungan untuk konservasi sumber air baku
5. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kabupaten.

BAB II

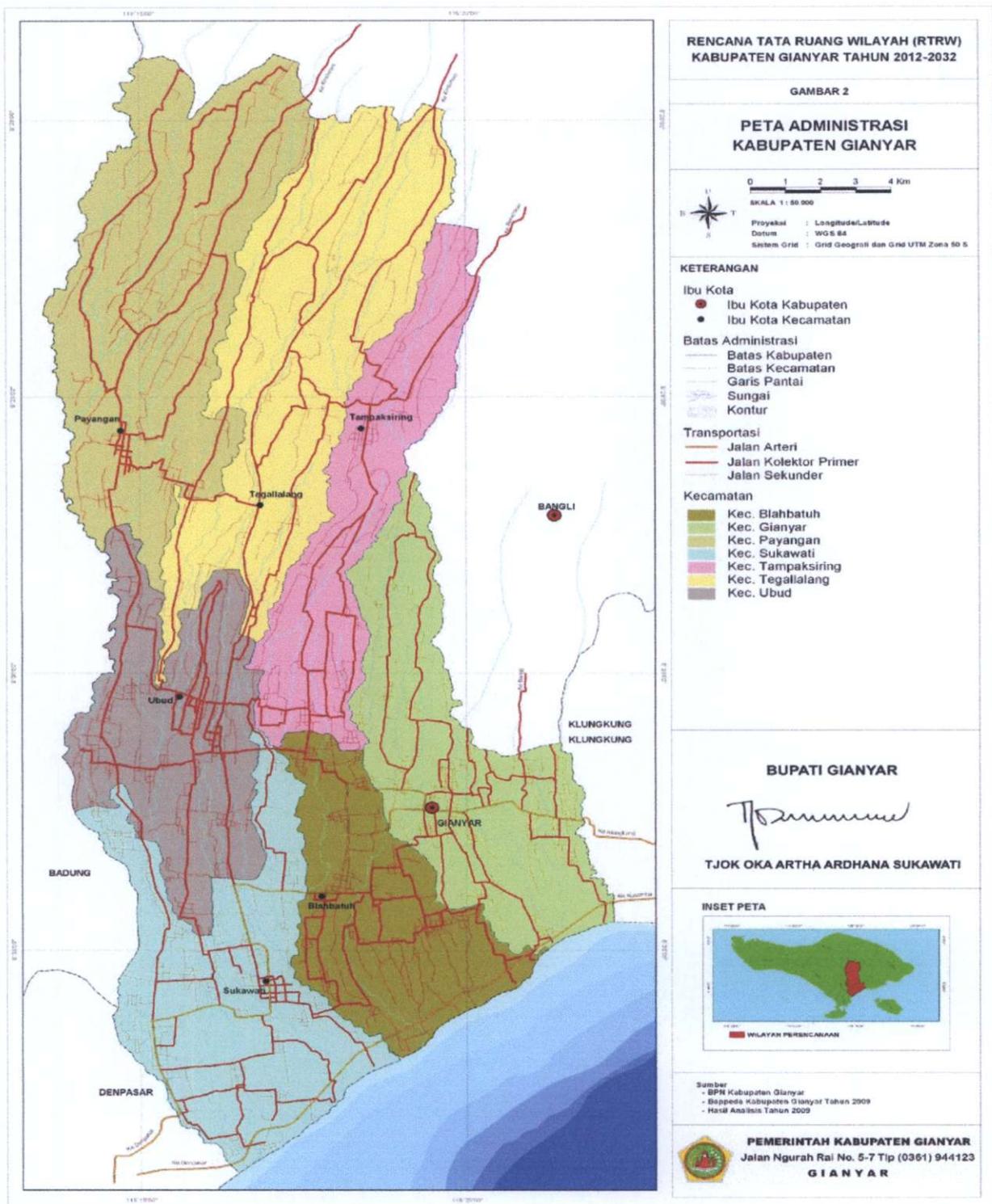
KONDISI UMUM

2.1 Kondisi Saat Ini

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu dari sembilan Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Bali. Gianyar merupakan salah satu dari sembilan Kabupaten/Kota di Propinsi Bali, terletak antara $08^{\circ} 18'48''$ – $08^{\circ} 38'58''$ Lintang Selatan $115^{\circ} 13'29''$ – $115^{\circ} 22'23''$ Bujur Timur. Letak Geografi tersebut dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bangli
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli
- c. Sebelah Selatan : Selat Badung dan Samudera Indonesia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Badung dan Kota Denpasar

Wilayah administrasi Kabupaten Gianyar beserta batas administrasinya dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1



Sumber: RTRW Kabupaten Gianyar 2012-2032

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Gianyar

Luas Kabupaten Gianyar 36.800 Hektar atau 6,53% dari luas Bali secara keseluruhan. Secara administratif, Kabupaten Gianyar terbagi menjadi 7 kecamatan yaitu Kecamatan Sukawati (12 desa/kelurahan, 111 banjar dinas/ lingkungan), Kecamatan Blahbatuh (9 desa/kelurahan, 67 banjar dinas/ lingkungan), Kecamatan Gianyar (17 desa/kelurahan, 67 banjar dinas/ lingkungan), Kecamatan Tampaksiring (8 desa/kelurahan, 70 banjar dinas/ lingkungan), Kecamatan Ubud (8 desa/ kelurahan, 67 banjar dinas/lingkungan), Kecamatan Tegallalang (7

desa/kelurahan, 65 banjar dinas/lingkungan), dan Kecamatan Payangan (9 desa/kelurahan, 59 banjar dinas/lingkungan).

Bila dilihat dari luas wilayah per kecamatan, Kecamatan Payangan memiliki luas terbesar mencapai 7.588 Hektar atau 20,62 % dari luas Kabupaten, diikuti oleh Kecamatan Tegallalang 6.180 Hektar (16,79%), Kecamatan Sukawati 5.502 Hektar (14,95%), Kecamatan Gianyar 5.059 Hektar (13,75%), Kecamatan Tampaksiring 4.263 Hektar (11,58%), dan Kecamatan Ubud 4.238 Hektar (11,52 %), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Blahbatuh 3.970 Hektar (10,79%). Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Gianyar

No	Kecamatan	Luas (Ha)	% Dari Luas Gianyar	% Dari Luas Bali
1	Sukawati	5.502	14,95	0,98
2	Blahbatuh	3.970	10,79	0,70
3	Gianyar	5.059	13,75	0,90
4	Tampaksiring	4.263	11,58	0,76
5	Ubud	4.238	11,52	0,75
6	Tegallalang	6.180	16,79	1,10
7	Payangan	7.588	20,62	1,35
Jumlah		36.800	100,00	6,53

Sumber : Gianyar Dalam Angka, BPS

Jumlah penduduk Kabupaten Gianyar pada tahun 2018 berdasarkan Gianyar Dalam Angka 2019 adalah 508.100 jiwa. Jumlah tersebut telah mengalami perubahan dan pertumbuhan, karena pada tahun 2013, jumlahnya mencapai 486.400 jiwa. Selama 5 tahun telah terjadi penambahan penduduk sejumlah 21.700 jiwa.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2023 Kabupaten Gianyar

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2018			Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2023		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sukawati	62.780	61.270	124.050	67.514	65.890	133.404
2	Blahbatuh	36.030	35.460	71.490	37.920	37.320	75.240
3	Gianyar	47.380	46.460	93.840	49.731	48.765	98.497
4	Tampaksiring	24.640	23.830	48.470	25.522	24.683	50.205
5	Ubud	37.260	36.570	73.830	38.756	38.038	76.794
6	Tegallalang	26.790	26.600	53.390	27.798	27.601	55.400
7	Payangan	21.520	21.510	43.030	22.125	22.114	44.239
TOTAL		256.400	252.700	508.100	269.366	264.412	533.778

Sumber: Gianyar Dalam Angka 2019, BPS

2.1.1 Air Minum

Rumah tangga yang telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum aman perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Gianyar adalah sebanyak 84,14% dimana untuk akses berkelanjutan terhadap sumber air minum di perkotaan sebanyak 53,56% dan di pedesaan sebanyak 20,34% (sumber: Dinas PU PR Kabupaten Gianyar dan PDAM Kabupaten Gianyar).

Penyediaan air bersih di Kabupaten Gianyar dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gianyar dan saat ini masing-masing unit pengelolaan sudah ada di tingkat Kecamatan. Sumber air di PDAM Gianyar pada saat ini yang terbesar memanfaatkan sumur dalam dengan kapasitas pengambilan sekitar 412 l/dt, untuk sumber mata air yang sekarang dimanfaatkan kapasitas kecil dengan rata-rata debit per mata air sebesar 10 l/dt dengan debit total pengambilan sebesar 200 l/dt.

Penyediaan air bersih dalam skala kecil di tingkat Kecamatan yang tidak dijangkau oleh PDAM sebagian dikelola oleh lembaga desa (PAMDES). Penduduk desa/lembaga desa melakukan pengelolaan untuk memenuhi kebutuhan air minum secara swadaya.

Perkembangan dan aktivitas masyarakat saat ini telah mengalami peningkatan sehingga peningkatan prasarana air minum sangat mendesak dilakukan. Penyediaan air minum baik oleh PDAM maupun PAMDES perlu dilakukan evaluasi sistem jaringan secara menyeluruh baik menyangkut kebutuhan air baku maupun peningkatan sistem jaringan baik di tingkat transmisi maupun distribusi.

Pelayanan jaringan perpipaan yang dikelola PDAM di Kabupaten Gianyar meliputi wilayah Gianyar, Blahbatuh, Ubud, Sukawati, Tegallalang, Payangan, dan Tampak Siring.

1. PDAM Cabang Gianyar

Daerah layanan untuk PDAM Cabang Gianyar meliputi beberapa desa antara lain Desa Semita, Petak Kaja, Suwat, Petak, Siangan, Babakan, Bitra, Beng, Sidan, Samplangan, Temesi, Tulikup, Abian Base, Tegal Tugu, Serongga, dan Desa Lebih. Pelayanan untuk Kecamatan Gianyar mempergunakan beberapa reservoir antara lain reservoir Petak Kaja, Madangan, Babakan, Beng, dan Bukit Jati. Tingkat pelayanan PDAM Cabang Gianyar mencakup 10.937 SR atau sejumlah 65.622 jiwa dari 86.843 jiwa penduduk Kecamatan Gianyar dengan tingkat pelayanan 75 %. PDAM Cabang Gianyar juga menerima dan memberikan suplai air kepada PDAM Cabang Blahbatuh.

2. PDAM Cabang Blahbatuh

Daerah layanan PDAM Cabang Blahbatuh meliputi desa Bedulu, Tegallingah, Buruan, Blahbatuh, Belega, Bona, Keramas, Pering, Medahan, dan Saba. Tingkat pelayanan PDAM Cabang Blahbatuh meliputi 6.742 SR atau sejumlah 40.452 jiwa dari 65.875 jiwa penduduk Kecamatan Blahbatuh dengan cakupan pelayanan 61 %. PDAM Cabang Blahbatuh menerima suplai air dari Tampaksiring, Ubud, dan Gianyar dan juga memberikan suplai air ke Gianyar.

3. PDAM Cabang Ubud

Daerah layanan PDAM Cabang Ubud meliputi desa Petulu, Kedewatan, Sayan, Peliatan, Singakerta, Lodtunduh, dan Mas. Tingkat pelayanan PDAM Ubud meliputi 5.914 SR atau 35.484 jiwa dari 69.323 jiwa penduduk Kecamatan Ubud dengan cakupan pelayanan 51 %. PDAM Cabang Ubud juga mendapatkan suplai air dari Payangan, Tegalalang dan juga memberikan suplai air ke Tampaksiring, Gianyar, dan Sukawati.

4. PDAM Cabang Payangan

Daerah Pelayanan PDAM Cabang Payangan meliputi desa Kerta (Barat), Kerta (Timur), Puhu, Bukian, Buahon, Melinggih, Melinggih Kelod, Klusa. Tingkat pelayanan PDAM Payangan meliputi 2.191 SR atau 13.146 jiwa dari 41.164 jiwa penduduk Kecamatan Payangan dengan cakupan pelayanan 31,9 %. PDAM Cabang Payangan memiliki beberapa reservoir yaitu reservoir Kerta I, Kerta II, Puhu, dan Air Jeruk. PDAM Cabang Payangan memberikan suplai air ke Tegalalang dan Ubud.

5. PDAM Cabang Tegalalang

Daerah Pelayanan PDAM Cabang Tegalalang meliputi Desa Kedisan, Kendran, Tegalalang, dan Keliki. Tingkat pelayanan PDAM Tegalalang adalah 3.179 SR atau 19.074 jiwa dari 50.325 jiwa penduduk Kecamatan Tegalalang dengan cakupan pelayanan adalah 37,9 %. PDAM Tegalalang menerima suplai air dari Payangan dan juga memberikan suplai air ke Ubud.

6. PDAM Cabang Sukawati

Daerah pelayanan PDAM Cabang Sukawati meliputi desa Singapadu Kaler, Singapadu Tengah, Kemenuh, Singapadu, Batuan, Sukawati, Celuk, Batubulan Kangin, Batubulan, Guwang, Ketewel. Tingkat pelayanan PDAM Cabang Sukawati adalah 9.035 SR atau 54.210 jiwa dari 110.429 jiwa penduduk

Kecamatan Sukawati dengan kata lain cakupan pelayanan PDAM adalah 49 %. PDAM cabang Sukawati juga memberikan suplai air ke Denpasar dan Blahbatuh.

7. PDAM Cabang Tampaksiring

Daerah pelayanan PDAM Tampaksiring meliputi Desa Manukaya Barat, Manukaya Timur, Tampaksiring, Sanding, Pejeng Kangin, Pejeng Kaja, Pejeng, Pejeng Kelod, Pejeng Kawan dan Br. Laplapan Ubud. Reservoir yang berada dalam wilayah PDAM Tampaksiring antara lain reservoir Bantas, Puncak Tegeh, Teman, Keranjangan, Maniktawang, Mancawarna, Pejeng Kaja, dan Pejeng Kelod. Tingkat pelayanan PDAM Tampaksiring adalah 5.506 SR atau 33.036 jiwa dari 45.818 jiwa penduduk Kecamatan Tampaksiring dengan kata lain cakupan pelayanan 72 %. PDAM cabang Tampaksiring juga memberikan suplai ke Blahbatuh dan menerima suplai air dari Ubud.

Pelayanan bukan jaringan perpipaan dikelola oleh lembaga desa (PAMDES). Penyediaan air bersih yang dilakukan adalah untuk skala kecil dengan tujuan memenuhi kebutuhan air minum secara swadaya. Umumnya dilakukan di tingkat Kecamatan yang tidak dijangkau oleh PDAM, seperti di wilayah Payangan, Tegallalang dan Tampaksiring yang merupakan daerah dataran tinggi. Pada daerah dengan kondisi topografi tersebut, penyaluran air bersih dengan perpipaan sulit untuk dilakukan.

Kondisi penyediaan air bersih di Kabupaten Gianyar dilayani oleh PDAM dan Air Pedesaan. Prosentase pelayanan air bersih perpipaan yang dilayani oleh PDAM adalah sebanyak 53,56% dan sebanyak 20,34% yang dilayani oleh air pedesaan. Sedangkan untuk penduduk yang menggunakan air bersih non perpipaan masih ada sebanyak 10,24 %. Untuk lebih jelas akan dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Kondisi Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Gianyar

No	Kecamatan	Kondisi Penyediaan Air Bersih							
		Perpipaan				Total		Non Perpipaan	
		PDAM		Air Pedesaan					
		KK	%	KK	%	KK	%	KK	%
1	Gianyar	15.739	70,08	1.423	6,27	17.727	78,06	1,808	7.96
2	Blahbatuh	8.081	54,62	-	-	12.558	83,94	3,324	22.22
3	Payangan	5.192	41,55	9.815	77,69	13.596	100	564	4.47
4	Sukawati	9.797	49,67	-	-	16.108	80,77	3,503	17.57
5	Tampaksiring	5.724	48,56	3.225	27,06	10.461	87,77	130	1.09
6	Tegallalang	5.868	53,05	7.336	65,59	11.653	100	446	3.99
7	Ubud	8.366	59,18	100	0,7	9.467	66,24	1,242	8.69
Total		58.767	53,56	21.899	20,34	91.570	85,07	11,017	10,24

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Gianyar dan PDAM Kab Gianyar, 2018

Adapun potensi sumber air baku di Kabupaten Gianyar menurut data dari PDAM Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Potensi dan kapasitas sumber air baku di Kabupaten Gianyar

No	Kecamatan	PDAM (liter/det)	Mata Air (liter/det)	Air permukaan (liter/det)	Air Tanah (liter/det)	Lain- Lain (liter/det)	Jumlah debit (liter/det)
1	Gianyar	269,00	41,50		182,14		223,64
2	Blahbatuh	149,94		4,12	103,72		107,84
3	Sukawati	209,60		11,82	147,19		159,01
4	Ubud	54,95	13,90		35,08		58,98
5	Payangan	187,15	10,52	175,29			185,81
6	Tegallalang	65,50	47,72				47,72
7	Tampaksiring	91,82	68,57		12,61		81,18
	Total	1.027,96	182,21	191,23	480,74	-	854,18

Sumber: PDAM Kabupaten Gianyar

Ditinjau dari sistem penyediaan air minumannya, capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Gianyar ditampilkan dalam Tabel 2.5. berikut ini:

Tabel 2.5.
Jumlah Sambungan Rumah (SR) Menurut Sumber Air Minum Tahun 2018

No	Kecamatan	PDAM	PAMSI MAS/ Pok mas	Sumur Gali	Mata Air	Sumur Bor	PAH	Lain Lain	Jumlah Total (unit)
1	Gianyar	15.739	1.903	1.780	1.423	28	-	-	17.727
2	Blahbatuh	8.081	136	3.232	-	92	-	-	12.558
3	Payangan	5.192	8.714	527	9.815	37	-	-	13.596
4	Sukawati	9.797	192	3.267	-	236	-	-	16.108
5	Tampaksiring	5.724	2.933	105	3.225	25	-	-	10.461
6	Tegallalang	5.868	6.998	95	7.336	351	-	-	11.653
7	Ubud	8.366	54	993	100	249	-	-	9.467
	Total	58.767	20.930	9.999	21.899	1.018	-	-	91.570

Sumber: Dinas PUPR dan PDAM Kabupaten Gianyar, 2018

Jumlah Sambungan Rumah (SR) PDAM Kabupaten Gianyar terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Gianyar adalah sebanyak 58.767 SR, jumlah ini sudah bertambah sejak tahun 2011 yang hanya berjumlah 49.110 SR. Jumlah pelanggan terbanyak adalah di Kecamatan Gianyar yaitu sebanyak 15.739 SR. Untuk lebih jelasnya Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Gianyar pada masing-masing cabang kecamatan dari tahun 2011 – 2018 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.6.
Jumlah Sambungan Rumah (SR) PDAM Tahun 2011-2018

No	Kecamatan	Jumlah pelanggan							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Gianyar	12.326	12.601	12.857	13.043	13.178	14.349	14.811	15.739
2	Blahbatuh	7.408	7.483	7.676	8.205	8.385	8.419	8.985	8.081
3	Ubud	7.212	7.429	7.715	7.972	8.134	8.253	8.446	5.192
4	Payangan	2.389	2.445	2.527	3.022	3.093	3.135	3.259	9.797
5	Tegallalang	3.659	3.531	3.443	3.260	3.287	3.300	3.385	5.724
6	Sukawati	10.188	10.486	10.783	11.083	11.456	11.619	11.977	5.868
7	Tampaksiring	5.928	5.995	6.114	6.520	6.546	6.457	6.453	8.366
	Total	49.110	49.970	51.115	53.105	54.079	55.532	57.316	58.767

Sumber: PDAM Kabupaten Gianyar

Tabel 2.7. Kapasitas Produksi dan Distribusi
PDAM Kabupaten Gianyar Tahun 2018

NO	LOKASI	KAPASITAS		KAPASITAS TERPASANG				KAPASITAS				IDLE		KAPASITAS			KAP. DIST VALIDASI (M ³)	TKA PROD %	KAP. PRODUKI VALIDASI			
		SUMBER		ANGGARAN		REALISASI		PRODUKSI				PRODUKSI		HASIL VALIDASI SUMBER					(L/dt)	(M ³)		
		(L/dt)	(M ³ /Bln)	(L/dt)	(M ³)	(L/dt)	(M ³)	(Jam/Hr)	(Jam/Bln)	(L/dt)	(M ³)	(L/dt)	(M ³)	WM(L/dt)	UFM(L/dt)	EROR (%)					(M ³)	
A	CAB.GIANYAR																					
1	MAG Barong	20,00	53.568	20,00	53.568,00	16,93	45.345	24,00	744,00	14,20	38.030	3,51	7.315,31	14,38	16,87	-	37.442	1,55	13,42	38.030		
2	MAG Gilgit	11,00	29.462	11,00	29.462,40	9,59	25.686	24,00	744,00	8,84	23.680	1,79	4.804,81	10,66	9,40	11,82	22.271	(6,66)	7,80	20.881		
3	SB Beng I	4,00	10.714	4,00	10.713,60	2,36	6.321	24,00	744,00	3,29	8.811	0,19	503,35	3,65	2,41	33,97	5.818	-	2,17	5.818		
4	SB Beng II																					
5	SB Beng III	5,00	13.392	5,00	13.392,00									3,07	2,03	33,88						
6	SB Beng IV	20,00	53.568	20,00	53.568,00	15,00	40.176	24,00	744,00	10,54	28.228	4,70	12.576,45	10,78	10,54	2,23	25.097	9,07	10,30	27.600		
7	SB Abianbase	11,00	29.462	11,00	29.462,40	11,00	29.462	24,00	744,00	10,70	28.659	0,30	803,40	10,19	10,19	-	28.659	-	10,70	28.659		
8	SB Tedung	14,00	37.498	14,00	37.497,60	11,17	29.918	22,29	691,00	12,22	30.402	(0,00)	2.122,37	11,43	10,45	8,57	27.795	-	11,17	27.795		
9	SB Serongga	11,00	29.462	11,00	29.462,40	9,38	25.123	23,84	739,00	10,63	28.268	(0,39)	(856,87)	10,75	9,88	8,09	24.824	4,45	9,77	25.980		
10	SB Siangan	6,00	16.070	6,00	16.070,40	6,00	16.070	23,77	737,00	4,85	12.874	1,80	4.938,52	4,36	3,77	13,53	11.082	0,45	4,20	11.132		
11	SB Sidan	14,00	37.498	14,00	37.497,60	10,99	29.436	22,00	682,00	12,94	31.776	0,86	4.556,37	13,73	10,75	21,70	24.862	0,07	10,13	24.879		
12	SB Astina Selatan	19,00	50.890	19,00	50.889,60	14,00	37.498	22,13	686,00	15,00	37.044	0,67	4.572,37	14,84	13,19	11,12	13.657	58,52	13,33	32.925		
13	SB Babakan I	4,00	10.714	4,00	10.713,60	3,45	9.240	23,10	716,00	3,26	8.392	0,63	1.968,88	3,82	3,31	13,35	7.272	-	2,82	7.272		
14	SB Babakan II	16,00	42.854	16,00	42.854,40	15,46	41.408	23,90	741,00	15,30	40.820	2,57	7.030,55	15,46	13,02	15,78	33.965	1,20	12,89	34.378		
15	SB Madangan	5,00	13.392	5,00	13.392,00	3,41	9.133	23,92	741,40	3,64	9.703	0,14	396,15	4,32	3,89	9,95	8.727	0,11	3,27	8.737		
16	SB Bukit Jati I	16,00	42.854	16,00	42.854,40									11,49	9,37	18,45						
17	SB Bukit Jati II	28,00	74.995	28,00	74.995,20	25,00	66.960	23,77	737,00	22,45	59.577	3,48	9.870,31	25,15	24,10	4,17	48.621	14,83	21,52	57.090		
18	MAP Taman Bali / MAG Tulikup	5,00	13.392	5,00	13.392,00	4,00	10.714	24,00	744,00	1,48	3.952	2,52	6.761,60	2,04	2,26	-	3.657	7,48	1,48	3.952		
19	MAP Melayang / Tegal Saat I	9,00	24.106	8,00	21.427,20	8,62	23.088	23,67	733,65	8,06	21.291	0,85	2.559,02	8,38	8,08	3,58	20.459	0,34	7,77	20.529		
20	MAP Melayang / Tgal Saat II	4,00	10.714	4,00	8.035,20	3,26	8.732	23,66	733,50	3,30	8.710	0,08	344,18	2,70	2,60	3,70	8.387	-	3,18	8.387		
21	SB Blahpane	15,00	40.176	15,00	40.176,00	12,68	33.962	24,00	744,00	14,03	37.566	0,17	455,03	13,42	11,97	10,80	32.346	3,47	12,51	33.507		
22	SB Taman Makam Pahlawan	30,00	80.352	30,00	80.352,00	26,38	70.656	24,00	744,00	29,60	79.277	(1,67)	(4.463,42)	27,65	26,20	5,24	73.122	2,66	28,05	75.120		
	JUMLAH A	267,00	715.133	266,00	709.776,00	208,68	558.929	23,58	731,03	204,32	537.060	22,20	66.258,38	222,27	204,28	229,96	458.061	7,02	186,48	492.670		
	Distribusi Dari Sumber Lain																43.908					
	Distribusi SB Wanayu																					
	JUMLAH TOTAL	267,00	715.133	266,00	709.776,00	208,68	558.929	23,58	731,03	204,32	537.060	22,20	66.258,38	222,27	204,28	229,96	501.969	(1,89)	186,48	492.670		

NO	LOKASI	KAPASITAS		KAPASITAS TERPASANG				KAPASITAS				IDLE		KAPASITAS			KAP. DIST VALIDASI	TKA PROD	KAP. PRODUKSI	
		SUMBER		ANGGARAN		REALISASI		PRODUKSI				PRODUKSI		HASIL VALIDASI SUMBER					(M ³)	%
1	PRODUKSI PDAM	(L/dt)	(M ³ /Bln)	(L/dt)	(M ³)	(L/dt)	(M ³)	(Jam/Hr)	(Jam/Bln)	(L/dt)	(M ³)	(L/dt)	(M ³)	WM(L/dt)	UFM(L/dt)	EROR (%)	(M ³)	%		
D	PDAM CABUBUD																			
1	SB. SAMBAHAN	4,00	10.714	4,00	10.713,60	4,00	10.714	23,81	738,05	3,64	9.675	0,36	1.038,60	3,92	4,26	-	9.535	1,45	3,64	9.675
2	MAP. Sapat / TELAGA WAJA	15,00	40.176	15,00	40.176,00	13,90	37.230					13,90	37.229,76							
	- pompa I							21,63	670,54	13,89	33.531	(13,31)	(32.140,87)	13,99	13,41	4,15	29.411	8,49	13,31	32.141
	- pompa II																			
3	SB. SAYAN I																			
4	SB. SAYAN II	13,00	34.819	13,00	34.819,20	12,46	33.373	19,89	616,71	11,83	26.258	1,64	9.342,64	8,84	8,09	8,48	23.050	4,08	10,82	24.030
5	SB. LODUNDUH	15,00	40.176	15,00	40.176,00	15,00	40.176	20,06	622,01	11,31	25.320	3,69	14.856,00	14,38	14,82	-	21.551	14,89	11,31	25.320
6	SB. JUNJUNGAN I of	2,00	5.357	2,00	5.356,80	1,60	4.285	5,07	157,04	1,71	968	(0,11)	3.317,44	-	-	-	968	-	1,71	968
7	SB. JUNJUNGAN II (cad)																			
8	SB. AMBENGAN	3,00	8.035	3,00	8.035,20															
	JUMLAH D	52,00	139.277	52,00	139.276,80	46,96	125.778	18,09	560,87	42,38	95.752	6,16	33.643,57	41,13	40,58	12,63	84.514	8,27	40,80	92.134
	Distribusi Dan Sumber Lain																			
	Suplay SB Bayad II Tegallalang																			7.965
	Suplay SB Bayad III (Res. Mancawana)																			4.538
	Suplai BBT DN200 Payangan																			43.379
	Suplai BBT DN300 Payangan																			213.556
	JUMLAH TOTAL	52,00	139.277	52,00	139.276,80	46,96	125.778	18,09	560,87	42,38	95.752	6,16	33.643,57	41,13	40,58	12,63	353.953	(284,17)	40,80	92.134
E	PDAM CABUPAYANGAN																			
	MAP. UNDISAN (Puhu)	7,50	20.088	7,50	20.088,00	5,21	13.954	23,94	742,27	4,78	12.784	0,43	1.170,96	5,15	5,18	-	12.632	1,18	4,78	12.784
	MAP. Kerta	6,00	16.070	6,00	16.070,40															
	- pompa I					3,00	8.035	14,08	436,55	2,73	4.292	0,35	3.867,06	2,77	2,69	2,89	4.123	1,08	2,65	4.168
	- pompa II					3,00	8.035	16,00	496,01	2,10	3.745	0,95	4.377,00	2,15	2,10	2,33	3.658	-	2,05	3.658
	BBT FM 100 (Susut)	1,50	4.018		4.017,60	3,34	8.946	24,00	744,00	2,52	6.737						6.734	0,05	2,52	6.737
	BBT FM 100 (Girikuzuma)	2,50	6.696		6.696,00	1,65	4.419	24,00	744,00	2,51	6.723						6.723	-	2,51	6.723
	JUMLAH E	17,50	46.872	13,50	46.872,00	16,20	43.390	20,41	632,57	9,85	34.281	1,73	9.415,02	10,07	9,97	5,21	33.870	0,59	14,51	34.070
	Distribusi Dan Sumber Lain																			
	Supay BBT DN200	25,00	66.960		66.960,00	29,95	80.218	24,00	744,00	22,07	59.117	7,88	21.101,08	-	-	-	15.738	73,38	22,07	59.117
	Suplay BBT DN150	25,00	66.960		66.960,00	23,74	63.585	24,00	744,00	21,95	58.783	1,79	4.802,22	-	-	-	37.936	35,46	21,95	58.783
	Suplay BBT DN300	146,00	391.046		391.046,40	113,01	302.686	24,00	744,00	115,31	308.849	(2,30)	(6.163,02)	-	-	-	-	-	115,31	308.849
	JUMLAH TOTAL	213,50	571.838	13,50	571.838,40	182,90	489.879	24,00	744,00	159,33	461.030	9,10	29.060,52	10,07	9,97	5,21	87.544	81,00	173,84	460.819

NO	LOKASI	KAPASITAS		KAPASITAS TERPASANG				KAPASITAS				IDLE		KAPASITAS			KAP. DIST	TKA	KAP. PRODUKSI	
		SUMBER		ANGGARAN		REALISASI		PRODUKSI				PRODUKSI		HASIL VALIDASI SUMBER			VALIDASI	PROD	VALIDASI	
		(L/dt)	(M ³ /Bin)	(L/dt)	(M ³)	(L/dt)	(M ³)	(Jam/Hr)	(Jam/Bin)	(L/dt)	(M ³)	(L/dt)	(M ³)	WM(L/dt)	UFM(L/dt)	EROR (%)	(M ³)	%	(L/dt)	(M ³)
F PDAM CAB.TEGALLALANG																				
1	MAP BAYAD I	21,00	56.246	20,00	53.568,00	20,09	53.809	22,48	697,00	18,23	45.750	1,86	8.059,06	19,00	20,00	-	44.718	2,26	18,23	45.750
2	MAP BAYAD II	28,00	74.995	27,00	72.316,80	28,00	74.995	22,06	684,00	27,69	68.181	0,94	8.354,73	27,44	26,82	2,26	53.913	100,00	27,06	66.640
3	MAP BAYAD III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,19	16,30	-	-	-	-	-
4	MAP BAYAD IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MAG TEGALLALANG/BUGBUGAN	1,00	2.678	1,00	2.678,40	1,00	2.678	24,00	744,00	0,79	2.127	0,21	551,40	-	-	-	2.127	-	0,79	2.127
JUMLAH F		50,00	133.920	48,00	128.563,20	49,09	131.483	13,71	708,33	46,72	116.058	3,00	16.965,19	59,63	63,12	2,26	100.757	12,02	46,09	114.517
Distribusi Dan Sumber Lain																				
1	BBT 150(M3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.881	-	-	-
JUMLAH TOTAL		50,00	133.920	48,00	128.563,20	49,09	131.483	13,71	708,33	46,72	116.058	3,00	16.965,19	59,63	63,12	2,26	120.638	12,02	46,09	114.517
G PDAM CAB.TAMPAKSIRING																				
1	MAP TIRTA EMPUL	21,00	56.246	21,00	56.246,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pompa I	-	-	-	-	8,24	22.070	15,55	482,00	6,75	11.720	1,49	10.350,02	4,90	5,39	-	11.720	-	6,75	11.720
	- pompa II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,15	8,10	0,61	-	-	-	-	-
	- pompa III	-	-	-	-	8,24	22.070	-	666,00	8,03	19.248	0,21	2.822,02	6,82	7,03	-	16.724	13,11	8,03	19.248
2	MAP TEGALSAAT	22,00	58.925	22,00	58.924,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pompa I	-	-	-	-	11,81	31.632	23,65	733,09	7,88	20.797	3,93	10.834,90	10,92	11,09	-	20.797	-	7,88	20.797
	- pompa II	-	-	-	-	11,81	31.632	12,39	384,05	10,68	14.764	1,13	16.867,90	8,52	8,75	-	14.657	0,73	10,68	14.764
3	MAP SINDURAJA	10,00	26.784	10,00	26.784,00	8,90	23.838	21,65	671,00	9,50	22.939	0,19	2.790,64	9,70	8,90	8,25	19.364	8,00	8,71	21.047
4	SB PEJENG KELOD / GEPOKAN	7,00	18.749	7,00	18.748,80	5,10	13.660	23,80	737,93	5,60	14.868	(0,50)	(1.208,16)	6,02	5,91	-	7.697	48,23	5,60	14.868
5	MAP PUG KAJA / BLUSUNG	5,00	13.392	5,00	13.392,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pompa I (cad)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pompa II	-	-	-	-	4,56	12.214	23,93	741,84	3,13	8.347	1,86	5.007,32	4,39	3,79	13,67	6.467	10,26	2,70	7.206
6	SB TARUKAN I	3,00	8.035	3,00	8.035,20	1,88	5.035	14,34	444,67	1,93	3.092	0,06	2.121,47	1,91	1,80	5,76	2.914	-	1,82	2.914
7	SB TARUKAN II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SB PESALAKAN	6,00	16.070	6,00	16.070,40	5,63	15.079	22,00	682,15	4,92	12.083	1,03	3.791,02	5,17	4,83	6,58	11.258	0,27	4,60	11.288
9	MAP BAYAD III dan IV TGLL ke TPS	15,00	40.176	15,00	40.176,00	16,00	42.854	23,94	742,00	16,74	44.710	(0,74)	(1.855,60)	13,19	16,30	-	40.039	10,45	16,74	44.710
JUMLAH G		89,00	238.378	89,00	238.377,60	82,17	220.084	20,27	628,47	75,15	172.568	8,67	51.521,52	79,69	81,89	34,86	151.637	10,04	73,50	168.563
JUMLAH TOTAL		89,00	238.378	89,00	238.377,60	82,17	220.084	20,27	628,47	75,15	172.568	8,67	51.521,52	79,69	81,89	34,86	151.637	10,04	73,50	168.563
JUMLAH PDAM A,B,C,D,E,F,G		987,50	2.644.920	760,50	2.055.672,00	689,22	2.292.496	20,75	683,84	820,05	2.103.027	83,47	318.028,98	645,63	612,83	455,24	1.900.641	2,77	765,11	1.954.822
II AIR CURAH BBT																				
	- DN 200	25,00	66.960	25,00	66.960,00	23,74	63.585	24,00	744,00	22,08	59.138	1,66	4.447,22	-	-	-	59.117	0,04	22,08	59.138
	- DN 300	25,00	66.960	25,00	66.960,00	29,95	80.218	24,00	744,00	119,14	319.110	(89,19)	(238.891,92)	-	-	-	298.891	6,34	119,14	319.110
	- DN 150	146,00	391.046	94,50	253.108,80	113,01	302.686	24,00	744,00	22,15	59.334	90,86	243.351,98	-	-	-	57.817	2,56	22,15	59.334
	- FM 100 Air Jenik (Girikusuma)	2,50	6.696	2,50	6.696,00	1,65	4.419	24,00	744,00	2,86	7.134	(1,01)	(2.714,64)	-	-	-	6.723	5,76	2,66	7.134
	- FM 100 Susut	1,50	4.018	1,50	4.017,60	3,34	8.946	24,00	744,00	2,46	6.598	0,88	2.347,86	-	-	-	6.734	(2,06)	2,46	6.598
JUMLAH BBT		200,00	535.680	148,50	397.742,40	171,69	459.854	24,00	744,00	168,50	451.314	3,19	8.540,50	-	-	-	429.282	4,88	168,50	451.14

NO	LOKASI	KAPASITAS SUMBER		KAPASITAS TERPASANG				KAPASITAS PRODUKSI				IDLE PRODUKSI		KAPASITAS HASIL VALIDASI SUMBER			KAP. DIST VALIDASI	TKA PROD	KAP. PRODUKSI VALIDASI	
		(L/dt)	(M ³ /Bln)	(L/dt)	(M ³)	(L/dt)	(M ³)	(Jam/Hr)	(Jam/Bln)	(L/dt)	(M ³)	(L/dt)	(M ³)	WM(L/dt)	UFM(L/dt)	EROR (%)	(M ³)	%	(L/dt)	(M ³)
I	PRODUKSI PDAM																			
III	AIR CURAH PETANU																			
	- Tapping SABA	20,00	24	15,00	40.176,00	2,88	7.714	24,00	744,00	3,47	9.307	(0,59)	(1.593,21)	-	-	-	11.199	(20,33)	3,47	9.307
	- Tapping KETEWEL	30,00	24	35,00	93.744,00	13,61	36.453	24,00	744,00	12,50	33.491	1,11	2.962,02	-	-	-	33.103	1,16	12,50	33.491
	JUMLAH PETANU	50,00	48	50,00	133.920,00	16,49	44.167	24,00	744,00	15,98	42.798	0,51	1.368,82	-	-	-	44.302	-	15,98	42.798

Realisasi Produksi dan Distribusi

Sumber: PDAM Kabupaten Gianyar, 2018

2.1.2 Sanitasi

Berdasarkan cakupan layanan sanitasi, proporsi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak adalah 102.603 rumah tangga. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak sebesar 99,13% dari jumlah rumah tangga kabupaten sebesar 103.525 rumah tangga, adapun status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Gianyar tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 99,13% rumah tangga telah memiliki sanitasi yang layak, perkotaan dan perdesaan;
- 99,48% rumah tangga telah memiliki sanitasi yang layak – perkotaan;
- 98,29% rumah tangga telah memiliki sanitasi yang layak – perdesaan.

Secara keseluruhan cakupan layanan sanitasi per kecamatan di Kabupaten Gianyar dapat dilihat di tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.8. Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JAMBAN CEPLU NG (UNIT)	JAMBAN PLENGSE NGAN (UNIT)	JAMBAN KLOSET (UNIT)	JAMBAN HELIKOP TER (UNIT)	JAMBAN MCK UMUM (UNIT)	JUMLAH TOTAL (UNIT)
1	Payangan	0	0	9.835	0	0	9.835
2	Blahbatuh	0	0	13.606	0	0	13.606
3	Sukawati	0	0	16.571	0	0	16.571
4	Tampaksiring	0	0	10.857	0	0	10.857
5	Gianyar	0	0	15.766	0	0	15.766
6	Ubud	0	0	12.980	0	0	12.980
7	Tegallalang	0	0	8.869	0	0	8.869
	Jumlah	0	0	88.484	0	0	88.484

Sumber : http://monev.stbm.kemkes.go.id/index.php/pilar_1

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan sanitasi lingkungan baik dalam bentuk pembangunan sarana fisik maupun dalam bentuk pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan dengan meningkatnya kualitas sanitasi seiring meningkatnya kualitas sarana sanitasi Kabupaten/kota dan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya sanitasi diharapkan kualitas kesehatan masyarakat juga meningkat. Secara umum kondisi sanitasi Kabupaten Gianyar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Air Limbah Domestik

Berdasarkan karakteristiknya terdapat 2 (dua) jenis air limbah domestik, yaitu jenis *black water* yang berasal dari WC dan umumnya ditampung dalam septic-tank, sedangkan yang satunya adalah jenis *grey water* yang berasal dari kegiatan mencuci, mandi dan memasak, yang umumnya langsung dibuang ke saluran drainase maupun perairan umum. Walaupun air limbah jenis *grey water* sebagian besar merupakan bahan organik yang mudah terurai, namun secara kuantitas cenderung semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Dari berbagai literatur menyebutkan bahwa antara 60 % - 70 % air yang digunakan oleh masyarakat kota, akan terbuang sebagai air limbah, sedangkan air limbah tersebut akan masuk ke badan sungai tanpa ada upaya pengolahan terlebih dahulu.

1) Sistem dan Infrastruktur

Pengelolaan limbah cair Kabupaten Gianyar dilakukan secara setempat. Pengolahan limbah di Kabupaten Gianyar dilakukan dengan 3 Cara yaitu;

1. Pengolahan Individual

Yang dimaksud adalah pengolahan air limbah yang disediakan dan dikelola oleh perorangan/perusahaan yang melayani satu lingkup tapak (site)

2. Pengolahan Komunal

Merupakan sistem pengolahan air limbah secara bersama-sama untuk menampung air limbah dari beberapa rumah yang letaknya berdekatan. Air limbah dikumpulkan dalam satu lokasi penampungan melalui saluran penghubung dan pengumpul kemudian dilakukan pengolahan lebih lanjut pada IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di wilayah Kabupaten Gianyar sebaiknya dilakukan studi lebih lanjut dan lebih terinci.

3. Pengolahan Terpusat

Pengolahan terpusat adalah suatu system pengolahan yang melayani satu kawasan secara terintegrasi melalui jaringan pengumpul yang terhubung ke seluruh ruang terbangun yang ada pada suatu kawasan. Setiap kawasan memiliki satu bangunan pengelolaan limbah yang letaknya jauh dari kawasan terbangun pada suatu kawasan.

Perkiraan Produksi air limbah di Kabupaten Gianyar sebagai berikut;

- a. Perkiraan total produksi air limbah domestik (rumah tangga) untuk black dan grey water adalah 30 – 100 ltr/kk/hr
- b. Produksi air limbah non domestik (komersial, RS dll) adalah \pm 150 ltr/km/hr
- c. Produksi air limbah untuk black dan grey water adalah \pm 250 ltr/km/hr.

Proyeksi produksi limbah cair dihitung dengan asumsi 0,7 dari total kebutuhan air minum. Pada tahun 2015 produksi limbah cair diproyeksikan sebesar 102.266,89m³/hari, dan pada akhir tahun perencanaan sebesar 124.588,62m³/hari (lihat tabel 2.6). Produksi limbah cair dalam volume yang cukup besar tersebut potensial sebagai sumber pencemar air bawah tanah, air permukaan dan lingkungan serta sumber berkembang biaknya berbagai penyakit. Kondisi saat ini belum dirasakan dampaknya langsung mengingat limbah cair langsung dibuang ke saluran-saluran drainase atau melalui pengeringan pada lahan-lahan kosong. Namun 20 tahun kedepan masalah ini diprediksi menjadi serius mengingat perkembangan wilayah yang semakin padat dengan sanitasi yang kurang baik, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan.

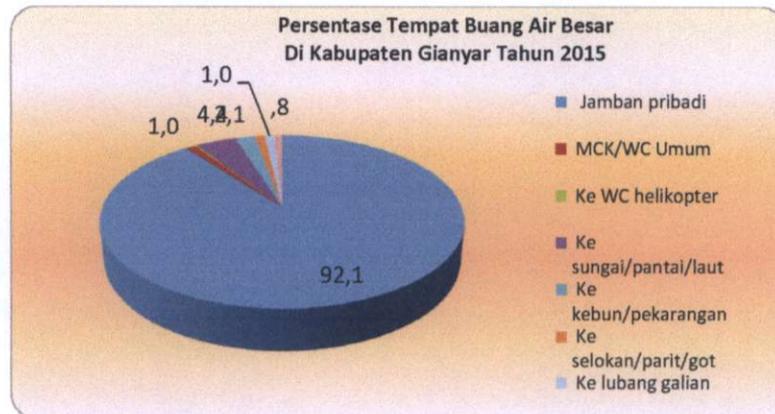
Tabel 2.9.
Proyeksi Produksi Limbah Cair Di Kabupaten Gianyar

Tahun	Proyeksi Kebutuhan Air Harian Maksimum (m ³ /hari maks)	Proyeksi Produksi Limbah Cair (m ³ /hari maks)
2015	146.096	102.266,89
2020	155.720	109.003,96
2025	166.312	116.418,47
2030	177.984	124.588,62

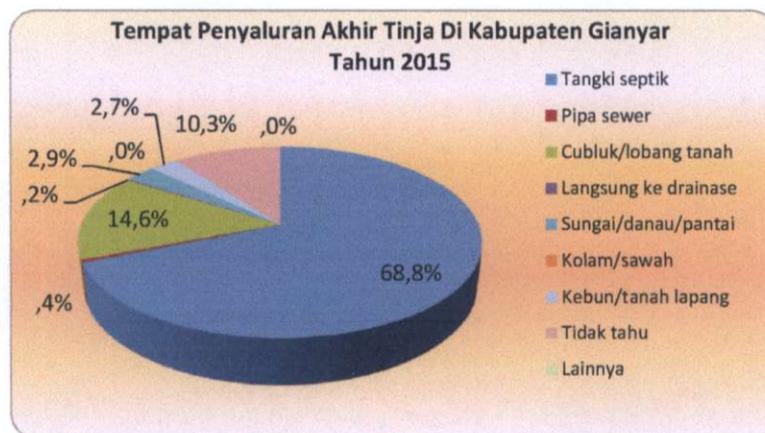
Sumber : Data & Analisis RTRWK Gianyar 2012-2032

Sistem pengolahan dengan *septic tank* rentan dengan kebocoran, sehingga kemungkinan merembesnya air limbah cair ke sumber-sumber air Baku dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Pengelolaan limbah cair di Kabupaten Gianyar, kondisinya masih sangat memprihatinkan, karena Pemerintah Daerah belum mampu mengelola timbulan limbah cair masyarakat. Di Kabupaten Gianyar sampai dengan tahun 2015 belum terdapat IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) maupun armada jasa kurus WC baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun Swasta. Apabila terdapat *septic tank* milik masyarakat yang telah jenuh, maka upaya penanganannya dilakukan oleh individu yang bersangkutan dengan menghubungi jasa kurus WC yang ada di Denpasar. Dari hasil EHRA terhadap 480 responden untuk persentase buang air besar sebanyak 92,1% responden menjawab sudah memiliki jamban pribadi; 1% menggunakan MCK/WC umum. Namun masih ada juga yang

melakukan buang air besar tidak pada tempatnya yaitu sebesar 4, 4% ke pantai/ laut/danau; 2,1% ke kebun/pekarangan dan sisanya ke selokan/ parit/ got/ lubang galian. Dengan masih adanya masyarakat yang buang air besar sembarangan perlu dilakukan upaya menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya buang air besar di jamban yang sehat sehingga mampu menekan kejadian penyakit yang berbasis lingkungan.



Gambar 2.2.
Grafik Persentase Tempat Buang Air Besar Berdasarkan Studi EHRA



Gambar 2.3. Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja

Tempat pembuangan tinja manusia dari jamban rumah tangga masyarakat sudah memanfaatkan tangki septic dengan persentase sebesar 68,8%, responden lainnya masih ada yang menggunakan cubluk/ lobang tanah sebesar 14,6% dan banyak juga yang menjawab tidak tahu sebesar 10,3%. Dari hasil survey ini nampak masyarakat masih menganggap buangan tempat penyaluran akhir tinja tidak begitu penting sehingga dibiarkan begitu saja ke tempat yang tidak seharusnya sehingga dapat menimbulkan resiko kesehatan lingkungan bagi rumah tangga itu sendiri.

Di dalam study EHRA ditanyakan praktik pengurasan tangki septic dan diperoleh hasil bahwa 89,3% responden menjawab tidak pernah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh tidak adanya layanan pengurasan tangki septic serta IPLT di Kabupaten Gianyar sehingga masyarakat tidak pernah melakukan pengurasan tangki septic. Dari hasil analisis juga didapatkan bahwa 30% responden menjawab tangki septic sudah dibangun lebih dari 10 tahun yang lalu; 27,8% responden menjawab sekitar 5-10 tahun yang lalu; 26% menjawab 1-5 tahun yang lalu dan sisanya mengatakan tidak tahu. Tentunya akan menimbulkan potensi resiko pencemaran apabila tidak dilakukan pengurasan untuk tangki septic yang sudah berumur lebih dari 5 tahun.

Masih adanya perilaku BABS oleh masyarakat walaupun persentasenya kecil, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

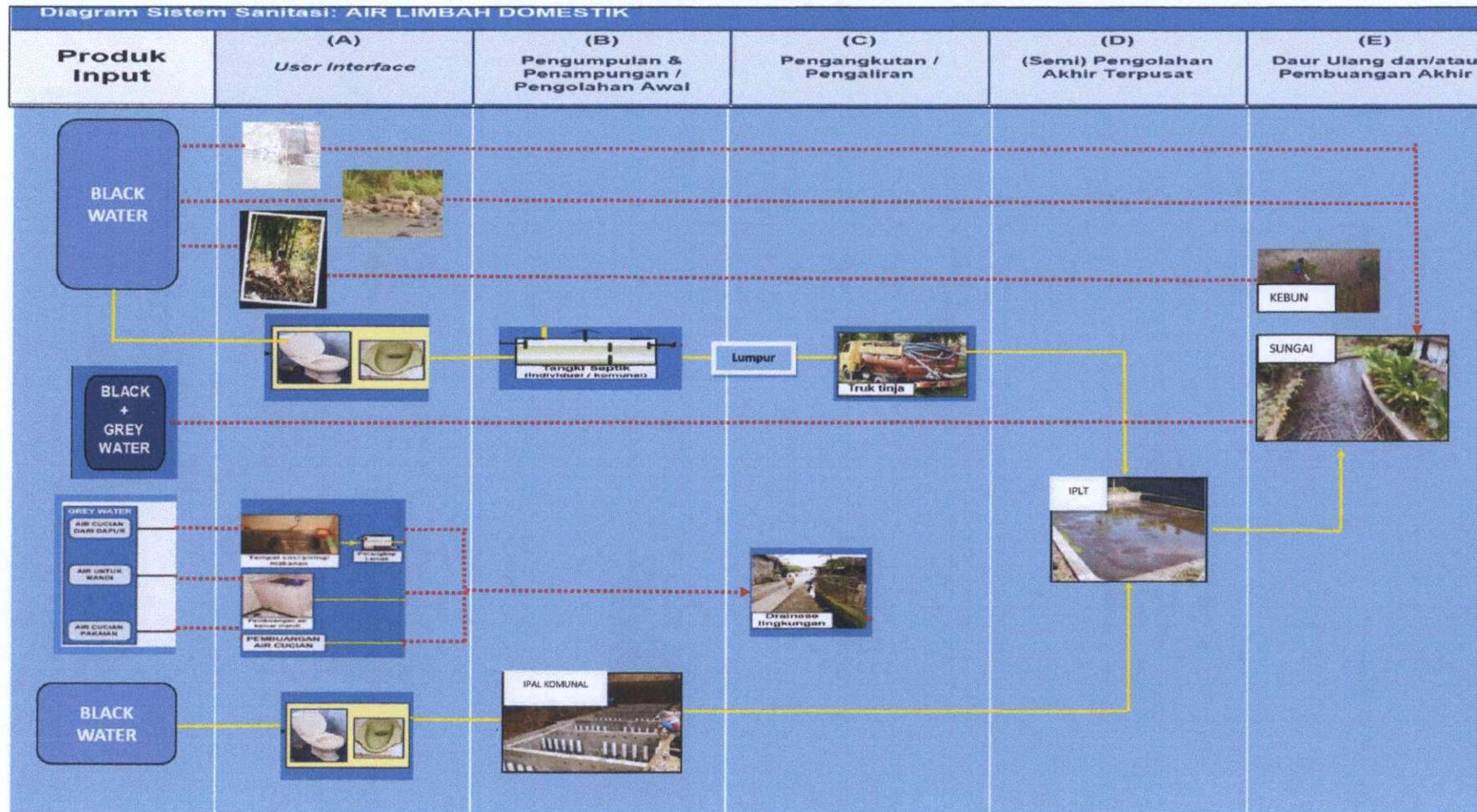
- Kepemilikan Jamban
- Adanya perilaku/ kebiasaan masyarakat yang masih BAB di tempat terbuka
- Tempat penyaluran akhir tinja
- Lama tangki septic dibangun
- Terakhir tangki septic dikosongkan
- Siapa yang mengosongkan tangki septic
- Kemana lumpur tinja dibuang saat tangki septic dikuras

Faktor-faktor tersebut mempengaruhi adanya BABS di Kabupaten Gianyar. Walaupun jumlah kepemilikan jamban sudah cukup baik, akan tetapi faktor penentu untuk tangki septik dimana belum semua rumah tangga memiliki tangki septik, tangki septik sudah cukup lama dibangun dan belum pernah dilakukan pengurasan, serta masyarakat dominan tidak mengetahui kemana lumpur tinja dibuang apabila dilakukan pengurasan tangki septik.

Diagram sistem sanitasi (DSS) memuat informasi mengenai infrastruktur pengelolaan air limbah domestik yang ada di kabupaten Gianyar. Diagram di bawah ini menggambarkan dua produk input pengelolaan air limbah domestik yaitu air limbah campuran (*black dan greywater*) dan air limbah *black water* saja. Untuk air limbah campuran berdasarkan user interfacenya ada yang langsung dibuang ke badan air/ sungai dan dan sistem pengelolaan limbah domestik dengan sistem onsite/individual yang umumnya menggunakan tangki septik sebagai tempat pengumpulan dan penampungan awal, apabila tangki septik penuh maka diperlukan pengangkutan/ pengurasan dengan jasa sedot tinja kemudian pengolahan akhir terpusat adalah IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) dan pembuangan akhir adalah

sungai. Untuk air limbah *black water* berdasarkan user interfacenya ada yang menggunakan IPAL Komunal sebagai pengumpulan dan penampungan awal yang termasuk pengolahan off site skala kecil (100KK) kemudian apabila IPAL telah penuh maka diperlukan pengangkutan/ pengurasan dengan jasa sedot tinja kemudian pengolahan akhir terpusat adalah IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) dan pembuangan akhir adalah sungai/ badan air, untuk lebih jelasnya pada **Gambar 2.4** berikut :

Gambar 2.4. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik



Tabel 2.10. Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik per Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Sanitasi tidak layak			Sanitasi Layak					
		BABS*	Sistem Onsite			Sistem Offsite				
			(KK)	Cubluk***, jamban tidak aman**	Cubluk aman/ Jamban keluarga dgn tangki septik aman	MCK / Jamban Bersama	Sistem Berbasis Komunal			Skala Kawasan / terpusat Sambungan Rumah yg berfungsi (KK)
							MCK Komunal****	Tangki Septik Komunal > 10 KK	IPAL Komunal	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	
1	Wilayah Perkotaan									
a	Kecamatan Sukawati	0	0	12,450	5,240	0	0	0	0	
b	Kecamatan Blahbatuh	490	0	8,259	437	0	0	1	21	
c	Kecamatan Gianyar	96	399	8,753	4,916	0	0	3	100	
d	Kecamatan Tampak Siring	250	219	5,610	860	0	0	0	0	
e	Kecamatan Ubud	640	1,642	12,399	1,730	0	0	0	0	
f	Kecamatan Tegalalang	238	884	3,045	757	0	0	0	0	
g	Kecamatan Payangan	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wilayah Perdesaan									
a	Kecamatan Sukawati	0	0	7,292	4,033	0	0	0	0	
b	Kecamatan Blahbatuh	619	0	6,455	784	0	0	0	0	
c	Kecamatan Gianyar	49	313	6,331	1,491	0	0	2	17	
d	Kecamatan Tampak Siring	11	54	3,706	944	0	0	5	84	
e	Kecamatan Ubud	25	0	1,312	69	0	0	0	0	
f	Kecamatan Tegalalang	959	1,654	4,068	1,302	0	0	0	0	
g	Kecamatan Payangan	146	0	7,911	2,441	0	0	0	0	
	TOTAL	3,523	5,165	87,591	25,004	0	0	11	222	

Keterangan : *Yang termasuk BABS: BAB langsung di kebun, kolam, laut, sungai, sawah/ladang, dsb.

** Tidak Aman: tangki septik tidak sesuai kriteria SNI atau tidak mempunyai tangki septik sama sekali

***Cubluk dikategorikan tidak aman bila dibangun di area dengan kepadatan > 50 orang/ha dan jarak terhadap sumber air bersih yg bukan perpipaan < 10 m.

****MCK Komunal: cakupan layanan 10 - 200 KK baik dengan tangki septik, biofilter dan dapat dilengkapi dengan biodigester. Termasuk didalamnya toilet bergerak (mobile toilet)

Untuk cakupan layanan air limbah domestik yang merupakan hasil dari inputing data yang ada di instrument profil sanitasi dibagi menjadi dua jenis layanan yaitu sanitasi tidak layak dan sanitasi layak. Untuk sanitasi tidak layak terdiri dari BABS tersebar baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, dengan total sebanyak 3.523 KK atau 2,8% sedangkan sistem on site cubluk/ jamban tidak aman sebanyak 5.165 KK atau 4,25% dari di jumlah KK Kabupaten Gianyar. Sebagian besar penduduk di kabupaten Gianyar menggunakan sistem onsite sebagai pengolahan air limbah domestiknya dengan jumlah cubluk berkategori aman 87.591 KK atau sebesar 72,38% sedangkan jumlah MCK/ jamban bersama sebesar 25.004 KK atau 20,57% dari jumlah penduduk. Sistem yang juga termasuk sanitasi layak adalah system berbasis komunal yang telah dimulai sejak tahun 2009 dengan mengedepankan peran serta masyarakat sehingga sampai tahun 2018 telah terbangun 29 IPAL Komunal di Kabupaten Gianyar.

Tabel 2.11. Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik

No	Jenis	Satuan	Jumlah/	Kondisi		Keterangan
			Kapasitas	Berfungsi	Tdk berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
SPAL Setempat (Sistem Onsite)						
1	Berbasis komunal					
	MCK Komunal	unit	0	0	0	Tidak Ada MCK Komunal
2	Truk Tinja	unit	0	0	0	Tidak mempunyai truk tinja
3	IPLT : kapasitas	M3/hari	0	0	0	Tidak ada IPLT
SPAL Terpusat (Sistem Offsite)						
1	Berbasis komunal					
	Tangki septik komunal >10KK	unit	0	0	0	
	IPAL Komunal	unit	29	Berfungsi	0	
2	IPAL Kawasan/Terpusat					
	kapasitas	M3/hari	0	0	0	
	sistem		0	0	0	

Sumber: Dinas PUPR 2018.

Berdasarkan tabel sarana dan prasarana limbah domestic sistem pengelolaan limbah yang terdapat di Kabupaten Gianyar terdapat beberapa sistem pengelolaan IPAL komunal. Dalam mengatasi permasalahan limbah di Kabupaten Gianyar melalui bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Gianyar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) IPAL Komunal di Lingkungan Tedung, Kelurahan Abianbase Kec. Gianyar
IPAL Komunal di lingkungan Tedung Kelurahan Abianbase Kecamatan Gianyar dibuat Tahun 2009, dengan sistem yang dipilih adalah Sistem IPAL Komunal dilaksanakan di lingkungan Tedung Kelurahan Abianbase Kecamatan Gianyar yaitu dengan membangun 1 unit bak Ipal dengan kapasitas 287,28 m³ dengan saluran pipa limbah dengan total dana Rp. 599.800.000,00. Dilanjutkan di tahun 2010 yaitu pemasangan pipa ke masing-masing rumah melalui pendanaan sebesar Rp. 348.100.000,00 memenuhi rencana cakupan layanan 100 KK sampai saat ini baru terlayani 80 %. Jenis limbah yang dikelola yaitu limbah rumah tangga yang berasal dari WC (*black water*).
- 2) IPAL Komunal di Desa Belega Kecamatan Blahbatuh.
IPAL Komunal di Desa Belega Kecamatan Blahbatuh dibuat Tahun 2010, dengan sistem yang dipilih adalah Sistem IPAL Komunal dilaksanakan dengan membangun 1 unit bak Ipal dengan kapasitas 283,75 m³ dengan saluran pipa limbah dengan total dana Rp. 610.000.000,00 memenuhi rencana cakupan layanan 100 KK sampai saat ini baru terlayani 35 %. Jenis limbah yang dikelola yaitu limbah rumah tangga yang berasal dari WC (*black water*).
- 3) IPAL Komunal di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring.(Br. Sanding Bitra)
IPAL Komunal di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring dibuat Tahun 2011, dengan sistem yang dipilih adalah Sistem IPAL Komunal dilaksanakan dengan membangun 1 unit bak Ipal dengan kapasitas 322,84 m³ dengan saluran pipa limbah dengan total dana Rp. 933.900.000,00 memenuhi rencana cakupan layanan 105 KK sampai saat ini sudah terlayani 100 %. Jenis limbah yang dikelola yaitu limbah rumah tangga yang berasal dari WC (*black water*).
- 4) IPAL Komunal di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring.(Br. Sanding Gianyar)
IPAL Komunal di Br. Sanding Gianyar, Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring dibuat Tahun 2012, dengan sistem yang dipilih adalah Sistem IPAL Komunal dilaksanakan dengan membangun 1 unit bak Ipal dengan saluran pipa limbah dengan total dana Rp. 523.332.000,00 memenuhi rencana cakupan layanan 100 KK sampai saat ini baru terlayani 25 % (25 KK). Jenis limbah yang dikelola yaitu limbah rumah tangga yang berasal dari WC (*black water*).
- 5) IPAL Komunal di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring.(Br. Sanding Abianbase)

IPAL Komunal di Br. Sanding Abianbase, Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring dibuat Tahun 2012, dengan sistem yang dipilih adalah Sistem IPAL Komunal dilaksanakan dengan membangun 1 unit bak Ipal dengan saluran pipa limbah dengan total dana Rp. 482.981.000,00 memenuhi rencana cakupan layanan 100 KK sampai saat ini baru terlayani 18 % (18 KK). Jenis limbah yang dikelola yaitu limbah rumah tangga yang berasal dari WC (*black water*).

6) IPAL Komunal di Desa Serongga Kecamatan Gianyar

IPAL Komunal di Desa Serongga Kecamatan Gianyar dibuat Tahun 2013, dengan sistem yang dipilih adalah Sistem IPAL Komunal dilaksanakan dengan membangun 1 unit bak Ipal dengan saluran pipa limbah dengan total dana Rp. 480.318.000,00 memenuhi rencana cakupan layanan 100 KK sampai saat ini baru terlayani 9 % (9 KK). Jenis limbah yang dikelola yaitu limbah rumah tangga yang berasal dari WC (*black water*).

7) IPAL Komunal di Desa Pejeng Kelod Kecamatan Tampak Siring

IPAL Komunal di Desa Pejeng Kelod Kecamatan Gianyar dibuat Tahun 2013, dengan sistem yang dipilih adalah Sistem IPAL Komunal dilaksanakan dengan membangun 1 unit bak Ipal dengan saluran pipa limbah dengan total dana Rp. 480.000.000,00 memenuhi rencana cakupan layanan 100 KK sampai saat ini baru terlayani 12% (12 KK). Jenis limbah yang dikelola yaitu limbah rumah tangga yang berasal dari WC (*black water*).

8) IPAL Komunal di Desa Siangan Kecamatan Gianyar

IPAL Komunal di Desa Serongga Kecamatan Gianyar dibuat Tahun 2013, dengan sistem yang dipilih adalah Sistem IPAL Komunal dilaksanakan dengan membangun 1 unit bak Ipal dengan saluran pipa limbah dengan total dana Rp. 480.000.000,00 memenuhi rencana cakupan layanan 100 KK sampai saat ini baru terlayani 8% (8 KK). Jenis limbah yang dikelola yaitu limbah rumah tangga yang berasal dari WC (*black water*).

9) IPAL Komunal di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring (Dusun Pandang Sigi)

IPAL Komunal di Desa Sanding Kecamatan Gianyar dibuat Tahun 2014, dengan sistem yang dipilih adalah Sistem IPAL Komunal dilaksanakan dengan membangun 1 unit bak Ipal dengan saluran pipa limbah dengan total dana Rp. 380.000.000,00 memenuhi rencana cakupan layanan 100 KK sampai saat ini baru terlayani 12% (12 KK). Jenis limbah yang dikelola yaitu limbah rumah tangga yang berasal dari WC (*black water*).

10) IPAL Komunal di Desa Serongga Kecamatan Gianyar

IPAL Komunal di Desa Serongga Kecamatan Gianyar dibuat Tahun 2014, dengan sistem yang dipilih adalah Sistem IPAL Komunal dilaksanakan dengan membangun 1 unit bak Ipal dengan saluran pipa limbah dengan total dana Rp. 380.000.000,00 memenuhi rencana cakupan layanan 100 KK sampai saat ini baru terlayani 8% (8 KK). Jenis limbah yang dikelola yaitu limbah rumah tangga yang berasal dari WC (*black water*).

11) IPAL Komunal di Desa Petak Kaja Kecamatan Gianyar

IPAL Komunal di Desa Petak Kaja Kecamatan Gianyar dibuat Tahun 2014, dengan sistem yang dipilih adalah Sistem IPAL Komunal dilaksanakan dengan membangun 1 unit bak Ipal dengan saluran pipa limbah dengan total dana Rp. 387.982.000,00 memenuhi rencana cakupan layanan 100 KK sampai saat ini baru terlayani 9% (9 KK). Jenis limbah yang dikelola yaitu limbah rumah tangga yang berasal dari WC (*black water*).

12) IPAL Komunal Desa Sidan Kecamatan Gianyar

IPAL Komunal di Desa Sidan Kecamatan Gianyar terletak di Br. Blahpane Kelod, Desa Sidan, Kecamatan Gianyar. IPAL Komunal ini dibangun pada tahun 2016 dengan jumlah pelanggan sebanyak 53 KK.

13) IPAL Komunal Desa Temesi Kecamatan Gianyar

IPAL Komunal ini terletak di Br. Peteluan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar. IPAL komunal ini dibangun pada tahun 2016 dengan jumlah pelanggan sebanyak 48 KK.

14) IPAL Komunal di Desa Siangan, Kecamatan Gianyar

IPAL Komunal ini terletak di Br. Teruna, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar. IPAL komunal ini dibangun pada tahun 2016 dengan jumlah pelanggan sebanyak 55 KK.

15) IPAL Komunal Desa Tulikup Kecamatan Gianyar

IPAL Komunal ini terletak di Br. Menak, Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar. IPAL komunal ini dibangun pada tahun 2016 dengan jumlah pelanggan sebanyak 48 KK.

16) IPAL Komunal di Br. Pegesangan, Desa Temesi, Kec. Gianyar

IPAL Komunal ini terletak di Br. Pegesangan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar. IPAL komunal ini dibangun pada tahun 2018 dengan jumlah pelanggan sebanyak 8 KK.

- 17) IPAL Komunal di Br. Lokaserana, Desa Siangan, Kec. Gianyar
IPAL Komunal ini terletak di Br. Lokaserana, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar. IPAL komunal ini dibangun pada tahun 2017 dengan jumlah pelanggan sebanyak 35 KK.
- 18) IPAL Komunal di Desa Pejeng Kawan, Kec. Tampaksiring
IPAL Komunal ini terletak di Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring IPAL komunal ini dibangun pada tahun 2017 dengan jumlah pelanggan sebanyak 25 KK.
- 19) IPAL Komunal di Desa Pejeng Kangin, Kec. Tampaksiring
IPAL Komunal ini terletak di Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring. IPAL komunal ini dibangun pada tahun 2017 dengan jumlah pelanggan sebanyak 25 KK.
- 20) IPAL Komunal di Desa Petak Kaja, Kec. Gianyar
IPAL Komunal ini terletak di Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar. IPAL komunal ini dibangun pada tahun 2018 dengan jumlah pelanggan sebanyak 87 KK.
- 21) IPAL Komunal di Desa Pejeng Kaja, Kec. Tampaksiring
IPAL Komunal ini terletak di Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring. IPAL komunal ini dibangun pada tahun 2018 dengan jumlah pelanggan sebanyak 87 KK.
- 22) IPAL Komunal di Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kec. Gianyar
IPAL Komunal ini terletak di Banjar Serongga Kelod, Desa Serongga, Kecamatan Gianyar. IPAL komunal ini dibangun pada tahun 2018 dengan jumlah pelanggan sebanyak 73 KK.
- 23) IPAL Komunal di Desa Sanding, Kec. Tampaksiring
IPAL Komunal ini terletak di Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring. IPAL komunal ini dibangun pada tahun 2018 dengan jumlah pelanggan sebanyak 73 KK.
- 24) IPAL Komunal di Desa Beng Kelod Kauh, Kec. Gianyar
IPAL Komunal ini terletak di Desa Beng Kelod Kauh, Kecamatan Gianyar. IPAL komunal ini dibangun pada tahun 2018 dengan jumlah pelanggan sebanyak 49 KK.
- 25) IPAL Komunal di Desa Beng Kaja Kauh, Kec. Gianyar

IPAL Komunal ini terletak di Desa Beng Kaja Kauh, Kecamatan Gianyar. IPAL komunal ini dibangun pada tahun 2018 dengan jumlah pelanggan sebanyak 55 KK.

26) IPAL Komunal di Tegaltugu, Kec. Gianyar

IPAL Komunal ini terletak di Desa Tegaltugu, Kecamatan Gianyar. IPAL komunal ini dibangun pada tahun 2018 dengan jumlah pelanggan sebanyak 53KK.

27) IPAL Komunal di Br. Dukuh, Desa Sidan, Kec. Gianyar

IPAL Komunal ini terletak di Banjar Dukuh, Desa Sidan, Kecamatan Gianyar. IPAL komunal ini dibangun pada tahun 2018 dengan jumlah pelanggan sebanyak 49 KK.

28) IPAL Komunal di Kelurahan Gianyar, Kec. Gianyar

IPAL Komunal ini terletak di Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar. IPAL komunal ini dibangun pada tahun 2018 dengan jumlah pelanggan sebanyak 64 KK.

29) IPAL Komunal di Kelurahan Samplangan, Kec. Gianyar

IPAL Komunal ini terletak di Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar. IPAL komunal ini dibangun pada tahun 2018 dengan jumlah pelanggan sebanyak 57 KK.

Dari 29 IPAL Komunal yang telah terbangun saat ini kondisi sarana masih berfungsi dengan baik namun dari cakupan layanan yang masih rendah diharapkan pada tahun mendatang akan dapat memenuhi target layanan 100% sesuai dengan perencanaan. Dalam hal ini KSM perlu diberdayakan agar dapat lebih maksimal dalam pengelolaan organisasi serta menarik minat masyarakat untuk dapat terlibat dalam operasional dan pemeliharaan IPAL Komunal.

B. Persampahan

Secara umum sistem pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Gianyar sudah mulai menerapkan prinsip pengurangan dan penanganan sampah, dimana pola pengelolaan sampah di Kabupaten Gianyar dilakukan dengan pola Kumpul-Angkut-Proses dan sebagian sudah melakukan upaya penanganan sampah mandiri dengan cara (*Reduce, Reuse, Recycle*). Pengelolaan sampah dimulai dari sampah yang dikumpulkan oleh tukang sapu/masyarakat dari masing-masing sumber penghasil sampah untuk dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), yang ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu pada setiap kelurahan. Pola pengumpulan sampah dapat dikategorikan sebagai pengumpulan berpola individual tidak

langsung dan berpola komunal tidak langsung. Dengan pola komunal tidak langsung ini masyarakat diharapkan dapat berperan serta dengan mengangkut secara swadaya sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPS terdekat. Sistem pengangkutan secara swadaya ini di Kabupaten Gianyar disebut sistem kawasan. Selama ini pola pengumpulan dan penampungan sementara sampah dengan cara tersebut dianggap cukup baik karena dapat mengurangi TPS yang ada di jalan-jalan protokol. Selanjutnya sampah yang tertampung sementara di TPS tersebut oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gianyar diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Pada prinsipnya kebijakan terkait penanganan sampah di Kabupaten Gianyar saat ini sudah mulai menerapkan pengelolaan persampahan sistem Pola Kumpul-Angkut-Proses.

Proses yang dilakukan selanjutnya adalah sampah yang terkumpul di TPS baik yang dikumpulkan oleh masyarakat maupun yang dikumpulkan oleh tukang angkut dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar akan diangkut dengan truk-truk pemerintah untuk diproses di TPA Temesi. Jumlah sampah yang bisa diangkut ke TPA Temesi rata-rata 342 m³/hari. Wilayah yang telah terjangkau pelayanan persampahan oleh pemerintah oleh pemerintah Kabupaten Gianyar baru dapat melayani wilayah perkotaan ditambah fasilitas-fasilitas umum seperti pasar umum, obyek wisata.

Berdasarkan system penanganan persampahan di atas maka aspek Teknis dan Operasional persampahan meliputi beberapa hal yaitu:

1. Penimbulan

Sampah di Kabupaten Gianyar berasal dari sampah domestik dan non domestik yang meliputi sampah permukiman, pertokoan, restoran, hotel, perkantoran, fasilitas umum, sapuan jalan dan kawasan pariwisata yang sebagian besar merupakan sampah organik. Komponen sumber penimbulan sampah di daerah pelayanan dapat berupa :

1. Daerah perumahan/permukiman
2. Daerah komersial

Yang dimaksud daerah komersial antara lain :

- Pasar umum, pasar senggol
- Pusat-pusat perdagangan/pertokoan
- Hotel, restaurant/rumah makan, dll

3. Fasilitas Umum

Yang dimaksud fasilitas umum antara lain :

- Terminal

- Rumah Sakit
- Kantor Pemerintah dan Swasta
- Sekolah, dll

4. Fasilitas Sosial

Yang dimaksud fasilitas sosial antara lain :

- Panti Asuhan/Panti Sosial
- Tempat Ibadah
- Bale Banjar, dll

Komponen sumber penimbunan sampah di Kota Gianyar dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut :

Tabel 2.12
Komponen Sumber Penimbunan Sampah di Kota Gianyar
(Daerah Pelayanan)

No.	Permukiman	F. Komersial	F. Umum	F. Sosial	Sapuan Jalan
1	Kelurahan Gianyar	- Ps. Umum Gianyar - Ps. Senggol	- Terminal Gianyar - RSUD Sanjiwani	- Panti Asuhan - Rumah Ibadah - Bale Banjar	-Jl. Anteri Primer - Jl. Kolektor - Jl. Lingkungan
2	Kelurahan Abianbase	- Pertokoan - Jl. Ngr. Rai	- Kantor Pemerintah dan Swasta		
3	Kelurahan Beng	- Jl. Brata - Jl. Kesatrian	- Lapangan Astina - Sekolah/Perguruan Tinggi		
4	Kelurahan Samplangan	- Jl. Majapahit - Jl. Puduk	- Taman Kota - RTH		
5	Kelurahan Bitra	- Jl. Dipta - Jl. Erlangga			
6	Desa Tegal Tugu	- Jl. Kebo Iwa - Jl. Darma Giri - Rumah Makan di Kota Gianyar			

Tabel 2.13
Perhitungan Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten Gianyar Per-Kecamatan Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2013 – 2017

No.	Kecamatan	Volume Timbulan Sampah Tahun 2013 – 2017 (m ³ /hari)					Keterangan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Sukawati	348.18	353.25	358,2	362,7	367,29	Jumlah volume timbulan sampah adalah (3L/Orang/Hari) dan berat timbulan sampah (0,8 Kg/Orang/Hari) dikarenakan Kabupaten Gianyar termasuk dalam klasifikasi Kota Sedang
2	Blahbatuh	204.78	206.76	208,8	210,9	212,70	
3	Gianyar	269.52	271.95	274,4	276,9	279,21	
4	Tampaksiring	140.85	141.75	142,7	143,7	144,54	
5	Ubud	213.81	215.28	216,9	218,6	220,05	
6	Tegallalang	154.89	156.06	157,1	158,2	159,33	
7	Payangan	125.97	126.45	127,2	127,9	128,58	
Jumlah		1453.8	1458	1471.5	1.485,3	1.511,70	

Sumber : Hasil perhitungan 2017, BPS Kabupaten Gianyar Tahun 2017

Timbulan sampah di Kabupaten Gianyar, per kecamatan berdasarkan jumlah penduduk Tahun 2017 sebagai berikut :

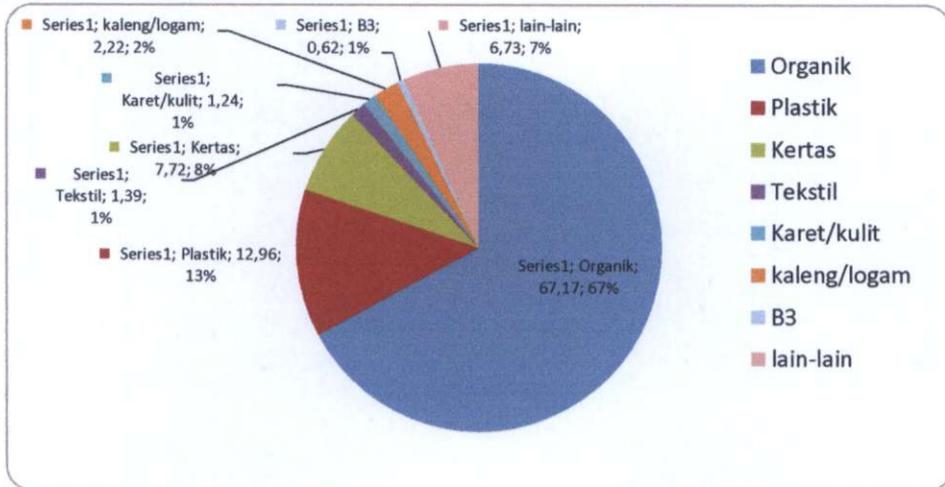
Tabel 2.14
Timbulan Sampah di Kabupaten Gianyar per Kecamatan berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2017 dan tahun 2018

No.	Kecamatan	Tahun 2017		Tahun 2018		Keterangan
		Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah (m ³)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah (m ³)	
1	Sukawati	122.430	367,29	121.939	365,82	Produksi timbulan sampah per orang/hari = 3 liter (standar spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan sedang, Dept. PU LPMB 1993)
2	Blahbatuh	70.900	212,70	71.394	214,18	
3	Gianyar	93.070	279,21	93.887	281,66	
4	Tampaksiring	48.180	144,54	48.962	146,89	
5	Ubud	73.350	220,05	74.333	222,99	
6	Tegallalang	53.110	159,33	53.904	161,71	
7	Payangan	42.860	128,58	43.681	131,04	
8	Total	503.900	1.511,7	508.100	1.524,30	

2. Komposisi Sampah

Komposisi sampah merupakan gambaran berbagai jenis sampah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Komposisi sampah biasanya dinyatakan dalam % berat atau % volume dari sampah organik dan berbagai jenis sampah anorganik. Perhitungan komposisi sampah ini digunakan untuk menentukan pengolahan yang tepat dan efisien untuk ditetapkan dalam sistem pengelolaan sampah. Komposisi sampah dibedakan antara sampah rumah tangga dan sampah non rumah tangga yang terdiri atas fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, perkantoran, pasar, rumah makan, jalan, hotel, pura dan tempat wisata.

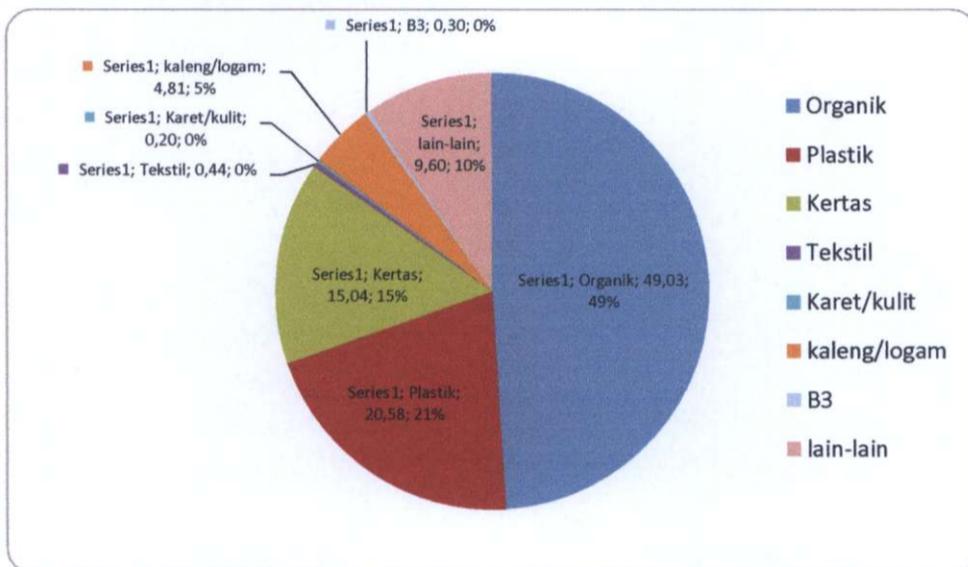
Komposisi sampah rumah tangga seperti gambar berikut



Gambar 2.5. Komposisi Sampah Rumah Tangga

Sumber : Dokumen Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

Komposisi sampah non rumah tangga seperti gambar berikut.



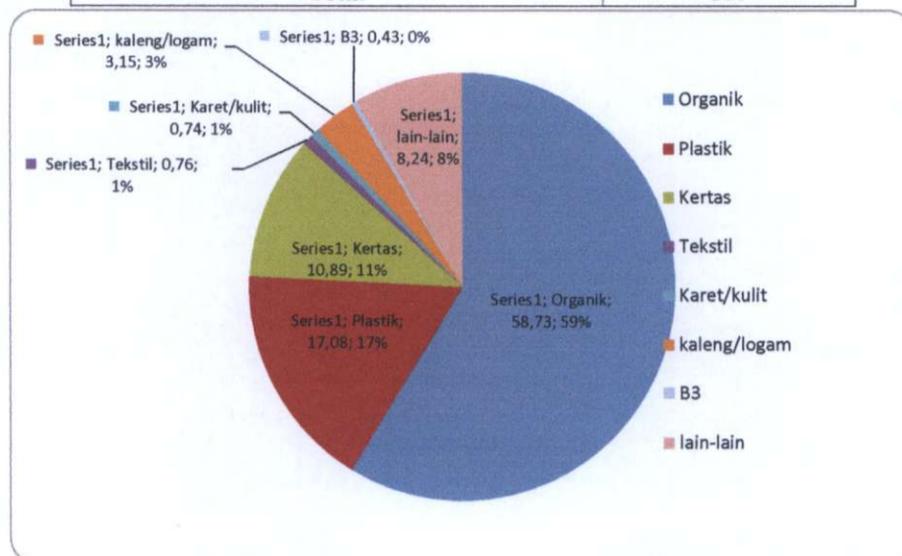
Gambar 2.6. Komposisi Sampah Non Rumah Tangga

Sumber : Dokumen Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

Dari kedua jenis sumber sampah, maka dapat diketahui komposisi sampah Kabupaten Gianyar secara keseluruhan seperti tabel 2.14. :

Tabel 2.14
Komposisi Total Sampah Kabupaten Gianyar

No.	Jenis Sampah	% Berat
1	Organik	58,73
2	Plastik	17,08
3	Kertas	10,89
4	Tekstil	0,76
5	Karet/kulit	0,74
6	Kaleng/logam	3,15
7	B3	0,43
8	Lain-lain	8,24
Total		100



Gambar 2.7. Komposisi Total Sampah

Sumber : Dokumen Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

3. Pemilahan, Pengumpulan, dan Pewadahan

a. Pemilahan :

Pemilahan di sumber sampah (rumah tangga), belum banyak dilakukan, terbukti dari hasil studi dari EHRA hanya 7,88% dari responden yang melaksanakan pemilahan, sisanya sebesar 92,12% belum melaksanakan pemilahan. Dari total responden sebanyak 480 rumah tangga. Idealnya pemilahan dilaksanakan di hulu/sumber sampah/rumah tangga, namun di Gianyar pemilahan dilaksanakan di hilir (TPA). Walaupun tidak tertutup kemungkinan bercampurnya limbah B3 rumah tangga di dalam sampah namun upaya pemilahan yang dilaksanakan di TPA paling tidak dapat mereduksi sampah yang dibuang ke TPA sebesar 30 – 40 ton perharinya.



Gambar 2.8. Pemilahan Sampah

b. Pengumpulan :

1. Sampah Rumah Tangga

Pengumpulan sampah rumah tangga dilakukan secara individual tidak langsung dan komunal tidak langsung, pengumpulan sampah di Kota Gianyar (lima kelurahan) dilakukan oleh Petugas Kebersihan Lingkungan (PKL), petugas PKL dengan membawa gerinding/gerobak sampah bergerak dari rumah ke rumah mengumpulkan sampah yang telah disiapkan oleh masing-masing rumah tangga dengan menggunakan wadah seperti, keranjang, kampil, tong, bin, dan lain-lainnya, setelah gerobak sampahnya penuh, sampah terus dibawa ke TPS terdekat, yang dimaksud TPS disini Tempat Penampungan Sementara yang terbuat dari pasangan batako biasanya dengan kapasitas 10 – 15 m³. Di Gianyar tidak ada transfer depo atau TPS 3R.



Gambar 2.9. Gerinding/Gerobak

2. Sampah Pasar, Pertokoan, dan Tempat Komersial lainnya

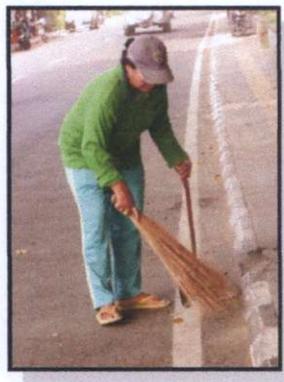
Pengumpulan sampah pasar dilaksanakan oleh petugas kebersihan di pasar yang sumber daya manusianya berasal dari Dinas Lingkungan Hidup, sampai dengan saat ini pasar umum belum bisa memenuhi kewajiban mengelola sampah yang

dihasilkannya, dimana didalam Perda diatur untuk kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus penanganan sampahnya ditangani oleh pengelola kawasan dimaksud.

Pengumpulan sampah pasar dilakukan dengan menggunakan gerobak sampah yang selanjutnya setelah penuh dibawa ke TPS yang ada di dalam pasar. Di pasar umum Gianyar ada 3 (tiga) buah TPS pasangan batako dengan kapasitas antara 15 – 20 m³, dan 2 (dua) buah Arm roll, sedangkan jumlah tenaga kebersihan yang berasal dari DLH berjumlah 51 orang.

3. Sampah di Jalan Arteri dan Jalan Kolektor

Pengumpulan sampah di jalan arteri dan jalan kolektor di Gianyar dilakukan oleh petugas penyapuan yang ada di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdapat 422 tenaga penyapuan/kebersihan yang melaksanakan tugasnya di jalan arteri dan kolektor yang ada di Kota Gianyar, beberaparuas jalan arteri di luar Kota Gianyar, 7 pasar umum yang ada di masing-masing kecamatan dan 1 buah pasar seni Sukawati, selanjutnya masing-masing petugas penyapuan membawa sampahnya ke TPS terdekat.



Gambar 2.10. Penyapuan di Jalan Arteri dilakukan oleh Petugas PKL

Sarana pengumpulan/pewadahan sampah di Kabupaten Gianyar Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 2.15.
Sarana Pengumpulan/Pewadahan Sampah di Kabupaten Gianyar sampai dengan Tahun 2018

No.	Jenis TPS / Pewadahan	Kapasitas	Satuan	Jumlah (unit)	Total Volume (m ³)
1	Plastik (dengan stand)	20	liter	16	0,32
2	Fiber (3R)	150	liter	28	4,2
3	Fiber (Drum)	100	liter	17	1,7
4	Fiber (Persegi)	250	liter	24	6.0
5	Kayu	1	M ³	67	67
	Kayu Terpilah	1	M ³	46	46
7	Pasangan Batako	Beragam	M ³	40	245
8	Kontainer	6	M ³	9	54
9	Steel (drum)	80	liter	361	28,88

Sumber : DLH Kabupaten Gianyar, 2018



Gambar 2.11. Sarana Pewadahan Sampah di Kabupaten Gianyar

4. Pengangkutan

Pengangkutan dimaksudkan sebagai kegiatan operasi yang dimulai dari titik pengumpulan terakhir dari suatu siklus pengumpulan sampah ke TPA atau TPST pada pengumpulan dengan pola individual langsung atau dari tempat pewadahan (transfer depo, transfer station), penampungan sementara (TPS, TPS 3R) atau tempat penampungan komunal sampai ke tempat pengelolaan/pembuangan akhir (TPA/TPST). Sehubungan dengan hal tersebut metode pengangkutan serta peralatan yang akan dipakai tergantung dari pola pengumpulan yang dipergunakan.

Pengangkutan sampah menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, merupakan bagian dari penanganan sampah. Pengangkutan didefinisikan sebagai bentuk

membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari TPS 3R menuju ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Permasalahan yang dihadapi dalam pengangkutan sampah adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan waktu kerja yang tidak efisien.
2. Penggunaan kapasitas muat yang tidak tepat.
3. Rute pengangkutan yang tidak efisien.
4. Tingkah laku petugas.
5. Aksesibilitas yang kurang baik.

Di Kabupaten Gianyar titik pengumpulan terakhir adalah TPS, karena tidak ada transfer depo atau TPST, sehingga pengangkutan sampah yaitu membawa sampah dari TPS menuju Tempat Pemrosesan Akhir.

a. Sampah Rumah Tangga

Untuk sampah rumah tangga pada umumnya setelah terkumpul dimasing-masing rumah tangga diangkut dengan gerobak oleh petugas kebersihan lingkungan menuju TPS. Selanjutnya dari TPS diangkut oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup dengan menggunakan Dump Truk menuju TPA Temesi.

b. Sampah Pasar

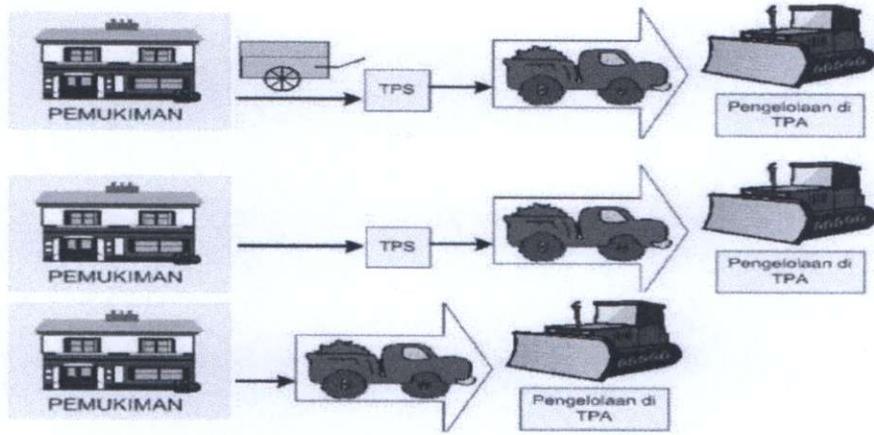
Sampah pasar umum yang ada di masing-masing kecamatan ditambah 1 pasar seni Sukawati untuk kebersihan dan pengangkutannya masih dilayani oleh Dinas Lingkungan Hidup, sampah dikumpulkan dengan gerobak dorong dibawa ke TPS yang tersedia, untuk pewadahan disamping TPS di pasar umum Gianyar, pasar umum Sukawati, pasar seni Sukawati dan Pasar Blahbatuh juga ditempatkan container/Arm Roll. Pengangkutan dilaksanakan setiap hari, dari fool menuju pasar selanjutnya dibawa ke TPA Temesi.

c. Sampah Fasilitas Umum

Untuk pengangkutan sampah fasilitas umum seperti sampah perkantoran, terminal, rumah sakit pada umumnya mempunyai pola yang sama yaitu dikumpulkan oleh petugas dengan menggunakan tong-tong/bin dengan ukuran kecil sampai dengan sedang selanjutnya dibawa ke TPS terdekat. Untuk di rumah sakit dan terminal ditempatkan pewadahan berupa container/Arm Roll, selanjutnya setelah penuh diangkut oleh petugas pengangkutan menuju TPA Temesi.

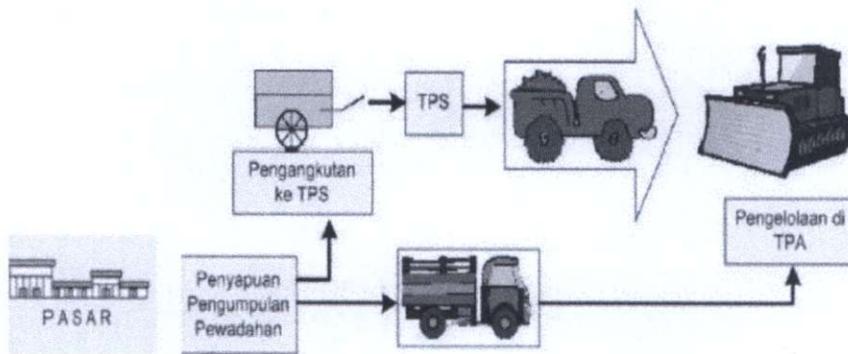
Gambar Skema Pengangkutan :

1. Sampah Rumah Tangga



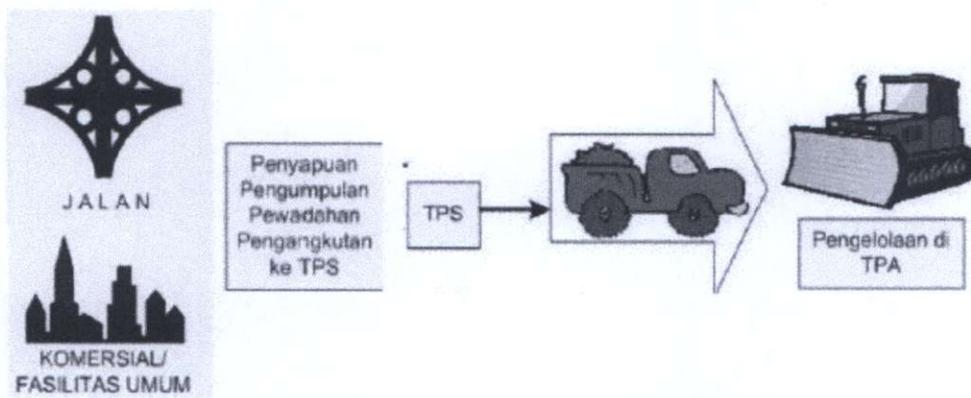
Gambar 2.12. Skema Pengangkutan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Gianyar

2. Sampah Pasar



Gambar 2.13. Skema Pengangkutan Sampah Pasar di Kabupaten Gianyar

3. Sampah Perkantoran, Fasilitas Umum Lainnya



Gambar 2.14. Skema Pengangkutan Sampah Perkotaan dan Fasilitas Umum Lainnya

➤ Rute Pengangkutan

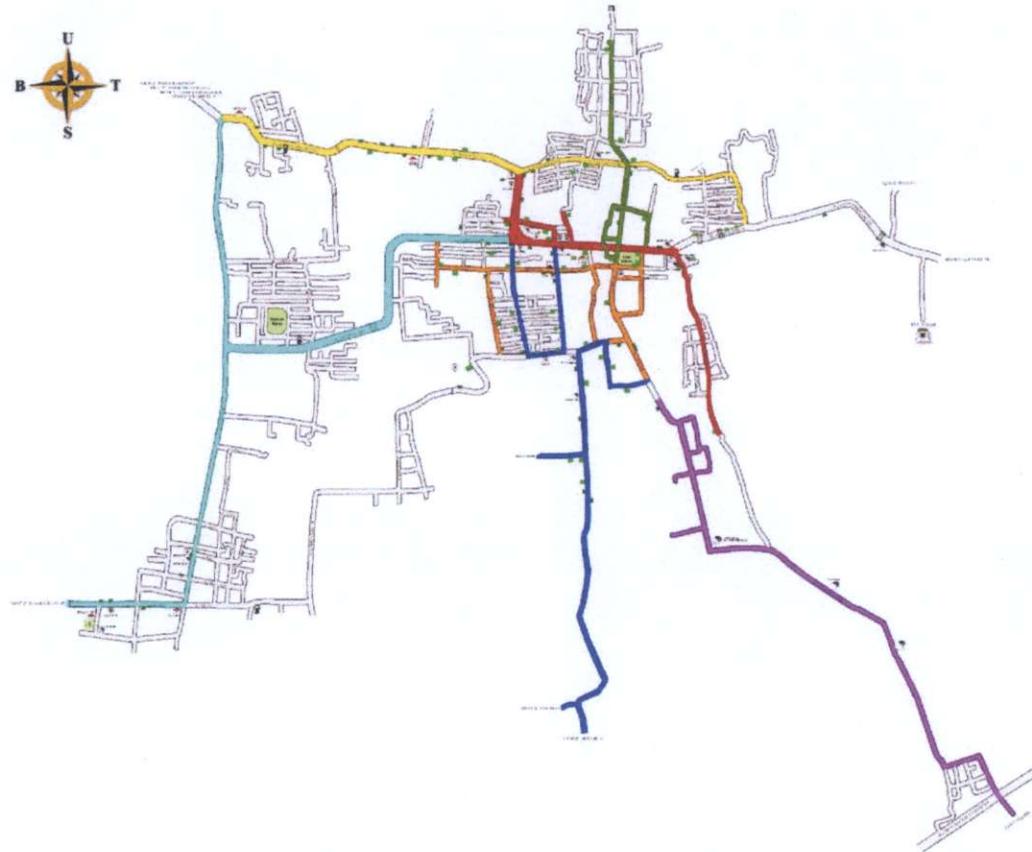
Rute pengangkutan dibuat agar pekerja dan peralatan dapat digunakan secara efektif dan efisien pada umumnya rute pengangkutan di coba-coba, karena rute didasarkan pada survey “Time Motion Study” untuk mendapatkan jalur yang paling efisien. Pedoman yang dapat digunakan membuat rute sangat tergantung dari beberapa faktor yaitu :

1. Peraturan Lalu Lintas yang ada (apakah jalan satu arah atau dua arah).
2. Pekerja, ukuran, dan tipe alat angkut.
3. Jika memungkinkan rute dibuat mulai dan berakhir didekat jalan utama.
4. Rute dibuat agar kontainer/TPS terakhir yang akan diangkut yang terdekat ke TPA.
5. Timbulan sampah pada daerah sibuk/lalu lintas padat diangkut sepagi mungkin.
6. Daerah yang menghasilkan timbulan sampah terbanyak diangkut lebih dahulu.

Rute pengangkutan di Kabupaten Gianyar sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 344/05-O/HK/2016 dan Peta Rute sesuai dengan gambar dibawah.



PETA : RUTE PELAYANAN ANGKUTAN PERSAMPAHAN DI KOTA GIANYAR



KETERANGAN :

-  KANTOR
-  SEKOLAH
-  PASAR
-  MASJID
-  TPS BATAKO
-  TPS KAYU
-  PERTAMINA
-  JEMBATAN
-  AMROLL

PILAJI
Rute I : Kalerak - Cawang Agung - Kalerak - Banjar Lela - Hadya - Ngembang Rai -
Awan Suda - Kalerak - Mangin Gunung - TPA
Rute II : Pasar - TPA

KUNING
Rute I : Park Manda (Traffic Light) - Sema Bang - TPA
Rute II : Pasar - TPA

BIRU
Rute I : Kasutan - Kaba Dua Dasa - TPA
Rute II : Semp - Madawana - TPA

MERAH
Rute I : Ngurah Rai (Dugan Lay - Antan Pan) - Camp Waras - Manik - TPA
Rute II : Kawan - Ngurah Rai - Jai - Karta - TPA

BIRU MUDA
Rute I : Sema Bang (Peraturan) - Berman - Baharak (Jamban) - Sema Bang - TPA
Rute II : Darna Giri (Pencampuran Camp Waras) - Saragati Berman - Darna Giri - TPA

ORANGE
Rute I : Pahlak - Dyer - Semp - Ganda - TPA
Rute II : Dahan Rai - Dyer - Ganda - Benda - Mepel - Edang - Amasari - Prang
Gala - Hapan Wada - TPA

LINGU
Rute I : Pasa Mardasa - Saraga - Kasan - Laha - Pasa Laha - TPA

a. Route I

Shift I : Fool – Jl. Kalantaka – Jl. Gunung Agung – Jl. Kalantaka – Banjar Lekok – Hardy's – Jl. Ngurah Rai – Jl. Anom Sandat – Jl. Kalantaka – Jl. Mangku Giweng – TPA (pagi) – Fool

Shift II : Fool – Pasar – TPA – Fool

Shift III : Fool – Jl. Kalantaka – Jl. Gunung Agung – Jl. Kalantaka – Banjar Lekok – Hardy's – Jl. Ngurah Rai – Jl. Anom Sandat – Jl. Kalantaka – Jl. Mangku Giweng – TPA (sore) – Fool

b. Route II

Shift I : Fool – Jl. Patih Jelantik (Traffic Light) – Semabaung – TPA (pagi) – Fool

Shift II : Fool – Pasar Umum Gianyar – TPA – Fool

Shift III : Fool – Jl. Patih Jelantik (Traffic Light) – Semabaung – TPA (sore) – Fool

c. Route III

Shift I : Fool – Jl. Kesatrian – Jl. Astina Selatan – Jl. Kebo Iwa Utara – TPA (pagi) – Fool

Shift II : Fool – Jl. Seroja – Jl. Gambir – Jl. Mulawarman – TPA – Fool

Shift III : Fool – Jl. Kesatrian – Jl. Astina Selatan – Jl. Kebo Iwa Utara – TPA (sore) – Fool

d. Route IV

Shift I : Fool – Jl. Ngurah Rai (Depan Lapangan Astina/Puri Gianyar) – Jl. Ciung Wanara – Jl. Manik – TPA (pagi) – Fool

Shift II : Fool – Jl. Kaliasem – Jl. Ngurah Rai – Jl. Jata – Jl. Ratna – TPA – Fool

Shift III : Fool – Jl. Ngurah Rai (depan lapangan astina/puri) – Jl. Ciung Wanara – Jl. Manik – TPA (sore) – Fool

e. Route V

Shift I : Fool – Semabaung (pertigaan) – Buruan – Blahbatuh (jembatan) – Semabaung – TPA – Fool

Shift II : Fool – Jl. Dharma Giri (perempatan ciung wanara) – Pertigaan Buruan – Jl. Dharma Giri – TPA – Fool

f. Route VI

- Shift I* : Fool – Jl. Puduk – Jl. Dipta – Jl. Seroja – Jl. Gambir – TPA – Fool
Shift II : Fool – Jl. Dalem Rai – Jl. Dipta – Jl. Gambir – Jl. Beratha – Jl. Majapahit – Jl. Erlangga – Jl. Anusapati – Jl. Pasung Grigis – Jl. Hayam Wuruk – TPA – Fool

g. Route VII

- Shift I* : Fool – Batas Abianbase – Serongga – Kesian – Lebih – Jl. Pantai Lebih – TPA – Fool

h. Route VIII

- Shift I* : Fool – Pasar Umum Tampaksiring – Jl. Raya Tampaksiring – Tirta Empul – Manukaya – TPA – Fool
Shift II : Fool – Pasar Umum Tegallalang – TPA – Fool

i. Route IX

- Shift I* : Fool – Jl. Raya Payangan – Pasar Payangan – TPA – Fool
Shift II : Fool – Pasar Ubud – TPA – Fool

j. Route X

- Shift I* : Fool – Jembatan SKB (Perbatasan Sukawati - Batuan) - Jl. Protokol di Kota Kec. Sukawati - Jembatan Tukad Cengceng – TPA – Fool
Shift II : Fool – Jembatan SKB (Perbatasan Sukawati - Batuan) - Jl. Protokol di Kota Kec. Sukawati - Jembatan Tukad Cengceng – TPA – Fool

k. Route XI

- Shift I* : Fool – Jl. Protokol di Kota Kec. Tampaksiring – Perempatan Desa Manukaya – TPA – Fool
Shift II : Fool – Jl Raya Pengaji (Br Pengaji) – Kantor Camat Payangan – Jl Raya Giri Kesuma – Fool

➤ **Sarana Pengangkutan**

Di Kabupaten Gianyar, pengangkutan sampah pada umumnya menggunakan Dump Truck, sedangkan Arm Roll Truck digunakan pada tempat-tempat tertentu, seperti pasar umum, Rumah Sakit dan bila memungkinkan dari segi penempatan dipinggir “jalan kolektor”. Untuk angkutan di Kelurahan/Lingkungan digunakan motor sampah, sehingga memungkinkan masuk ke jalan-jalan sempit/gang. Dari sisi efisiensi dan

pengurangan arus lalu lintas pemanfaatan sarana pengangkutan sampah berupa compactor truck akan sangat efisien namun harganya cukup mahal.

Tabel 2.16
Jenis-jenis Sarana Pengangkutan Sampah serta Kapasitasnya di Kabupaten Gianyar sampai dengan Tahun 2018

No.	Jenis	Kapasitas (m ³)	Jumlah (unit)	Keterangan
1	Dump Truck	6	17	3 unit rusak berat
2	Arm Roll Truck	5	3	2 unit rusak berat
3	Motor Sampah	1,8	10	Berfungsi
4	Gerobak Sampah	1	43	Berfungsi

Sumber : DLH Kabupaten Gianyar, Tahun 2018

Sampai dengan saat ini, di Gianyar belum mempunyai truck compactor, demikian juga halnya dengan sweeper, yaitu armada penyapu jalan, disamping membutuhkan anggaran yang cukup besar juga dengan pertimbangan kondisi jalan arteri di Kota Gianyar tidak terlalu lebar.



Gambar 2.16. Sarana Pengangkutan di Kabupaten Gianyar

5. Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah, didefinisikan sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah. Pengolahan secara umum merupakan proses transformasi sampah baik secara fisik, kimia maupun biologi.

Pengolahan sampah dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke TPA serta meningkatkan efisiensi penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan. Teknologi pengolahan sampah dapat dilakukan melalui pembuatan kompos, pembakaran sampah secara aman, pemanfaatan dan daur ulang sampah.

Skala pengolahannya mulai dari individual, komunal (kawasan), skala kota dan skala regional.

1. Skala Individual, yaitu pengolahan yang dilakukan oleh penghasil sampah secara langsung disumbernya (rumah tangga/kantor). Contoh pengolahan skala individu ini adalah pemilahan sampah atau composting skala individu. Di Kabupaten Gianyar belum banyak kita temui jenis pengolahan sampah secara individu, hal ini harus dikampanyekan dan disosialisasikan ke masyarakat karena sangat efektif untuk mengurangi sampah ke TPA.
2. Skala Kawasan, yaitu pengolahan yang dilakukan untuk melayani suatu lingkungan/kawasan (permukiman/perkantoran, pasar, dll) proses yang dilakukan di skala kawasan biasanya : pemilahan, pencacahan sampah organik, pengomposan, pengeringan kompos, pengepakan, dan pencacahan plastik untuk daur ulang. Kegiatan pengolahan sampah skala kawasan di Kabupaten Gianyar masih sedikit. Hal ini diakibatkan oleh sulitnya lahan dan sumber daya manusianya yang akan mengelola.
 - Pengolahan sampah skala kawasan ada di Desa Nyuh Kuning Kelurahan Ubud.
 - Di lingkungan Padang Tegal, Kelurahan Ubud.
 - Pada Tahun 2013 juga dibangun di Dusun Lembeng, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati.
3. Skala Kota, yaitu pengolahan yang dilakukan untuk melayani sebagian atau seluruh wilayah kota, lokasi pengolahan dilakukan di IPST yang umumnya menggunakan bantuan peralatan mekanis. Di Kabupaten Gianyar ada satu unit pengolahan sampah skala kota, dimana pengolahannya dilaksanakan oleh Yayasan Pengolahan Sampah Temesi. Untuk pengoperasiannya Yayasan membentuk fasilitas yaitu, Fasilitas pengolahan sampah yang dikenal dengan nama Fasilitas Pengolahan Sampah temesi (FPST) merupakan satu kesatuan dengan TPA yang ada. Untuk mensukseskan program pengurangan dan penanganan sampah, maka perlu dilaksanakan program 3R melalui penyelenggaraan tempat pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat.

1) Lokasi Fasilitas Pengolahan Sampah Temesi (FPST)

Terletak di Br. Temesi, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar dengan jarak $\pm 6,5$ km kearah timur laut Kota Gianyar, jarak FPST dengan permukiman terdekat $\pm 1,5$ km dan jarak dengan pantai ± 5 km. Bahan organik dijadikan kompos sedangkan sampah anorganik yang bernilai ekonomi dijual, bahan organik yang tersisa dan residu hasil pemilahan dikelola di landfill.



Gambar 2.17. Lokasi FPST di Desa Temesi Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar

2) Sejarah Singkat Berdirinya Fasilitas Pemilahan Sampah Temesi (FPST)

1. Tahun 2004 didirikan usaha pemilahan sampah yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah Gianyar dengan Rotary Club of Bali di Ubud.
2. Pelaksanaan pilot proyek tahap I adalah yayasan Bali Fokus dimulai Bulan Juni Tahun 2004 sampai dengan Bulan Juli 2005. Kapasitas produksi baru mencapai 6 ton/hari dengan luas bangunan composting 400 m².
3. Pelaksanaan proyek tahap II adalah Yayasan GUS (Gelomboang Udara Segar) mulai Bulan Maret Tahun 2007 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2009, dengan luas bangunan untuk composting mencapai 2.400 m² dan kapasitas pengolahan dapat mencapai 35 ton/hari dan fasilitas telah dilengkapi dengan sarana yang cukup memadai seperti mesin pencacah (shredder), mesin pemilah berupa abn berjalan, termasuk mesin blower untuk abahn organik.
4. Fasilitas pengolahan sampah Temesi tahap III kegiatan dimulai Bulan Agustus Tahun 2009 dan selesai Bulan Desember Tahun 2009 dengan kapasitas produksi dapat mencapai 60 ton/hari luas bangunan yang baru 2340 m², sehingga total keseluruhan bangunan mencapai 4740 m².
5. Untuk mencapai kemandirian, maka fasilitas pengolahan sampah Gianyar ini perlu dikelola secara profesional dan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi. Maka dibentuklah Yayasan Pengolahan Sampah Temesi (YPST) pada tanggal 21 November 2008. Selanjutnya yayasan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah

Gianyar dengan jangka waktu selama 10 tahun tanggal 11 Maret 2010 sampai dengan 11 Maret 2020.

6. Karena adanya upaya pengurangan komposting emisi Gas Rumah Kaca (Gas Metan dan CO₂) melalui composting bahan organik, maka YPST telah berhasil teregistrasi oleh Dewan Eksekutif CDM (Clean Development Mechanism) pada tanggal 4 November 2008, sebagai Gianyar Waste Recovery Project No. 1885 untuk periode 10 tahun (4 November 2008 s/d 4 November 2018). Prestasi ini adalah merupakan prestasi langka dan baru satu-satunya di Indonesia untuk bidang pengolahan sampah memperoleh fasilitas.

Unit-unit yang ada di FPST.

- Pusat Pendidikan Lingkungan

Dipusat pendidikan lingkungan ini, tamu-tamu yang berkunjung ke Fasilitas Pengolahan Sampah Temesi di sajikan informasi, solusi, dan alternative menangani masalah lingkungan yang terjadi. Sehingga dapat menambah wawasan para tamu mengenai gaya hidup berwawasan lingkungan. Pusat pendidikan lingkungan di TPA Temesi Gianyar dapat dilihat pada gambar diatas.

- Demonstrasi Energi Alternatif

Demonstrasi Energi Alternatif bertujuan untuk menambah wawasan pengunjung mengenai alternative sumber energy yang dapat dimanfaatkan dan bersifat ramah lingkungan. Beberapa contoh energy alternative yang masih dikembangkan diantaranya Windmill (Energi Angin), photovoltaic (Energi Surya), experiment biomasa (Energi dari Gas Metan). Foto kincir angin dan panel surya dapat dilihat pada gambar disamping.

- Demo Rumah Hemat Listrik

Merupakan fasilitas demonstrasi berupa rumah kecil yang berisi barang-barang elektronik yang umum di pergunakan didalam kehidupan sehari-hari. Demo rumah hemat listrik menunjukkan cara-cara menghemat energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain karena sumber energi ini juga memiliki peranan penting dalam mengurangi pembentukan gas rumah kaca yang dilepas ke atmosfer. Foto Demo Rumah Hemat Listrik dapat dilihat seperti gambar diatas.

- Unit Pemilahan Sampah

Di unit pemilahan sampah ini setiap harinya dipilah sampah antara 25 sampai dengan 40 ton, dengan tenaga kerja \pm 30 orang.

- Unit Pengolahan/Penelitian Sumber Energi Alternatif
Gas Metan yang dihasilkan oleh decomposisi sampah (bahan organik) oleh mikroorganisme dapat dipergunakan sebagai sumber energi listrik alternatif. Gas metan dipergunakan untuk menggerakkan generator.
- Unit Laboratorium
Difasilitas Pengolahan Sampah Temesi, sudah dilengkapi dengan unit laboratorium, untuk penelitian komposisi sampah organik, dan lain-lain.
- Riset Pengomposan dan Alternatif Pengomposan
FPST hampir setiap hari mendapat kunjungan dari berbagai kalangan (Sekolah, Perguruan Tinggi, Birokrasi, Legislatif, LSM, dll) baik untuk kepentingan penelitian, study banding dan lainnya termasuk bisnis produk kompos. Pada saat pelaksanaan Asia Pasific Landfill Symposium yang diselenggarakan di Hotel Sanur Beach Aerowisata pada tanggal 8 s/d 11 Oktober 2012 pada hari terakhir (acara visit site), FPST dikunjungi oleh \pm 300 orang peserta dari 35 negara di Asia Pasific.

7. Produksi Kompos di Fasilitas Pemilahan Sampah Temesi (FPST)

Pencatatan bahan organik dan produksi kompos, mengalami fluktuasi dan tahun ke tahun.

i. Tempat Pemrosesan Akhir

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan di TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuannya benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik.

Beberapa permasalahan yang dapat timbul terkait dengan operasional TPA yaitu :

1. Pertumbuhan Vektor Penyakit

Sampah merupakan sarang yang sesuai bagi berbagai vector penyakit, berbagai jenis rodentisida seperti : tikus, lalat, kecoa, dan nyamuk.

2. Pencemaran Udara

Gas yang dihasilkan dari tumpukkan sampah ini, jika konsentrainya mencapai 5-15% di udara, maka dapat menyebabkan ledakan.

3. Pandangan dan Bau Tidak Sedap

Meningkatkan jumlah timbulan sampah, selain dapat mengganggu estetika tumpukkan sampah menimbulkan bau tidak sedap.

4. Asap Pembakaran

Apabila dilakukan pembakaran, akan dapat mengganggu terutama dalam transportasi dan gangguan kesehatan.

5. Pencemaran Leacheat

Merupakan hasil dekomposisi sampah, yang dapat meresap dan mencemari air tanah.

6. Kebisingan

Disebabkan karena operasi alat berat dan armada pengangkut sampah

7. Dampak Sosial

Keresahan warga setempat akibat gangguan-gangguan yang disebutkan diatas.

TPA Temesi

TPA Temesi awalnya adalah merupakan daerah yang lembah atau jurang sebagai tempat membuang sampah yang pada saat itu secara open dumping, kemudian setelah jurang penuh, kemudian dipadatkan dan diurug dengan tanah urug. Perkembangan selanjutnya setelah areal TPA sudah mencapai ± 4 ha, dimana merupakan areal minimal untuk membangun landfill. Atas bantuan Ditjen Cipta Karya, Sub Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman melalui Satuan Kerja PPLP Provinsi Bali dibangunlah Landfill Block I dengan luas 0,36 ha dengan kapasitas daya tampung residu mencapai 47.081,55 m³ dan pada tahun 2012 dilanjutkan dengan pembangunan Landfill Block II dengan luas 0,67 ha dengan kapasitas daya tampung mencapai 79.088,81 m³.

▪ Instalasi pembangkit listrik dan panas dari gas methan

Sesuai dengan salah satu tujuan pengelolaan sampah, menjadikan sampah sebagai sumber daya (sumber daya ekonomi dan energi) maka di Landfill Block I, dicoba menangkap gas methan untuk dijadikan energi listrik dan energi panas, di awal-awal

kegiatan energi panas dapat menghidupkan 5 unit tungku kompor dengan baik sedangkan generator mesin pembangkit listriknya belum bisa dioperasikan hal ini kemungkinan disebabkan gas metan yang ada belum mampu untuk membangkitkan listrik.

▪ **Kondisi Block Landfill Saat Ini**

TPA Temesi mulai Bulan Juni 2017 untuk sementara tidak dioperasikan, mengingat Landfill Block II telah penuh dengan ketinggian sampah ± 12 meter, jalan operasi sepanjang ± 180 meter tertimbun sampah, bahkan sampah sebagian berada diluar Block Landfill (disebelah timur bangunan komposting). untuk sementara Pemerintah Kabupaten Gianyar membuang sampahnya di TPA Suwung. Walaupun telah diadakan perluasan lahan Tahun 2016, namun diperlukan persiapan-persiapan untuk dapat dioperasikannya lahan baru sebagai berikut, antara lain :

- penggalian Block Landfill, dilaksanakan triwulan I dan II.
- peningkatan jalan operasi sepanjang ± 180 meter
- pengadaan saluran Leacheat, dikerjakan di triwulan IV
- pembangunan jalan baru, untuk mencapai lahan baru/Landfill Block III
- dalam rangka penanganan sampah, dilahan baru sisi barat dibangun dinding penahan tanah (DPT)
- untuk penanganan TPA dan terganggunya lingkungan dari sampah dan leacheat, maka areal TPA secara bertahap akan dibuat tembok untuk Tahun 2017 telah dikerjakan pemagaran/tembok di sisi timur sepanjang 120 meter

Seluruh kegiatan/pekerjaan di TPA akan diselesaikan sampai dengan akhir Tahun 2017 (triwulan IV) dengan demikian TPA Temesi sudah siap dioperasikan awal Januari 2018.

CAKUPAN PELAYANAN

Cakupan pelayanan merupakan gambaran secara kuantitatif terhadap kondisi pengelolaan sampah suatu kota. Data tingkat pelayanan dapat diketahui dari beberapa hal yaitu :

- Dihitung dari prosentase perbandingan jumlah penduduk yang mendapatkan akses pelayanan sampah secara terpusat (dikumpulkan dari sumber sampah ke TPA) dan jumlah penduduk total kota.
- Dihitung dari prosentase perbandingan jumlah sampah yang diangkut ke TPA dengan jumlah sampah total.

1. Cakupan Pelayanan di Kota Gianyar

Untuk menghitung cakupan pelayanan sampah di Kota Gianyar dipergunakan pengertian/batasan yang kedua sebagai berikut :

Jumlah sampah yang diangkut di Kota Gianyar oleh armada DLH ke TPA adalah 170,4 m³ per hari dengan rincian :

- Lima buah dump truck dengan kapasitas 6 m³, jumlah ritasi 3 rit (5 buah x 6 m³ x 3 rit = 90 m³)
- Empat buah dump truck dengan kapasitas 6 m³, jumlah ritasi 2 rit (5 buah x 6 m³ x 2 rit = 48 m³)
- Sembilan buah motor sampah dengan kapasitas 1,8 m³, jumlah ritasi 2 rit (9 buah x 1,8 m³ x 2 rit = 32,4 m³)

Total sampah yang terangkut di Kota Gianyar = 90 m³ + 48 m³ + 32,4 m³ = 170,4 m³

Total produksi sampah di Kota Gianyar dengan jumlah penduduk 41.937 jiwa = 41.937 x 0,0045 m³ = 188,7 m³

Jadi cakupan pelayanan di Kota Gianyar $(170,4 / 188,7) \times 100 \% = 90,2 \%$

2. Cakupan Pelayanan di Kabupaten Gianyar

Produksi sampah total di Kabupaten Gianyar Tahun 2018 mencapai 1.524,3 m³ per hari (prediksi jumlah penduduk Tahun 2018), sedangkan jumlah sampah masuk dan dikelola di TPA, baik menggunakan armada DLH dan armada non DLH mencapai 742 m³ dengan rincian jumlah sampah terangkut dengan armada DLH = 266,44 m³, jumlah sampah yang terangkut dengan armada non DLH = 475,6 m³. Dengan demikian cakupannya mencapai =

$$\frac{\text{Jumlah sampah masuk ke TPA}}{\text{Jumlah Produksi sampah total}} \times 100 \% = \frac{742 \text{ m}^3}{1.524,3 \text{ m}^3} = 48 \%$$

Tabel 2.17
Jumlah Sampah Yang Dikelola di TPA Berdasarkan Kendaraan Pengangkut Sampah Dari Pemerintah (DLH) dan Non Pemerintah

No.	Jenis Kendaraan Pengangkut	Jumlah (unit)	Ritas (rit)	Volume (m ³)	Total (m ³)
1	Pemerintah				
	1. Dump Truck	5	3	6	90
	2. Dump Truck	9	2	6	108
	3. Armroll Truck	3	2	6	36
	4. Motor Sampah	9	1,8	2	32,4
	Sub. Total	-	-	-	266,4

2	Non Pemerintah				
	1. Truck	-	-	-	388,6
	2. Pick Up	-	-	-	87
	Sub. Total				475,6
	Grand Total				742

2.2 Permasalahan

2.2.1 Air Minum

Tabel 2.18 Permasalahan terkait Pengelolaan Air Minum di Kabupaten Gianyar

No	Permasalahan Air Minum
Aspek Teknis	
1.	Belum optimalnya teknologi yang menilai kualitas air yang dikonsumsi masyarakat walau masyarakat menyadari air yang dikonsumsi sudah tercemar
2.	Belum ada pilihan teknologi untuk mencegah rembesan WC masyarakat ke sumur
3.	Terbatasnya pemanfaatan sumber mata air dan ketersediaan debit air yang cukup
4.	Belum maksimalnya pemanfaatan kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di berbagai lokasi
5.	Terbatasnya lokasi/lahan untuk pengembangan jaringan air minum
6.	Masih tingginya Operasional dan Pemeliharaan untuk penggunaan pompa dan listrik
7.	Belum optimalnya pemanfaatan inovasi teknologi yang efisien dalam pengolahan air untuk kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air baku
8.	Belum optimalnya pemanfaatan inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik
9.	Belum sempurnanya masterplan RISPAM Kabupaten Gianyar
Aspek Sosial	
1.	Masih terdapatnya sarana air minum yang belum memenuhi syarat air minum layak
2.	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian sumber mata air
3.	Kurangnya kepedulian terhadap kebocoran air
4.	Kurangnya pembinaan terhadap masyarakat terkait pengembangan jaringan air minum
5.	Rendahnya kesadaran masyarakat akan penghematan air
6.	Adanya anggapan masyarakat bahwa air PDAM berkaporit sehingga banyak masyarakat menggunakan air sumur
Aspek Kelembagaan	
1.	Lembaga/dinas di daerah belum sepenuhnya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator

2.	Masyarakat belum mempunyai manajemen kelembagaan yang solid dalam pengelolaan air minum
3.	Terbatasnya personil pengelola SPAM di tingkat OPD
4.	Masih rendahnya tingkat koordinasi penyelenggaraan dan pengembangan SPAM antar OPD di daerah
5.	Masih lemahnya penerapan efisiensi manajemen aset Penyelenggara SPAM
6.	Masih lemahnya Lembaga Penyelenggara SPAM perdesaan
7.	Adanya kebijakan yang tidak selaras antara Pemda dengan PDAM dalam hal ini ijin penggalian aspal dan ijin air bawah tanah
Aspek Pendanaan	
1.	Masih terbatasnya kemampuan bantuan dana untuk pengembangan sarana air minum dari Pemerintah Daerah.
2.	Belum optimalnya pemanfaatan pendanaan pengembangan SPAM yang disubsidi oleh Pemerintah
3.	Masih adanya lokasi yang memerlukan pendanaan besar sehingga diusulkan ditangani pusat menggunakan APBN
4.	Tingginya biaya Operasional dan Pemeliharaan pasca konstruksi
5.	Rendahnya peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pengembangan SPAM
Aspek Peraturan Perundang-undangan	
1.	Belum optimalnya penerapan NSPK di daerah
2.	Belum disosialisasikannya pedoman dan pengaturan mengenai SPAM berbasis masyarakat
3.	Belum optimalnya pengelolaan aset dan serah terima aset dari Pemerintah kepada PDAM
4.	Belum optimalnya penerapan Rencana Bisnis (business plan) dalam pengembangan SPAM
5.	Belum optimalnya pengelolaan SPAM dari sisi syarat kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, serta kehilangan air teknis/fisik masih tinggi
6.	Belum sempurnanya dokumen perencanaan pengembangan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan, dan Perencanaan Teknis) serta masih ada yang belum lengkap dan memenuhi kaidah teknis
Aspek Lingkungan	
1.	Masih terdapat banyak lokasi sumur yang berdekatan dengan Septictank
2.	Masih tercemarnya lingkungan sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas air
3.	Semakin terkikisnya hutan/pohon akibat alih fungsi lahan sehingga sumber mata air berkurang
4.	Kurang optimalnya Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku

5.	Banyaknya pembuatan sumur bor masyarakat sehingga penyerapan air bawah tanah tidak terkontrol.
----	--

2.2.2 Penyehatan Lingkungan

Tabel 2.19 Permasalahan terkait Pengelolaan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Gianyar

No	Permasalahan Penyehatan Lingkungan
Aspek Teknis	
1.	Masih terdapat beberapa penduduk yang berperilaku BABS
2.	Masih terdapat penduduk yang belum memiliki septic tank
3.	Masih kurangnya IPAL komunal
4.	Tidak terdapat IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)
5.	Kurangnya Sarana prasarana dalam pengelolaan persampahan
6.	Belum semua wilayah terjangkau pelayanan persampahan
7.	Belum optimalnya upaya 3R (reuse, reduce, recycle) dalam pengelolaan persampahan
8.	Belum optimalnya kinerja TPA dalam pengelolaan sampah
9.	Data dasar timbulan dan komposisi/karakteristik sampah yang tidak dilakukan secara primer dan berkala
10.	Pengurangan dan pemilahan sampah disumbernya relatif masih kecil dan belum sesuai dengan target
11.	Keterbatasnya lahan TPS
12.	Pembangunan saluran drainase yang tidak terintegrasi, terutama pada permukiman padat
13.	Adanya pendangkalan saluran drainase akibat tanah dan tanaman
Aspek Sosial	
1.	Masih kurangnya Kesadaran masyarakat untuk menggunakan sarana sanitasi dengan baik dan benar
2.	Kurangnya kesadaran masyarakat atas bahayanya BABS
3.	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menguras septic tank secara berkala
4.	Masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan
5.	Masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke saluran drainase sehingga drainase tersumbat sampah
6.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Aspek Kelembagaan	
1.	Belum adanya regulasi daerah terkait sanitasi
2.	Masih kurangnya dukungan Desa Pekraman dalam penguatan Sanitasi (dukungan peraturan Adat)
3.	Belum optimalnya penegakan peraturan dalam pemberian sanksi
Aspek Pendanaan	
1.	Kurangnya keterlibatan lembaga swasta dalam pemanfaatan dana CSR bagi peningkatan pengelolaan sanitasi
2.	Terbatasnya alokasi anggaran pemerintah dalam pengelolaan sanitasi
Aspek Lingkungan	
1.	Lingkungan masih tercemar karena limbah mentah langsung dibuang ke sungai dan selokan tanpa diolah terlebih dahulu.
2.	Pada beberapa daerah sarana sanitasi dasar yang layak jumlahnya masih terbatas jumlahnya sehingga masyarakat sering buang hajat di kebun, sawah maupun sungai
3.	Masih banyaknya masyarakat yang membakar sampah sehingga dapat merusak kualitas udara

2.3 Tantangan

2.3.1 Air Minum

Tabel 2.20. Tantangan Pengembangan Air Minum di Kabupaten Gianyar

No	Tantangan Air Minum
Tantangan Internal	
1.	Meningkatkan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan baik di perkotaan maupun perdesaan, selain melalui pembangunan baru, juga melalui optimalisasi kapasitas unit produksi yang belum termanfaatkan dan penurunan kehilangan air
2.	Mengoptimalkan potensi dalam hal pendanaan pengembangan SPAM, antara lain adanya potensi sumber dana dari donor (hibah/grant), swasta (Corporate Social Responsibilities/CSR), perbankan Nasional, dan dana masyarakat (obligasi) yang belum termanfaatkan serta mobilisasi dana daerah. Sedangkan adanya tuntutan penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh (full cost recovery) merupakan tantangan besar dalam pengembangan SPAM
3.	Adanya tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang profesional dengan penerapan Good Corporate Governance merupakan tantangan dalam pengembangan SPAM di masa yang akan datang
4.	Memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum, baik kuantitas maupun kualitas, yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya cakupan pelayanan air minum
5.	Memberdayakan potensi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan SPAM secara optimal

6.	Mengembangkan teknologi pengolahan air yang efisien dan tepat guna khususnya bagi daerah yang memiliki keterbatasan kualitas air baku, dan mengembangkan teknologi untuk efisiensi pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik
Tantangan Eksternal	
1.	Melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup
2.	Menerapkan Good Governance melalui demokratisasi tanpa intervensi dari luar dan menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
3.	Mendukung Pemerintah dalam melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan Sustainable Development Goals (SDGs)
4.	Meningkatkan ekonomi dengan pemberdayaan potensi lokal dan masyarakat, serta peningkatan peran serta dunia usaha
5.	Meningkatkan iklim investasi yang kompetitif melalui peningkatan kondisi keamanan dan hukum nasional
6.	Melaksanakan pengembangan SPAM dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan dan konservasi

2.3.2 Penyehatan Lingkungan

Tabel 2.21. Tantangan Pengembangan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Gianyar

No	Penyehatan Lingkungan
Aspek Teknis	
1.	Belum adanya data by name by address untuk kepemilikan septictank yang layak
2.	Perkembangan teknologi dalam pengelolaan sanitasi
Aspek Sosial	
1.	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam kebersihan dan penyehatan lingkungan sehingga perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan
2.	Perubahan pola perilaku masyarakat menjadi masyarakat modern sehingga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berkurang
3.	Adanya aturan pengurangan pemakaian plastic sehingga dapat mengurangi timbulan sampah plastik
Aspek Kelembagaan	
1.	Penyusunan peraturan yang tegas dalam pengelolaan sanitasi penyehatan lingkungan
2.	Kurangnya organisasi swasta dan masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sanitasi
Aspek Pendanaan	
1.	Peningkatan keterlibatan LSM, Swasta, dan Masyarakat (Pemberdayaan) dalam pengembangan sanitasi
2.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sarana sanitasi

Aspek Lingkungan	
1.	Adanya degradasi lingkungan sehingga perlu menjaga kebersihan dan penyehatan lingkungan agar lingkungan dapat terjaga
2.	Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta memelihara kebersihan dan penyehatan lingkungan

BAB III

ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

3.1 Isu Strategis

Secara umum permasalahan utama sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Gianyar masuk dalam dua kategori besar, yakni sub sektor air minum dan sub sektor penyehatan lingkungan. Hal itu terlihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Isu Utama Sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Di Kabupaten Gianyar

NO	ISU AIR MINUM		ISU PENYEHTAN LINGKUNGAN
1.	Masih banyak penduduk yang belum terlayani air minum yang layak	1.	Masih banyak masyarakat yang belum terakses terhadap sanitasi dasar seperti: jamban, sarana pengolahan air limbah.
2.	Sumber — sumber air di daerah hulu belum dikelola secara baik	2.	Pemahaman masyarakat akan pentingnya sanitasi terhadap kesehatan masih kurang.
3.	Sumber air baku masih mengandalkan potensi air bawah tanah dan belum mengoptimalkan sumber air baku yang lain antara lain sungai dan air hujan.	3.	Kesadaran masyarakat terhadap Pola Hidup Bersih dan Sehat masih rendah.
4.	Pemahaman masyarakat akan kebutuhan air minum layak masih rendah		

3.1.1. Isu Strategis Bidang Air Minum

Tabel 3.2. Isu Strategis Air Minum Kabupaten Gianyar

No	Aspek Keberlanjutan	Permasalahan dan Tantangan	Solusi Tindakan
1.	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya bantuan dana untuk sarana air minum dari Pemerintah Daerah. - Tarif air minum belum <i>Full Cost Recovery (FCR)</i> - Di musim kemarau sebagian 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya peningkatan sarana air minum.
2.	Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada teknologi yang menilai kualitas air yang dikonsumsi masyarakat namun pendanaan daerah untuk penerapan teknologi ini masih terbatas - Tidak ada pilihan teknologi untuk mencegah rembesan WC masyarakat ke sumur 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kabupaten Gianyar perlu memonitor kualitas air yang dikonsumsi masyarakat berupa pemantauan kualitas air.
3.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan air minum oleh PDAM belum menjangkau ke seluruh masyarakat. - Masyarakat belum mempunyai kelembagaan yang solid yang mengurus air 	<ul style="list-style-type: none"> - PDAM telah memperluas jaringan dan pelayanan penyediaan air. - Tim Pokja AMPL sering melakukan penyuluhan tentang air minum - Kinerja Tim Pokja AMPL telah tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Gianyar sebagai bentuk dukungan - Mengajak masyarakat di desa-desa lokasi penyediaan air minum perdesaan non PAMSIMAS untuk bergabung dalam Asosiasi BPSPAMS

No	Aspek Keberlanjutan	Permasalahan dan Tantangan	Solusi Tindakan
4.	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak sumur berdekatan dengan <i>Septictank</i> - Lingkungan masih tercemar 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan yang sering dilakukan oleh Tim Pokja tentang bahaya membangun sumur yang terlalu dekat dengan <i>septictank</i> mengubah <i>mindset</i> masyarakat menjadi lebih baik. - Dinas Kesehatan selaku anggota tim Pokja AMPL secara optimal melakukan penyuluhan intensif tentang keterkaitan kualitas air dengan lingkungan
5.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapatnya sarana air minum yang belum memenuhi syarat air minum layak 	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak sarana sumur bor untuk masyarakat umum di Kabupaten Gianyar baik melalui bantuan Pemerintah maupun swadaya masyarakat. - Di musim kemarau warga tidak harus mengambil air jauh dari tempat tinggalnya karena telah ada bantuan sarana air minum. - Masyarakat mulai sadar untuk menjaga kelestarian sumber air. - Masyarakat telah mempunyai kesadaran tinggi tentang air sebagai benda ekonomi, sehingga lebih bisa berhemat dalam menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari.

3.1.2. Isu Strategis Bidang Penyehatan Lingkungan

Tabel 3.3. Isu Strategis Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Gianyar

No	Aspek Keberlanjutan	Permasalahan dan Tantangan	Solusi Tindakan
1.	Pendanaan	Anggaran Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk sanitasi relatif kecil	<p>Alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk sanitasi sudah mulai meningkat tiap tahunnya</p> <p>Mencari dukungan pendanaan dengan sumber dana selain APBD antara lain APBN, <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), dan sumber dana lain.</p>
2.	Teknologi	Teknologi bidang sanitasi hanya terbatas pada pembangunan septik tank.	<p>Truck sampah jumlahnya mulai ditambah.</p> <p>Pilihan teknologi sanitasi sudah dimulai diperkenalkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar terutama melalui Dinas Kesehatan.</p> <p>Telah tersedianya teknologi pengolahan sampah melalui dengan proses 3R</p>
3.	Kelembagaan	Belum ada peraturan tentang sanitasi	<p>Tim Pokja AMPL sering melakukan penyuluhan tentang sanitasi. Kinerja Tim Pokja telah tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Gianyar sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan sektor sanitasi dan penyehatan lingkungan.</p> <p>Telah terbentuk BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) di desa-desa yang mengurus tentang sanitasi.</p>
4.	Lingkungan	<p>Lingkungan masih tercemar karena limbah mentah langsung dibuang ke sungai dan selokan tanpa diolah terlebih dahulu.</p> <p>Sarana sanitasi dasar yang layak jumlahnya masih terbatas sehingga masyarakat sering buang hajat di kebun, sawah maupun sungai.</p>	<p>Telah terbangun IPAL</p> <p>Dinas Kesehatan secara optimal melakukan penyuluhan intensif tentang keterkaitan PHBS masyarakat.</p> <p>Program bantuan sarana sanitasi telah ditambah bagi masyarakat.</p>

No	Aspek Keberlanjutan	Permasalahan dan Tantangan	Solusi Tindakan
5.	Sosial	PHBS masyarakat masih sangat rendah.	Penyuluhan secara intensif yang sering dilakukan oleh Tim Pokja AMPL sedikit demi sedikit mulai dapat merubah perilaku hidup yang tidak sehat.

3.2. Arah Kebijakan 2018-2023

3.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gianyar

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gianyar periode 2018-2023 menetapkan bahwa visi dan misi Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Gianyar yang Bahagia, Sejahtera, Aman dan Damai, Mandiri, Berintegritas Berlandaskan Tri Hita Karana melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana”

Makna dari rumusan Visi tersebut diatas mengandung unsur filosofis dan tujuan visioner dalam kerangka waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut.

1. **Bahagia** maknanya kondisi Kabupaten Gianyar dengan sumber daya manusia yang memiliki moral dan etika yang baik yang sejalan dengan kemampuan untuk menjaga ketentraman dan kerukunan hidup bermasyarakat untuk mencapai masyarakat Kabupaten Gianyar yang bahagia dan bebas dari segala sesuatu yang menyusahkan;
2. **Sejahtera** artinya masyarakat mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi yang tumbuh dan berkembang bersamaan menuju keseimbangan hidup manusia. Kesejahteraan juga mengandung makna terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan serta pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, layanan air bersih, serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak. Kondisi Kabupaten Gianyar yang memiliki Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan berbagai potensi yang melimpah untuk dikelola untuk kepentingan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
3. **Aman dan Damai** artinya sebuah harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat yang plural dan toleransi antar umat beragama sehingga tidak terjadi perseteruan yang mengarah pada terjadinya konflik antar suku, adat, ras dan agama. Damai juga mengandung arti tidak adanya kekerasan, intimidasi, diskriminasi, maupun dikotomi dalam kehidupan pribadi maupun kelompok masyarakat. Kondisi

masyarakat Kabupaten Gianyar yang memiliki toleransi tinggi terhadap sesama untuk tetap menjaga dan meningkatkan ketentraman dan keamanan untuk mewujudkan kedamaian dalam berkehidupan sehingga jauh dari rasa takut maupun rasa khawatir;

4. **Mandiri** Kondisi masyarakat Kabupaten Gianyar yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri untuk lebih maju dan mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain dengan mengandalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki;
5. **Berintegritas** Kondisi Kabupaten Gianyar yang memiliki mutu, sifat dan keadaan yang mampu memelihara dan menjaga kesatuan yang utuh dalam berbangsa dan bernegara sehingga terpancar kewibawaan dan terwujud kejujuran pada seluruh komponen masyarakat dan pemerintah;
6. **Tri Hita Karana** Sebuah konsep ajaran Agama Hindu untuk senantiasa menjaga dan memelihara keharmonisan hubungan 3 (tiga) komponen penting dalam kehidupan yang mencakup Parhyangan, Palemahan dan Pawongan untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Gianyar secara menyeluruh; dan
7. **Semesta Berencana** Pembangunan menyeluruh yang dilaksanakan di Kabupaten Gianyar dengan menyasar pembangunan fisik maupun pembangunan mental atau karakter masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Gianyar ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun pertanian yang produktif, efisien dan mandiri;
2. Membangun pariwisata yang inklusif dan berbasis budaya;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas berwawasan lingkungan;
4. Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berdaya saing tinggi;
5. Mewujudkan penguatan desa adat yang bertumpu pada nilai-nilai adat, budaya dan Agama Hindu; dan
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik .

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut maka prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan yaitu di bidang:

1. Pangan, Sandang dan Papan

Arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan Pangan, Sandang dan Papan mulai dari hulu sampai ke hilir berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Gianyar dan Wisatawan.

a. Pangan

- Melakukan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan di Gianyar
- Memetakan potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan di Kabupaten Gianyar
- Program yang mendukung peningkatan ketahanan pangan melalui kedaulatan beras
- Mengembangkan pertanian *Taman Gumi Banten*
- Mendorong pemanfaatan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produktif untuk ditanami tanaman untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi geografis melalui pemanfaatan teknologi produksi
- Pemuliabiakan dan pengembangan untuk pelestarian tanaman langka
- Mendorong program revitalisasi Subak Lestari/ Subak Abadi

b. Sandang

- Penyediaan bahan baku tenun
- Pemberian bantuan kredit dengan bunga ringan
- Peningkatan kapasitas masyarakat pelaku tenun
- Pembentukan dan penguatan koperasi perajin tenun
- Fasilitasi pemasaran, promosi, dan optimalisasi penyerapan produk kerajinan tenun

c. Papan

- Pemberian bantuan untuk membangun/ merehabilitasi rumah yang tidak layak huni
- Penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat miskin
- Pembangunan instalasi pengolahan sampah
- Pembangunan dan normalisasi sanitasi pemukiman

2. Kesehatan dan Pendidikan

Arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Gianyar dan wisatawan.

a. Kesehatan

- pembangunan POSKESDES dan POLINDES/ PUSTU di desa atau kelurahan
- Membangun Puskesmas Rawat Inap
- Pengangkatan tenaga medis dan paramedis
- Pengadaan Dokter Spesialis Kandungan dan Anak
- Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan.

b. Pendidikan

- Pemenuhan kebutuhan pendidikan PAUD/TK
- Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar (SD dan SMP)
- Mendirikan pendidikan berbasis keagamaan Hindu : PAUD/TK, SD SMP, dalam bentuk Pasra,am (formal, non formal dan informal)

3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, berorientasi pada upaya pemenuhan kebutuhan Krama Gianyar.

a. Sosial

- Pemberian santunan dan tunjangan kepada penderita cacat permanen dan lanjut usia
- Memastikan Jaminan Sosial wajib, yang terdiri dari Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kesehatan
- Pemberian santunan kematian masyarakat (Santimas)
- Memfasilitasi subsidi untuk pelaksanaan upacara Pitra Yadnya.

b. Ketenagakerjaan

Persiapan ketenagakerjaan (sumber daya manusia) yang spesifik .

- a. Membangun kerjasama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik yang ada di Gianyar, Provinsi Bali maupun di luar negeri.
- b. Melakukan kerjasama dengan negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang diluar negeri.

- c. Mewajibkan kepada para investor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat.
- d. Membangun kawasan untuk pekerja sektor informal : Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berciri khas Gianyar.
- e. Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.

4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Arah kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan adat, agama, tradisi, seni dan budaya

a. Adat

- Program Penguatan keberadaan Desa Pakraman/ Desa Adat.
- Memberdayakan desa pakraman/ desa adat sebagai lembaga untuk melaksanakan fungsi Pendidikan berbasis keagamaan hindu dan pelestarian kearifan lokal termasuk sekeha teruna (generasi muda)
- Membangun/ memberi kantor majelis madya desa pakraman yang representatif dengan sarana prasarana serta fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan adat.
- Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali.

b. Agama

- Memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan kepada para Sulinggih/ Pemangku.
- Menyelenggarakan kegiatan dharmawacana, penyebarluasan buku pendidikan, mengadakan program pemahaman dan pelatihan keagamaan kepada umat hindu
- Memberdayakan dan membantuk PHDI di Kabupaten Gianyar
- Menyusun, melestarikan, dan mensosialisasikan Purana Pura
- Pengamanan dan perlindungan terhadap Pura dan Pratima Pura
- Perlindungan terhadap aset pura (pelaba pura)
- Mengangkat guru kontrak untuk memenuhi pendidikan Agama Hindu yang ditugaskan di SD yang ada di Desa Pakraman/ Desa Adat
- Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama

c. Kebudayaan

- Menjadikan tradisi, seni dan budaya sebagai identitas dalam kehidupan Krama Gianyar
- Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Gianyar
- Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Majelis Kebudayaan dengan merevitalisasi kebudayaan majelis pertimbangan dan pembinaan kebudayaan (LISTIBYA) di Kabupaten Gianyar
- Membangun dan memperkuat kelembagaan seni, sastra, dan budaya.
- Memfasilitasi bantuan sarana prasana untuk mendukung kegiatan seni, sastra dan budaya
- Mengangkat guru kontrak yang bertugas untuk seni, sastra dan budaya serta Agama Hindu di SD serta membina Sanggar dan lembaga lain.
- Mengutamakan seni dan budaya pada pentas di hotel dan restoran.
- Menrapkan rahina mebasa bali, busana bali pada hari kamis.
- Menggunakan huruf Bali sebagai identitas dalam penamaan fasilitas publik, jalan, perkantran, toko dan sejenisnya.

5. Pariwisata

Arah kebijakan dan program pembangunan kepariwisataan berorientasi pada kualitas yang mencakup berbagai aspek yaitu : pengembangan destinasi wisata, produk dan industri pariwisata, promosi dan pemasaran pariwisata, sarana-prasarana pariwisata, dan pelayanan pariwisata.

- a. Mengembangkan destinasi Wisata Baru : Wisata Agro, Wisata Spiritual, Wisata Alam, Wisata Minat
- b. Mengembangkan pariwisata berkelanjutan dengan *green tourism* penggunaan material yang renewable (natural dan ramah lingkungan)
- c. Pengembangan wisata pedesaan/ wisata budaya
- d. Pengembangan obyek wisata baru yang menjadi wisata alternatif
- e. Pengembangan SDM Pariwisata
- f. Mengoptimalkan kerjasama dengan para pihak pelaku pelaku pariwisata
- g. Meningkatkan sistem promosi pariwisata secara terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi

3.2.2. Arah Kebijakan Air Minum Kabupaten Gianyar

Berdasarkan Jakstrada Kabupaten Gianyar, arah kebijakan Kabupaten Gianyar dalam pengembangan air minum yaitu:

1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan dan perdesaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi
2. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM
4. Pengembangan dan penerapan NSPK di daerah
5. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan
6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat
7. Pengembangan inovasi teknologi SPAM

3.2.3. Arah Kebijakan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Gianyar

Berdasarkan dokumen pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Gianyar, arah kebijakan dalam penyehatan lingkungan di Kabupaten Gianyar, yaitu:

1. Terwujudnya infrastruktur sanitasi yang mudah, murah, dan ramah lingkungan untuk masyarakat Gianyar
 - a. Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan
 - b. Peningkatan akses prasarana dan sarana Limbah Cair baik sistem on site maupun off site untuk perbaikan kesehatan masyarakat Kabupaten Gianyar
 - Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana Limbah Cair sistem setempat (on site) melalui sistem komunal.
 - Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana Limbah Cair sistem terpusat (off site).
 - c. Kampanye STBM pada seluruh Desa di Kabupaten Gianyar
 - d. Menetapkan wilayah Gianyar utara sebagai wilayah pengembangan pertanian dan konsevasi daerah resapan
2. Meningkatkan peran aktif seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dalam pembangunan sanitasi

- a. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan Limbah Cair permukiman
 - b. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan Limbah Cair permukiman
 - c. Penanganan persampahan Kabupaten Gianyar melalui pengelolaan sampah mandiri oleh swasta/ masyarakat
 - d. Penanganan sistem pembuangan akhir sampah yang tidak mencemari lingkungan sekitarnya dengan upaya efisiensi lahan dan pemanfaatan sisa sampah agar lebih berguna dengan metode yang tepat guna:
 - e. Mengembangkan Das Sebagai Daerah Tangkapan Air Hujan Dan Pesisir Laut serta Meningkatkan Kondisi Hutan Lindung Sebagai Daerah Resapan Air
3. Meningkatkan upaya pencegahan, penangan dan pemulihan kerusakan lingkungan serta penanganan pencemaran lingkungan
- a. Pengolahan sampah yang dapat mereduksi timbulan sampah sebesar 30% serta pemanfaatan sisa sampah untuk memperbaiki struktur serta kinerja tanah pada lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang kurang subur serta kegiatan penghijauan.
 - b. Memperluas lahan pembuangan akhir sampah sesuai dengan kriteria dan dilakukan proteksi terhadap lechate (air sampah) dan gas dengan metode yang tepat.
 - c. Penetapan kawasan 10 km dari TPA sebagai Kawasan Rawan Pencemaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
 - d. Pembatasan budidaya dan atau permukiman (yang sudah ada) di kawasan Garis Sempadan TPA untuk menghindari dampak pencemaran sampah.
 - e. Pembatasan untuk pengembangan kawasan budidaya dan atau permukiman baru pada kawasan Rawan Pencemaran TPA.
 - f. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Pembangunan prasarana dan sarana air limbah harus memperhatikan dampak sampingan yang mungkin timbul akibat penyebaran wabah melalui pencemaran dan bidang resapan dan konstruksinya harus benar-benar diperhatikan agar tidak mencemari air tanah.

3.3. Strategi Pencapaian 2018-2023

3.3.1. Strategi Pencapaian Air Minum

Berdasarkan kebijakan yang sudah disusun sebelumnya pada Jakstrada, maka diuraikan strategi dalam pencapaian arah kebijakan tersebut, yaitu:

Kebijakan 1 : Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan dan perdesaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

Strategi 1 : Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
2. Membangun SPAM baru untuk perkotaan dan perdesaan terutama untuk:
 - a. Ibukota Kecamatan yang belum memiliki sistem;
 - b. Kawasan perdesaan yang memiliki pertumbuhan penduduk yang pesat; dan
 - c. Kawasan/desa rawan air, rawan penyakit, kawasan permukiman kumuh dan padat, kawasan pesisir, kawasan terpencil/terisolir dan desa nelayan.
3. Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh perkotaan dan kawasan perdesaan.
4. Mengembangkan SPAM melalui program pembangunan air minum yang berbasis pada masyarakat.
5. Mendorong kebijakan khusus untuk pembangunan SPAM di daerah.

Strategi 2 : Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain untuk kebutuhan industri, niaga, dan pariwisata.

2. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.
3. Mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar daerah.

Strategi 3 : Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi.
2. Mengembangkan SPAM bukan jaringan perpipaan melalui program stimulan, percontohan, dan dana bergulir.
3. Melaksanakan pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan yang sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan, antara lain melalui pemanfaatan sanitarian di daerah.
5. Meningkatkan pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat kerja sama antar OPD.

Strategi 4 : Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menegakkan kontrol kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan regular monitoring terhadap kualitas air yang diterima masyarakat.
2. Melakukan peningkatan kapasitas PDAM untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala.
3. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum.
4. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (water safety plan).

Strategi 5 : Menurunkan tingkat kehilangan air.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan rehabilitasi pengembangan SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air.
2. Memberikan penyertaan modal kepada PDAM untuk mengembangkan program penurunan tingkat kehilangan air.
3. Memfasilitasi Penyelenggara SPAM perdesaan yang berkualitas.
4. Mengembangkan program kampanye pencegahan pencurian air.

Strategi 6 : Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun dan memvalidasi database serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum di daerah.
2. Membangun sistem informasi pengembangan SPAM di daerah.
3. Mengembangkan koordinasi yang mantap antar SKPD dalam pengelolaan sistem informasi pengembangan SPAM.
4. Meningkatkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bidang tugasnya menangani air minum untuk menyediakan data penyediaan air minum.
5. Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum.
6. Melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indikator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan statistik.
7. Mengembangkan sinergitas basis data SPAM terkait dengan pengelolaan bantuan/hibah yang diberikan ke daerah.

Kebijakan 2 : Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

Strategi 1 : Meningkatkan kemampuan finansial internal Penyelenggara SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan.
2. Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya.

3. Memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh
4. Mempercepat penyelesaian restrukturisasi utang PDAM

Strategi 2 : Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam pendanaan pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengembangkan pengalokasian dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi pengembangan SPAM.
2. Meningkatkan penyertaan modal daerah kepada PDAM untuk mengembangkan investasi di bidang air minum.
3. Memberi stimulan untuk mendorong pengembangan SPAM oleh masyarakat secara mandiri.
4. Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi pengembangan SPAM di daerah.

Strategi 3 : Mengembangkan pola pembiayaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah daerah.
2. Memetakan kebutuhan pengembangan SPAM yang dapat didanai oleh dana CSR.
3. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak.
4. Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR.
5. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang melalui dana CSR.

Strategi 4 : Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam pengembangan SPAM.
2. Menyusun skenario SPAM dan Penyelenggara yang didanai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan.
3. Memfasilitasi Penyelenggara untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan SPAM.
4. Memfasilitasi tersedianya pengaturan di daerah terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.
5. Memperkuat kelembagaan Penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.
6. Meningkatkan dukungan pemerintah (government support) dan jaminan pemerintah (government guarantee) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.
7. Mempercepat proses pemberian jaminan dalam subsidi bunga pinjaman dan perbankan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009.
8. Menyusun skenario alternatif pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam pengembangan SPAM.

Strategi 5 : Mendukung pemerintah pusat dalam mewujudkan sinergitas antara BUMN-BUMD dalam percepatan pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mendukung skema/pemetaan konsep kerjasama antara BUMN-BUMD dalam pengembangan SPAM.
2. Memfasilitasi penyusunan konsep kerjasama antara BUMN-BUMD dengan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Memfasilitasi penyusunan program untuk implementasi kerjasama antara BUMN-BUMD dalam pengembangan SPAM.
4. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antara BUMN-BUMD dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Kebijakan 3 : Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM

Strategi 1 : Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah dalam pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM di daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pengembangan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, Penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi.
2. Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.

Strategi 2 : Memperkuat peran dan fungsi SKPD Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada SKPD daerah tentang perannya sebagai regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam pengembangan SPAM.
2. Memantau pengaturan tugas fungsi SKPD dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam:
 - a. perencanaan,
 - b. pelaksanaan,
 - c. pengawasan, dan
 - d. penyediaan data dan informasi.
4. Memperkuat pelaksanaan tugas dekonsentrasi.
5. Memperkuat pelaksanaan tugas pembantuan.

Strategi 3 : Meningkatkan komitmen daerah untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mendukung kesepakatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan SPAM.
2. Memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen pengajuan (readiness criteria) rencana pembangunan SPAM secara konsisten.
3. Mewujudkan peningkatan efisiensi pengelolaan SPAM melalui pengelolaan SPAM regional.
4. Memfasilitasi penyusunan rencana induk, kebijakan dan strategi pengembangan SPAM di daerah.
5. Memperkuat penerapan NSPK di daerah.
6. Meningkatkan peran SKPD dan penyelenggara untuk menyusun laporan kinerja pengembangan SPAM secara berkala.
7. Melakukan pemantauan terhadap komitmen yang disusun pada awal perencanaan pengembangan SPAM secara intensif.

Strategi 4 : Menerapkan prinsip Good Corporate Governance untuk Penyelenggara/operator SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan, dan profesional.
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM.
3. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik.
4. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM.
5. Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien.

Strategi 5 : Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola Center of Excellent

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola Center of Excellent (CoE)
2. Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE.
3. Meningkatkan skala pelaksanaan program pengembangan kapasitas SDM dengan pola CoE.

Strategi 6 : Mengembangkan manajemen aset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman penerapan manajemen aset yang efisien.
2. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen aset.
3. Meningkatkan manajemen dan optimalisasi aset PDAM.

Strategi 7 : Mengembangkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPAM Regional

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mewujudkan kerja sama antara kabupaten/kota dalam bentuk regionalisasi penyelenggaraan SPAM.
2. Mendukung pembentukan kelembagaan SPAM Regional.
3. Mewujudkan penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan rencana bisnis (business plan) SPAM Regional.
4. Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan SPAM Regional.

Kebijakan 4 : **Pengembangan dan penerapan NSPK di daerah**

Strategi 1 : Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan NSPK yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM di daerah.
2. Memfasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa:
 - a. Pengembangan SPAM; dan
 - b. Rencana Induk Pengembangan SPAM.

Strategi 2 : Menerapkan NSPK yang telah ada.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK.
2. Melakukan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM di daerah.
3. Mewujudkan penyusunan Rencana Induk pengembangan SPAM di daerah.
4. Mewujudkan penyusunan rencana bisnis (business plan).
5. Mempedomani pembuatan dokumen tender konstruksi dengan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu.

Strategi 3 : Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan pengembangan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap.
3. Melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis.
4. Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap.
5. Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap.
6. Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal.
7. Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Menyusun Rencana Induk Pengembangan SPAM sebagai alat kontrol untuk setiap tahapan pembangunan.
9. Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan pengembangan SPAM di daerah

Kebijakan 5 : Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan

Strategi 1 : Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku

1. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:
 1. Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air.
 2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi.
 3. Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
 4. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah.
 5. Mewujudkan pembangunan sumur resapan, terutama di daerah permukiman.

Strategi 2 : Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.
2. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum.
3. Meningkatkan upaya pengembangan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan.
4. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air.
5. Mengembangkan fasilitas IPAL Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (reuse) air olahannya bagi keperluan non-domestik.

6. Mengembangkan konsep pemanenan air terutama di kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri.

Strategi 3 : Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi neraca air (water balance).
2. Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.
3. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku.
4. Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.

Strategi 4 : Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui SPAM regional.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku.
2. Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional.
3. Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan
4. Mewujudkan kerjasama antara daerah dalam mewujudkan SPAM Regional.
5. Memantapkan kriteria kesiapan usulan (readiness criteria) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.

Kebijakan 6 : Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

Strategi 1 : Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan

2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah perdesaan/yang tidak termasuk wilayah pelayanan BUMN/BUMD.
3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan.
4. Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat.
5. Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum.
6. Menyebarluaskan contoh keberhasilan (best practice) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
7. Mendorong pembentukan forum pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen.
8. Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
9. Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air.
10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air.

Strategi 2 : Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi badan usaha dan koperasi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pertemuan bisnis untuk memasarkan proyek kerjasama perusahaan pengembangan SPAM.
2. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam Penyelenggara SPAM.
3. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan kerjasama perusahaan pengembangan SPAM khususnya pola kerjasama antara Penyelenggara dengan dunia usaha (business to business).
4. Memfasilitasi penyelenggaraan SPAM dengan pola KPS atau kerjasama antara Penyelenggara dengan dunia usaha (business to business) yang saling menguntungkan.
5. Mendorong terwujudnya pemberian jaminan pengembalian investasi dari Pemerintah dalam skema KPS.
6. Mengakomodasi pengelolaan resiko pelaksanaan KPS.

7. Mendorong terwujudnya dokumen perencanaan proyek KPS yang komprehensif.
8. Mendorong tersedianya pengaturan di daerah yang mengatur tentang kerjasama dalam penyediaan infrastruktur.
9. Memberikan dukungan pemerintah daerah (local government support) dan jaminan pemerintah daerah (local government guarantee).

Kebijakan 7 : Pengembangan inovasi teknologi SPAM

Strategi 1 : Mendorong penelitian untuk menciptakan teknologi bidang air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan:
 - a. inovasi teknologi dalam pengembangan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku;
 - b. inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik; dan
 - c. pemanfaatan air hasil daur ulang dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penggunaan non konsumsi.

Strategi 2 : Memasarkan hasil inovasi teknologi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi.
2. Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi.
3. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum.
4. Mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi antara lain melalui pengembangan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi

Strategi 3 : Menerapkan teknologi tepat guna dalam pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku.
2. Melakukan rehabilitasi SPAM terbangun yang belum mampu mengolah air baku yang kualitasnya tidak memenuhi baku mutu.
3. Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal.
4. Melakukan pengelolaan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik.
5. Mendorong pemanfaatan air hasil daur ulang dari IPAL untuk penggunaan non konsumsi.

Strategi 4 : Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk melakukan mengembangkan life cycle assessment dalam pengelolaan air minum.
2. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk mengembangkan design for sustainability pada pengelolaan air minum.

3.3.2. Strategi Pencapaian Penyehatan Lingkungan

Strategi pencapaian penyehatan lingkungan di Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya infrastruktur sanitasi yang mudah, murah, dan ramah lingkungan untuk masyarakat Gianyar
 - a. Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan
 - b. Peningkatan akses prasarana dan sarana Limbah Cair baik sistem on site maupun off site untuk perbaikan kesehatan masyarakat Kabupaten Gianyar
 - Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana Limbah Cair sistem setempat (on site) melalui sistem komunal.
 - Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana Limbah Cair sistem terpusat (off site).
 - c. Kampanye STBM pada seluruh Desa di Kabupaten Gianyar

- d. Menetapkan wilayah Gianyar utara sebagai wilayah pengembangan pertanian dan konservasi daerah resapan
2. Meningkatkan peran aktif seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dalam pembangunan sanitasi
 - a. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan Limbah Cair permukiman
 - b. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan Limbah Cair permukiman
 - c. Penanganan persampahan Kabupaten Gianyar melalui pengelolaan sampah mandiri oleh swasta/ masyarakat
 - d. Penanganan sistem pembuangan akhir sampah yang tidak mencemari lingkungan sekitarnya dengan upaya efisiensi lahan dan pemanfaatan sisa sampah agar lebih berguna dengan metode yang tepat guna:
 - e. Mengembangkan DAS Sebagai Daerah Tangkapan Air Hujan Dan Pesisir Laut serta Meningkatkan Kondisi Hutan Lindung Sebagai Daerah Resapan Air
3. Meningkatkan upaya pencegahan, penangan dan pemulihan kerusakan lingkungan serta penanganan pencemaran lingkungan
 - a. Pengolahan sampah yang dapat mereduksi timbulan sampah sebesar 30% serta pemanfaatan sisa sampah untuk memperbaiki struktur serta kinerja tanah pada lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang kurang subur serta kegiatan penghijauan.
 - b. Memperluas lahan pembuangan akhir sampah sesuai dengan kriteria dan dilakukan proteksi terhadap lechate (air sampah) dan gas dengan metode yang tepat.
 - c. Penetapan kawasan 10 km dari TPA sebagai Kawasan Rawan Pencemaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
 - d. Pembatasan budidaya dan atau permukiman (yang sudah ada) di kawasan Garis Sempadan TPA untuk menghindari dampak pencemaran sampah.
 - e. Pembatasan untuk pengembangan kawasan budidaya dan atau permukiman baru pada kawasan Rawan Pencemaran TPA.

Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Pembangunan prasarana dan sarana air limbah harus memperhatikan dampak sampingan yang mungkin timbul akibat penyebaran wabah melalui pencemaran dan bidang resapan dan konstruksinya harus benar-benar diperhatikan agar tidak mencemari air tanah.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Program dan Kegiatan Bidang Air Minum Tahun 2019-2023

Program dan Kegiatan Bidang Pengelolaan Air Minum di Kabupaten Gianyar disusun untuk memenuhi target perluasan cakupan layanan akses air minum yang layak baik di perkotaan maupun di pedesaan. Program utama sektor pengelolaan air minum diarahkan dalam upaya penyediaan dan pengelolaan air baku baik dari sistem penyediaan hingga distribusi air baku. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bidang Cipta Karya ini dilaksanakan baik melalui pendanaan APBN, APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Program dan kegiatan penunjang juga terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yaitu Program Pemberdayaan Kawasan Pedesaan dengan Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Dalam kegiatan ini DPMD Kabupaten Gianyar melaksanakan kegiatan pembinaan kepada pengelola air minum di pedesaan.

Program kegiatan pada PDAM Kabupaten Gianyar juga sangat berperan dalam system penyediaan dan distribusi air baku. Program kegiatannya diantaranya yaitu Program Unit Produksi dengan kegiatan penambahan sumber air, penambahan dan revitalisasi Pompa dan unit pengolahan. Untuk program Transmisi/Distribusi PDAM melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam menurunkan tingkat kehilangan air di Kabupaten Gianyar. Untuk meningkatkan jumlah sambungan PDAM di masyarakat, PDAM Kabupaten Gianyar melaksanakan kegiatan penggantian Water Meter Pelanggan dan penambahan sambungan baru. Selain itu, untuk mendukung program Provinsi dan Pusat, PDAM Kabupaten Gianyar juga melaksanakan kegiatan perluasan jaringan pipa dalam rangka antisipasi jaringan perpipaan Waduk Sidan yang akan segera dibangun. Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum Kabupaten Gianyar dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1.
Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum
Kabupaten Gianyar Tahun 2019 -2023

No	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Dinas PUPR Kabupaten Gianyar
2	Program Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Fasilitasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Dinas PMD Kabupaten Gianyar
3	Program pada Unit Produksi	Penambahan Sumber Air	PDAM Kabupaten Gianyar
		Penambahan dan revitalisasi Pompa	
		Penambahan dan revitalisasi unit pengolahan	
4	Program pada Transmisi Distribusi	Penurunan tingkat kehilangan air (Non Renew Water)	PDAM Kabupaten Gianyar
5	Program Penggantian Water Meter Pelanggan	Penggantian Water Meter Pelanggan	PDAM Kabupaten Gianyar
6	Program Penambahan Sambungan Baru	Penambahan Sambungan Baru	PDAM Kabupaten Gianyar
7	Program Program Antisipasi Jaringan Perpipaan Waduk Sidan	Perluasan jaringan pipa	PDAM Kabupaten Gianyar

Sumber : Rencana Strategis OPD 2018-2023

4.2. Program dan Kegiatan Bidang Penyehatan Lingkungan Tahun 2019-2023

Program dan Kegiatan di Bidang Penyehatan Lingkungan meliputi program dan kegiatan di bidang sanitasi, air limbah, drainase, dan persampahan. Pengelolaan penyehatan lingkungan di Kabupaten Gianyar dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Gianyar melalui Bidang Cipta Karya, Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar.

Dinas PUPR Kabupaten Gianyar melaksanakan program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah. Selain itu, Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Gianyar juga melaksanakan program kegiatan di Bidang

Drainase yaitu Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong dengan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.

Untuk Program Pengembangan Lingkungan Sehat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar dengan kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat dimana pada kegiatan ini Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar melaksanakan Pemeriksaan Sampel Air Bersih, Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Sanitasi Kit, Kesling Kit, dan juga Pengadaan IPAL.

Untuk program kegiatan di Bidang Persampahan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan diantaranya yaitu:

- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
- Peningkatan pelayanan Kebersihan
- Pembinaan pengelolaan sampah kab/kota
- Pembangunan Pilot Projek 3R
- Peningkatan operasional pelayanan persampahan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Gianyar juga melaksanakan program yang mendukung penyehatan lingkungan yaitu Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan kegiatan Perencanaan dan Penataan Kawasan Permukiman dan kegiatan Perencanaan dan Penataan Sarana Air Bersih dan sanitasi dasar Bagi Masyarakat Miskin

Untuk lebih jelasnya, Program dan Kegiatan Bidang Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Gianyar dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut ini :

Tabel 4.2.
Program dan Kegiatan di Bidang Penyehatan Lingkungan
Kabupaten Gianyar Tahun 2019 -2023

No	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan	Dinas PUPR Kabupaten Gianyar

No	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
		Prasarana Air Limbah	
2	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Dinas PUPR Kabupaten Gianyar
		Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	
3	Pengembangan Lingkungan Sehat	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Sampel Air Bersih • Kegiatan STBM • Sanitasi Kit • Kesling Kit • Pengadaan IPAL 	Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar
		Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	
		Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	
		Peningkatan pelayanan Kebersihan	
		Pembinaan pengelolaan sampah kab/kota	
		Pembangunan Pilot Projek 3R	
Peningkatan operasional pelayanan persampahan			
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar
6	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perencanaan dan Penataan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Perencanaan dan Penataan Sarana Air Bersih dan sanitasi dasar Bagi Masyarakat Miskin	

Sumber : Rencana Strategis OPD 2018-2023

BAB V

KEBUTUHAN INVESTASI

5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi dalam pelayanan bidang AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target RPJMN. Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan. Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja bidang AMPL Kabupaten Gianyar sampai dengan tahun 2023 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL. Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Gianyar tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Tambahan akses sampai dengan 2023 dihitung berdasarkan target kabupaten/kota, baik pada air minum dan penyehatan lingkungan.
- Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.
- Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya.

Tabel 5.1
Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum

Indikator	Kondisi saat ini (2018)	Kondisi 2023	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi tahun 2019-2023
Jumlah penduduk	508.100	533.778			
Jumlah penduduk yang dilayani	427.515	533.778	106.263	1.000.000	106.262.660.000
Cakupan penduduk yang dilayani	84,14%	100%	14,93%		
Total kebutuhan					106.262.660.000

Investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Tabel 5.2
Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi

Indikator	Kondisi saat ini (2018)	Kondisi 2023	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi tahun 2019-2023
Jumlah penduduk	508.100	533.778			
Jumlah penduduk yang dilayani	503.680	533.778	30.098	1.200.000	36.117.600.000
Cakupan penduduk yang dilayani	99,13 %	100 %	0,87 %		
Total kebutuhan					36.117.600.000

Investasi sanitasi dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan

Berdasarkan capaian kinerja AMPL Kabupaten Gianyar sampai dengan tahun 2018, target pencapaian bidang air minum dan penyehatan lingkungan, pada akhir tahun 2023 Kabupaten/Kota diharapkan mampu mencapai kondisi 100% penduduk memiliki akses air minum layak dan 100% penduduk memiliki akses sanitasi layak. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperkirakan kebutuhan investasi selama tahun 2019-2023 untuk sektor air minum dan sektor sanitasi sebagai berikut:

- Sektor air minum adalah **Rp. 106.262.660.000,-** (*seratus enam milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*) dan,
- Sektor sanitasi adalah **Rp 36.117.600.000,-** (*tiga puluh enam milyar seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah*).

- Total kebutuhan Investasi air minum dan sanitasi selama tahun 2019 - 2023 mencapai **Rp. 142.380.260.000,-** (*seratus empat puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh dua ratus enam puluh ribu rupiah*)
- Total kebutuhan investasi per tahun **Rp. 28.476.052.000,-** (*dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh enam juta lima puluh dua ribu rupiah*) per tahun.

Dengan rata-rata realisasi APBD Kabupaten Gianyar untuk bidang AMPL di Kabupaten Gianyar masih belum optimal, maka hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi Kabupaten Gianyar menunjukkan perlunya:

1. Anggaran AMPL difokuskan ke perdesaan dengan program penyediaan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat,
2. Meningkatkan alokasi APBD untuk AMPL melalui *refocusing* program tahunan, dan
3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha untuk investasi AMPL dengan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
4. Optimalisasi pendanaan dana bantuan desa dengan pembangunan yang mendukung program AMPL.

Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian					Anggaran (Rp.)					Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Pendanaan	Pengelola
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.7.20.14	Fasilitasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah Kelompok PAMSIMAS yang dibina	13 Kelompok	29 Kelompok	39 Kelompok	39 Kelompok	39 Kelompok	39 Kelompok	8.854.400,00	8.942.944,00	9.032.374,00	9.122.897,00	9.213.924,00	39 Kelompok	APBD	Dinas PMD
2415.004	SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi															
2415.004.004.1	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kabupaten Gianyar (Pembangunan Sumur Bor 1 Unit, Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible Q=20 l/dt H=100 m' 1 Unit, Penyambungan Daya PLN 66 KVA, serta perlengkapannya)	Jumlah pemanfaat jaringan perpipaan		1000 jiwa/Ha					1.500.000.000,00						APBN	Dinas PUPR
2415.004.004.2	Pengembangan Jaringan Perpipaan Kabupaten Gianyar (Pembangunan Sumur Bor 1 Unit, Pengadaan dan Pemasangan Pompa Submersible Q=20 l/dt H=60 m' 1 Unit, Penyambungan Daya PLN 66 KVA, serta perlengkapannya)	Jumlah pemanfaat jaringan perpipaan		1000 jiwa/Ha					1.500.000.000,00						APBN	Dinas PUPR
2415.008	SPAM Berbasis Masyarakat															
2415.008.004	PAMSIMAS			14 liter/detik												
2415.008.004.1	Pembangunan Jaringan Air Minum Perdesaan	Jumlah debit air minum perdesaan		7 liter/detik					3.500.000.000,00						APBN	Dinas PUPR
2415.008.004.2	Pembangunan Jaringan Air Minum Perdesaan	Jumlah debit air minum perdesaan		7 liter/detik					700.000,00						APBD	Dinas PUPR

Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian					Anggaran (Rp.)					Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Pendanaan	Pengelola
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2415.011	Pembangunan SPAM Kawasan Rawan Air			46 liter/detik												
2415.011.004	Pembangunan SPAM di Kawasan Rawan Air			46 liter/detik												
2415.011.004.2	Pembangunan Jaringan Air Minum di Br. Tiyangpis, Desa Buahah, Kec. Payangan			2 liter/detik					400.000.000,00						DAK	Dinas PUPR
2415.011.004.4	Pembangunan Jaringan Air Minum di Br. Sebatu, Desa Sebatu, Kec. Tegallalang			2 liter/detik					400.000.000,00						DAK	Dinas PUPR
2415.011.004.6	Pembangunan Jaringan Air Minum di Br. Patas, Desa Taro, Kec. Tegallalang			2 liter/detik					400.000.000,00						DAK	Dinas PUPR
2415.011.004.10	Pembangunan Jaringan Air Minum di Br. Lebah B, Desa Bukian, Kec. Payangan			2 liter/detik					400.000.000,00						DAK	Dinas PUPR
2415.011.004.11	Pembangunan Jaringan Air Minum di Br. Ulapan, Desa Bukian, Kec. Payangan			2 liter/detik					400.000.000,00						DAK	Dinas PUPR
2415.011.004.13	Pembangunan Jaringan Air Minum di Br. Bresela, Desa Bresela, Kec. Payangan			2 liter/detik					400.000.000,00						DAK	Dinas PUPR

Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian					Anggaran (Rp.)					Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Pendanaan	Pengelola
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2415.011.004.14	Pembangunan Jaringan Air Minum di Br. Selat, Desa Buahhan Kaja, Kec. Payangan			2 liter/detik					400.000.000,00						DAK	Dinas PUPR
2415.011.004.17	Pembangunan Jaringan Air Minum di Br. Bunteh, Desa Puhu, Kec. Payangan			2 liter/detik					400.000.000,00						DAK	Dinas PUPR
2415.011.004.18	Pembangunan Jaringan Air Minum di Br. Taro Kaja, Desa Taro, Kec. Tegallalang			2 liter/detik					400.000.000,00						DAK	Dinas PUPR
2415.011.004.19	Pembangunan Jaringan Air Minum di Br. Ponggang, Desa Puhu, Kec. Payangan			2 liter/detik					400.000.000,00						DAK	Dinas PUPR
2415.011.004.20	Pembangunan Jaringan Air Minum di Br. Bonjaka, Desa Sebatu, Kec. Tegallalang			2 liter/detik					400.000.000,00						DAK	Dinas PUPR
2415.011.004.21	Pembangunan Jaringan Air Minum di Br. Majangan, Desa Buahhan, Kec. Payangan			2 liter/detik					400.000.000,00						DAK	Dinas PUPR
2415.011.004.22	Pembangunan Jaringan Air Minum di Br. Jasan, Desa Sebatu, Kec. Tegallalang			2 liter/detik					400.000.000,00						DAK	Dinas PUPR
1.03.1.03.01.01.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersendat	80,09 %	80,33%					7.305.885.481,00	7.378.944.335,81	7.452.733.779,17	7.527.261.116,96	7.602.533.726,13	81,27%	APBD	Dinas PUPR

Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian					Anggaran (Rp.)					Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Pendanaan	Pengelola
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.1.03.01.01.16.03	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong		3.400 m	3.400 m	3.400 m	3.400 m	3.400 m	5.520.100.000,00	5.575.301.000,00	5.631.054.010,00	5.687.364.550,10	5.744.238.195,60	17.000 m	APBD	Dinas PUPR
1.03.1.03.01.01.16.05	Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong		2.600 m	2.600 m	2.600 m	2.600 m	2.600 m	1.785.785.481,00	1.803.643.335,81	1.821.679.769,17	1.839.896.566,86	1.858.295.532,53	13.000 m	APBD	Dinas PUPR
2.1.2.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Persentase Kecamatan yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	75%	75%	80%	85%	90%	95%	1.763.686.500,00	1.781.323.365,00	1.799.136.596,65	1.817.127.964,64	1.835.299.244,28	95%	APBD	Dinas Kesehatan
2.1.2.21.1	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat								587.895.500,00	593.774.455,00	599.712.199,55	605.709.321,55	611.766.414,76		APBD	Dinas Kesehatan
		Jumlah desa/kel di wilayah kecamatan yang melaksanakan STBM	Min 20%	Min 20%	Min 20%	Min 20%	Min 20%	Min 20%								
		Jumlah sarana air minum di wilayah kecamatan yang dilaksanakan pengawasan kualitas air minum	50 SAB	50 SAB	55 SAB	60 SAB	65 SAB	70 SAB						70 SAB		

Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian					Anggaran (Rp.)					Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Pendanaan	Pengelola
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah TPM diwilayah kecamatan yang memenuhi syarat kesehatan	32 TPM	32 TPM	34 TPM	36 TPM	38 TPM	40TPM						40TPM		
		Jumlah TTU diwilayah kecamatan yang memenuhi syarat kesehatan	93	93	93.5	94	94.5	95						95		
2.06.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah di kota yang tertangani	57%	57%	78%	94%	98%	99%	3.587.367.400,00	3.623.241.074,00	3.659.473.485,00	3.696.068.220,00	3.733.028.902,00	99%	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang diadakan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	445.189.400,00	450.000.074,00	380.000.485,00	380.000.000,00	380.000.902,00	15 paket	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.15.04	Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Volume sampah yang masuk TPA	621 m3/hari	677 m3/hari	683 m3/hari	870 m3/hari	920 m3/hari	949 m3/hari	861.641.000,00	761.641.000,00	761.641.000,00	761.641.000,00	4.008.205.000,00	949 m3/hari	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.15.10	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	350 orang	350 orang	350 orang	350 orang	350 orang	350 orang	90.994.000,00	91.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	350 orang	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian					Anggaran (Rp.)					Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Pendanaan	Pengelola
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.05.15.13	Peningkatan pelayanan Kebersihan	Volume sampah perkotaan yang tertangani	256 m3/hari	256 m3/hari	288 m3/hari	-	-	-	2.189.543.000,00	2.189.541.000,00	499.541.000,00	509.541.000,00	510.880.000,00	-	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase area pelayanan kebersihan	12%	14%	18%	24%	27%	35%						35%		
2.05.15.14	Pembinaan pengelolaan sampah kab/kota	Jumlah pengelola limbah B3 yang dibina	-	-	15 objek	20 objek	30 objek	35 objek	-	31.059.000,00	40.000.000,00	45.870.220,00	45.870.000,00	35 objek	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.15.15	Pembangunan Pilot Projek 3R	Jumlah TPS 3R dan bank sampah yang dibangun	-	-	-	1 unit	1 unit	1 unit	-	-	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	3 unit	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.15.16	Peningkatan operasional pelayanan persampahan	Volume sampah perkotaan yang tertangani m3/hari	-	-	-	465 m3/hari	525 m3/hari	564 m3/hari	-	-	1.228.291.000,00	1.249.016.000,00	1.284.657.000,00	564 m3/hari	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	80%	80%	80%	80%	90%	90%						90%		

Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian					Anggaran (Rp.)					Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Pendanaan	Pengelola
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		kabupaten/kota														
2.05.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya pemantauan kualitas air dan limbah	60 titik	60 titik	-	-	-	-	517.198.000,00	162.000.000,00	165.000.000,00	187.000.000,00	187.000.000,00	60 titik		
		Terlaksananya pemantauan sumber pencemaran di Kabupaten Gianyar	-	-	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi						8 lokasi		
2414	Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman															
2414.003	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman															
2414.003.004	Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Bidang Pengembangan PLP															
2414.003.004.1	Pembentukan Lembaga Pengelola UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Kabupaten Gianyar								150.000,00						APBN	Dinas PUPR

Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian					Anggaran (Rp.)					Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Pendanaan	Pengelola
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2414.003.004.2	Pendampingan Pembentukan Lembaga Pengelola Sistem Pengelolaan Air Limbah(SPAL) Kabupaten Gianyar								150.000.000,00						APBN	Dinas PUPR
2414.003.004.3	Penyusunan Masterplan Drainase Kabupaten Gianyar								1.000.000.000,00						APBN	Dinas PUPR
2414.003.004.4	Pendampingan Penyusunan Ranperda SPAL Sistem Pengelolaan Air Limbah(SPAL) Kabupaten Gianyar								500.000.000,00						APBN	Dinas PUPR
2414.003.004.5	TFL Teknis Kab. Gianyar								50.000.000,00						APBN	Dinas Lingkungan Hidup
2414.003.004.6	TFL Pemberdayaan 3R Kab. Gianyar								50.000.000,00						APBN	Dinas Lingkungan Hidup
2414.003.004.7	TFL Pemberdayaan 3R Kab. Gianyar								50.000.000,00						APBN	Dinas Lingkungan Hidup
2414.003.004.8	TFL Teknis Kab. Gianyar								50.000.000,00						APBN	Dinas Lingkungan Hidup
2414.003.004.9	TFL Pemberdayaan 3R Kab. Gianyar								50.000.000,00						APBN	Dinas Lingkungan Hidup
2414.003.004.10	TFL Teknis Kab. Gianyar								50.000.000,00						APBN	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian					Anggaran (Rp.)					Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Pendanaan	Pengelola
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2414.005.004	Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan Permukiman															
2414.005.004.1	Penanganan Drainase jalanan utama batubulan-celuk, Sukawati								12.000.000.000,00						APBN	Dinas PUPR
2414.005.004.2	Penanganan drainase jalan utama batuan-semabaung-blahbatuh								10.000.000.000,00						APBN	Dinas PUPR
2414.005.004.3	Penanganan drainase jalan raya bona-blahbatuh								3.000.000.000,00						APBD PROV	Dinas PUPR
2414.005.004.4	Penanganan drainase jalan raya bedulu, blahbatuh								3.000.000.000,00						APBD PROV	Dinas PUPR
2414.005.004.5	Penanganan drainase jalan raya tegaltamupayangan								20.000.000.000						APBD PROV	Dinas PUPR
2414.005.004.7	Rehabilitasi saluran drainase jln sakura Serongga, kec. Gianyar								5.000.000.000,00						APBD	Dinas PUPR
2414.006	Sistem Penanganan Persampahan															
2414.006.005	Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota															
2414.006.005.1	Pengadaan Excavator TPA								2.500.000.000,00						APBN	Dinas Lingkungan Hidup
2414.006.005.2	Pengadaan Bulldozer TPA								2.000.000.000,00						APBN	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian					Anggaran (Rp.)					Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Pendanaan	Pengelola
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2414.006.006	Sistem Penanganan Persampahan Skala Kawasan															
2414.006.006.1	TPST Padangtegal								5.000.000,00						APBN	Dinas Lingkungan Hidup
2414.006.007	Sistem Penanganan Persampahan Berbasis Masyarakat															
2414.006.007.1	Pembangunan Infrastruktur TPS3R Kab. Gianyar								1.000.000.000,00						APBN	Dinas Lingkungan Hidup
2414.006.007.2	Pembangunan Infrastruktur TPS3R Kab. Gianyar								1.000.000.000,00						APBN	Dinas Lingkungan Hidup
2414.006.007.3	Pembangunan Infrastruktur TPS3R Kab. Gianyar								1.000.000.000,00						APBN	Dinas Lingkungan Hidup
16	Program Lingkungan Sehat Perumahan															
16.007	Perencanaan dan Penataan Kawasan Permukiman	Data base drainase		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	115.000.000,00	143.750.000,00	179.687.500,00	224.809.375,00	280.761.719,00	21 dokumen	APBD	Dinas Perkotaan dan Pertanahan
16.008	Perencanaan dan Penataan Sarana Air Bersih dan sanitasi dasar Bagi Masyarakat Miskin	Data base air minum dan sanitasi		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	175.000.000,00	218.750.000,00	273.437.500,00	341.796.875,00	427.246.094,00	11 dokumen	APBD	Dinas Perkotaan dan Pertanahan
-	Unit Produksi	Jumlah Sumber Air yang ditambah							972.500.000,00	235.000.000,00	181.350.000,00	50.700.000,00	-	-	PDAM dan PMPD	PDAM

Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian					Anggaran (Rp.)					Kondisi Kinerja Akhir	Sumber Pendanaan	Pengelola
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah penambahan dan revitalisasi pompa							1.998.906.600,00	540.500.000,00	1.108.020.000,00	2.099.642.000,00	575.229.717,00		PDAM dan PMPD	PDAM
		Jumlah Penambahan dan revitalisasi unit pengolahan							1.321.000.000,00	270.000.000,00	205.000.000,00	125.000.000,00			PDAM dan PMPD	PDAM
	Transmisi Distribusi	Jumlah penurunan tingkat kehilangan air							9.576.469.000,00	5.351.640.000,00	6.155.596.000,00	5.118.468.000,00	5.186.596.000,00		PDAM dan PMPD	PDAM
	Penggantian Water Meter Pelanggan	Jumlah Penggantian water meter pelanggan							1.816.565.000,00	2.395.739.000,00	2.396.789.000,00	2.511.381.000,00	2.608.878.000,00		PDAM	PDAM
	Penambahan Sambungan Baru	Jumlah penambahan sambungan baru		1804	1500	1500	1500	1500	4.694.794.000,00	3.691.500.000,00	3.691.500.000,00	3.691.500.000,00	3.691.500.000,00		PDAM dan PMPD	PDAM

Sumber: Renstra OPD, RPIJM, dan Hasil Analisis

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2019-2023 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Gianyar. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2019-2023 Kabupaten Gianyar pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target daerah. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2019-2023 Kabupaten Gianyar juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Gianyar Tahun 2019-2023 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Gianyar melalui kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2019-2023 Kabupaten Gianyar di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL/Tim Teknis Kabupaten Gianyar maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMN 2019.

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang:

- a. Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2023
- b. Rekomendasi langkah tindak lanjut pada OPD tahun berikutnya
- c. Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya

6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL dilaksanakan sebagai berikut:

A. Materi Pemantauan dan Evaluasi

1. Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan

2. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan

B. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun
2. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan

C. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

1. Kepala OPD Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing
2. Kepala OPD melalui Tim Teknis Penyusunan RAD AMPL (Pokja RAD AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda dan Litbang
3. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah
4. Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh OPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bappeda dan Litbang
5. Kepala Bappeda dan Litbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL
6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD
7. Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda dan Litbang
8. Kepala Bappeda dan Litbang melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati

D. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

1. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL
2. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL
3. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi BPSPAMS dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan

BAB VII

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Gianyar dimaksudkan sebagai arah dan pedoman umum penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan AMPL selama kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan AMPL yang ditargetkan dapat dicapai di Tahun 2023 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar saja, namun oleh seluruh masyarakat Gianyar, termasuk masyarakat yang menjadi sasaran pemerintah Kabupaten Gianyar mendukung dan melaksanakan upaya pengembangan AMPL

Terkait dengan sosiokultural masyarakat, upaya pengembangan AMPL tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (*public awareness*) yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.

Koordinasi diantara *stakeholders* perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan penanggulangan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa sampai ke tingkat kelompok sasaran. Ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih maupun terlewatnya sasaran pengembangan AMPL.

Percepatan Pencapaian RAD AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan rencana aksi program Percepatan Pencapaian Target RPJMN tahun 2019 dan evaluasi pencapaian hasil. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian RAD AMPL.

Dokumen Rencana Aksi Daerah dalam percepatan pencapaian target RAD AMPL ini merupakan bahan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian target RAD AMPL. Dokumen RAD AMPL ini akan berlaku sebagai acuan dalam melakukan upaya Percepatan

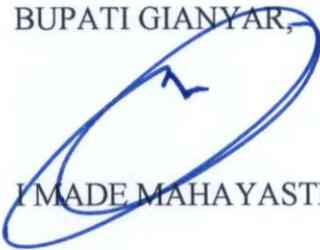
Pencapaian Target RAD AMPL dalam jangka pendek dan jangka menengah. Dokumen ini terbuka untuk dilakukan perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan. Dokumen RAD AMPL ini diharapkan akan mampu menjadi pembawa arah bagi upaya Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL dan penciptaan kesejahteraan bagi warga masyarakat di Kabupaten Gianyar.

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA

Pencapaian Target RAD AMPL dalam jangka pendek dan jangka menengah. Dokumen ini terbuka untuk dilakukan perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan. Dokumen RAD AMPL ini diharapkan akan mampu menjadi pembawa arah bagi upaya Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL dan penciptaan kesejahteraan bagi warga masyarakat di Kabupaten Gianyar.

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA